

## Bab V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi sistem pembayaran non-tunai berupa KKP dan CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM belum optimal, dengan penggunaan yang masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor komitmen pimpinan, faktor sumber daya manusia, faktor ketersediaan SOP, faktor mekanisme *reward and punishment*, serta faktor keterlibatan pihak Bank.

a. Faktor Komitmen Pimpinan

Belum adanya komitmen pimpinan yang cukup tinggi dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai. Hal ini tercermin dari beberapa kondisi, antara lain format perjanjian kerjasama pengelolaan KKP yang belum mengikuti format terstandarisasi dari Kemenkeu, belum tersedianya SOP, belum tersedianya mekanisme *reward and punishment*, serta belum tersedianya pengawasan internal yang cukup memadai terhadap pengelolaan kedua instrumen non-tunai tersebut.

b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM manajemen pengguna KKP maupun CMS VA di internal Satker belum cukup optimal. Hal ini dapat terlihat dari berbagai permasalahan yang masih kerap ditemui di lapangan. Kesalahan administrasi pertanggungjawaban kegiatan, kekeliruan pembebanan tagihan KKP, keterlambatan memproses administrasi pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan, serta belum terpenuhinya prosedur persetujuan perubahan limit KKP dan persetujuan pendebitan rekening dari CMS VA. *Mindset* pegawai yang masih cukup sulit beralih ke sistem non-tunai harus betul-betul menjadi *concern* dari pimpinan.

c. Faktor Ketersediaan *Standar Operating Procedure* (SOP)

Satker belum memiliki SOP pengelolaan KKP maupun CMS VA sebagai standar baku dalam bekerja sehingga belum tersedia pengaturan secara lebih mendetil. Pengaturan ini diperlukan guna meminimalisir berbagai permasalahan yang masih sering terjadi di lapangan.

d. Faktor Mekanisme *Reward and Punishment*

Satker belum menerapkan mekanisme *reward and punishment* dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA. dimana hal ini terlihat dari kondisi belum adanya aturan yang mewajibkan penggunaan instrument non-tunai, belum terdapat sanksi yang diterapkan atas penyalahgunaan penggunaan, keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan, serta belum adanya apresiasi atau *reward* terhadap penggunaan KKP maupun CMS VA yang sudah baik dan melebihi target.

e. Faktor Keterlibatan Pihak Bank

Meskipun kerjasama yang terjalin dengan pihak Bank selama ini berjalan dengan relatif baik namun beberapa fakta di lapangan seperti terjadinya *double* pembebanan oleh pihak Bank atas satu transaksi yang sama, pengenaan biaya *surcharge* oleh *merchant*, proses perubahan limit KKP diluar jam kerja yang cukup lama, hingga kasus *cybercrime* yang belakangan ini menimpa dua Satker, mengindikasikan layanan yang diberikan pihak Bank belum cukup optimal.

2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kelemahan dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Suatu model dirumuskan guna mengoptimalkan penggunaan KKP dan CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja negara yang dilakukan oleh Satker. Model memasukkan komitmen pimpinan sebagai faktor yang paling memengaruhi penerapan *cashless payment system*. Faktor komitmen pimpinan juga memengaruhi faktor SDM, faktor ketersediaan SOP, faktor mekanisme *reward and punishment*, dan faktor keterlibatan pihak Bank. Pengelolaan faktor-faktor menuntut sinergi yang kuat antara organisasi dan manajemen

pengguna instrument non-tunai. Dengan demikian setiap tahapan implementasi pengelolaan KKP dan CMS VA yang dimulai sejak tahap penandatanganan kerjasama antara Satker dengan pihak Bank, penerbitan dan penyerahan instrument, transaksi penggunaan dan pertanggungjawaban, hingga tahap pengawasan dan monitoring evaluasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi sehingga dapat berdampak pada optimalnya sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa perbaikan terhadap penerapan faktor yang diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi sistem pembayaran non-tunai dengan meningkatkan penggunaan KKP dan CMS VA.

1. Terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sistem pembayaran non-tunai:

a. Faktor Komitmen Pimpinan

- i. Memperbaharui perjanjian kerjasama pengelolaan KKP antara Satker dengan Bank Penerbit KKP sesuai format yang terstandarisasi pada PMK terkait.
- ii. Menyusun *policy brief* untuk kemudian disampaikan kepada Menteri guna memperoleh dukungan terhadap pentingnya implementasi sistem pembayaran non-tunai pada mekanisme pembayaran belanja Kementerian.
- iii. Menerbitkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran guna mendorong kewajiban penggunaan KKP oleh para pegawai maupun CMS VA oleh Bendahara, pada akun belanja tertentu seperti akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran, akun 521811 Belanja Persediaan, serta akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- iv. Menerbitkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran guna mendorong/menghimbau komunitas UKM binaan Kementerian untuk mendaftarkan diri menjadi penyedia barang/jasa pada aplikasi *marketplace* pemerintah, Digipay.

- v. Menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran terkait pembentukan tim pemantauan dalam mengantisipasi dan memitigasi risiko yang berpotensi muncul dalam penggunaan KKP maupun CMS VA.
- b. Faktor Sumber Daya Manusia
- i. Bagian Keuangan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, *refreshment* ataupun bimbingan teknis yang ditujukan untuk pengelola keuangan maupun pengguna instrument non-tunai pada masing-masing Satker.
  - ii. Bagian Keuangan mendorong pemanfaatan e-learning atau pelatihan jarak jauh bagi para pegawai maupun pengelola keuangan, yang disediakan oleh Kemenkeu melalui laman Kemenkeu Learning Center (<https://klc2.kemenkeu.go.id/>), diantaranya seperti *microlearning* pengelolaan Uang Persediaan dalam KKP, *microlearning* studi kasus perpajakan atas transaksi dengan KKP, *microlearning* studi kasus pengujian belanja perjalanan dinas menggunakan KKP, dan *microlearning virtual account*.
  - iii. Bagian Keuangan menginisiasi penyelenggaraan kegiatan *forum group discussion* secara berkala sebagai wadah berbagi pengalaman antar para pengguna instrument non-tunai, khususnya terkait kendala-kendala yang kerap ditemui dalam penggunaannya.
- c. Faktor Ketersediaan SOP
- i. Bagian Keuangan pada Unit Eselon I menyusun SOP sebagai acuan dalam mengelola penggunaan KKP dan CMS VA, dengan melibatkan manajemen pengguna dari seluruh Satker .
  - ii. Setiap Satker berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan evaluasi SOP secara berkala, bagi pengelola keuangan maupun pengguna KKP dan CMS di internal Satker.
- d. Faktor Mekanisme *Reward and Punishment*
- i. Pimpinan Unit Eselon I membangun mekanisme *reward and punishment* bagi para pengguna maupun Satker. Pemberian *reward* atau apresiasi diberikan bagi mereka

yang memiliki transaksi penggunaan KKP dan CMS VA tertinggi, misalnya berupa piagam penghargaan ataupun *acknowledgement* pada *social media* Kementerian. Sementara *punishment* atau sanksi diberikan kepada mereka yang belum memanfaatkan KKP dan CMS VA pada kurun waktu tertentu, atau belum mencapai target realisasi bulanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selama dua bulan berturut-turut. Sanksi yang diberikan dapat berupa surat teguran.

- ii. Pimpinan Unit Eselon I melakukan evaluasi terhadap mekanisme *reward and punishment* yang sedang berjalan, untuk mengukur dampak mekanisme tersebut terhadap optimalisasi penggunaan instrument non-tunai.
- e. Faktor Keterlibatan Pihak Bank
- i. Pihak Bank memperbaharui perjanjian kerjasama pengelolaan KKP antara Satker dengan Bank Penerbit KKP yang mengatur poin-poin mengenai keterlibatan bank dalam pemanfaatan KKP dan CMS VA oleh satker.
  - ii. Pihak Bank menyelenggarakan kegiatan *forum group discussion* secara berkala untuk meningkatkan koordinasi antara Satker dengan Bank dalam pengelolaan KKP dan CMS VA.
  - iii. Pihak Bank menyediakan layanan dan pengaduan 24 jam khususnya terkait pengajuan perubahan limit KKP yang menjadi kebutuhan utama Satker, serta untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis yang kerap ditemui di lapangan.
  - iv. Pimpinan Satker mendorong pihak Bank untuk segera menyediakan aplikasi daring (*dashboard*) untuk memantau seluruh penggunaan KKP secara *real-time*.
  - v. Pimpinan unit Eselon I mendorong pihak Bank untuk membuat laporan dan analisis secara berkala atas penggunaan KKP maupun CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

## 2. Terkait output penelitian dan penelitian selanjutnya

Pelaksanaan implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dapat mengacu pada model sistem pembayaran non-tunai terintegratif yang dikembangkan oleh peneliti. Penerapan model dimaksud sangat bergantung pada peran pimpinan dalam mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan manajemen kas pada lingkungannya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam proses analisis dan validasi data. *Key informant* yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada pengelola keuangan dan pengguna instrument non-tunai pada Satker Pusat. Untuk analisis data yang lebih mendalam, pemilihan *key informant* dapat melibatkan pengelola keuangan dan pengguna instrument non-tunai pada Satker Dekonsentrasi di daerah. Belum dilakukan proses validasi data melalui kegiatan *Focus Group Discussion* atau diseminasi. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang lebih valid, maka dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan proses validasi melalui kegiatan tersebut.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayan, A. Y. (2022). Tinjauan atas Pelaksanaan Pembayaran Menggunakan Uang Persediaan Melalui Kartu Kredit Pemerintah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu (Doctoral Dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/1385>.
- Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam Belanja Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 420-425). <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art52>.
- Arfandi, A., Ismail, I., & Aminah, S. (2022). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(1), 820-833.
- Armin, Sahila Kusminaini. 2018. "Analisis Siklus Pengeluaran Uang Persediaan (UP) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang." *Jurnal Kompetitif* 7(2): 77-94. DOI: <http://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v7i2.461>.
- Arsyati, A., Darwanis, D., & Djalil, M. A. (2008). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNB dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi pada Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(1), 29-49.
- Astri Tania Herlen, Vima Tista Putriana, Denny Yohana, 2021. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia, Fakultas Ekonomi Pascasarjana Akuntansi, Universitas Andalas, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), Februari 2021, 80-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1235>.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/139619>.
- Bambang, A. S. (2014). Perbedaan model dan teori dalam ilmu komunikasi. *Humaniora*, 5(2), 1153-1160.
- Bareta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Belanja Online (Suatu Kajian dari Aspek Hukum Keuangan Negara). *Law Reform*, 14(1), 29-41. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20234>.
- Bintarto, E.A. (2018). *Fintech dan Cashless Society : Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya : Universitas Airlangga. <https://himma.maksi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/428/2018/10/Essay-Booklet-Access18.pdf>.
- Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Jilid 2. 2019. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/panduan/implementasi-kkp/3167-buku-pintar-kkp.html>.

- Daly, J.L. and Buehner, M.A. (2017), "P-card utilization in municipal government: advantages and concerns", *Journal of Public Procurement*, Vol. 3 No. 1, pp. 75-94. <https://doi.org/10.1108/JOPP-03-01-2003-B004>.
- Davici, Nadia (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan dan Faktor Politik terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP*. Vol 6, No.1. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2766>.
- Elmizar, E., & Kasmadi, K. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157. <https://doi.org/10.55768/Jrmi.V2i3.32>.
- Goedhart, C. *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara (R.12/H)* / C. Goedhart .1987. [digilib.fisipol.ugm.ac.id](http://digilib.fisipol.ugm.ac.id).
- Husain, F. (2022). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Modernisasi Belanja Negara melalui Mekanisme Uang Persediaan (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia Jakarta). <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/8830>.
- Ichwan, M.. (1989). *Administrasi Keuangan Negara: Suatu Pengantar Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)* M. Ichwan . Yogyakarta: Liberty. [https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=42854&keywords=](https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=42854&keywords=).
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntt/id/profil/309-lkpp/2886-umkm-goes-digital.html>.
- <https://megapolitan.antaranews.com/berita/261213/pemkab-karawang-perkenalkan-penerapan-sistem-pembayaran-nontunai-produk-umkm>.
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta4/id/data-publikasi/pengumuman/2952-draft-perjanjian-kerja-sama-pks-antara-satuan-kerja-dan-bank-penerbit-kartu-kredit-pemerintah-kkp.html>.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1737291/teten-masduki-luncurkan-perayaan-hari-umkm-nasional-2023-sebut-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-60-persen>.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>.
- Liyanapathirana, T., & Ranjani, R. P. C. (2017). Cash Management System and Suggestions for Policy Formulation for E-cash management System in Sri Lanka. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 8(1), 75-81. <https://hdl.handle.net/10520/EJC-9b5715e99>.
- Maulid, L. C., & Sudibyoy, Y. A. (2020). Kartu Kredit Pemerintah sebagai Alat Pembayaran Belanja Negara di Indonesia: Permasalahan dan Solusi. *Akuntabel*, 17(2), 301-313. <https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.8063>.
- Monginsidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 20(1), 15-30.



- Mumpuni, M. (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Mubarak, D. A., Akhmadi, M. H., & Wati, E. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2), 115-122. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v6i2.1699>.
- Munik, S. (2022). Tinjauan atas Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Jambi (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/668>.
- Muwaffaq, F. A., & Akhmadi, M. H. (2022). Pelaksanaan Restrukturisasi dan Pendebitan Rekening Pengeluaran Kas Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri. *Info Artha*, 6(1), 95-112. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1691/898>.
- Novitasari, T. & Halim, A. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58898>.
- Nuranindita, M. (2023). Peran dan Manfaat Marketplace dan Digital Payment dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Provinsi Bangka-Belitung. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 17-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v8i1.590>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga.
- Putra, M. P. S. (2022). Tinjauan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Belanja Negara pada KPPN Tanjungpinang (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/666>.
- Ratmono, Dwi. dan Mahfud Solihin, 2015. "Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual". Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146999>.
- Rosalyni, G. E. N., & Khabibah, N. A. (2020). Penerapan Cash Management System sebagai Sistem Belanja di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi.

- Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 11(2), 139–147.  
<http://dx.doi.org/10.36694/jimat.v11i2.296>.
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17-34.  
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372>.
- Saputri, A. D. B., & Indrawati, L. R. (2020). Penerapan Cash Management System dalam Bidang Program dan Keuangan Balitbang Kota Magelang. DOI:  
<https://doi.org/10.1210/v1i3.31>.
- Sari, I. (2020). Analisis Penerapan Cash Management System dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di PIK Pulogadung. *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(1), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.31294/jp.v18i1.6699>.
- Schlossberger, O., & Soldánová, M. (2022). Cashless Payment System and Covid-19 on the Example of the Czech Republic. *Financial Internet Quarterly*, 18(1), 31-43.  
<https://doi.org/10.2478/fiqf-2022-0003>.
- Setiawati, Elsa Pudji (2021). Penyusunan Model. Fakultas Kedokteran Unpad.  
[https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/penyusunan\\_model.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/penyusunan_model.pdf)
- Soeriatmadja, Arifin P. (1986). Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta:Gramedia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=455575>.
- Soetrisno PH. Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: FS-UGM, 1981. Hal 7-8.  
[https://books.google.co.id/books/about/Dasar\\_dasar\\_ilmu\\_keuangan\\_negara.%20html?id=bsBHHAACA AJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Dasar_dasar_ilmu_keuangan_negara.%20html?id=bsBHHAACA AJ&redir_esc=y).
- Suhyana, F. A., Suseno, S., & Ramli, T. S. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 138-156.  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92>.
- Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>.
- Suparno, E. (2005). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kecerdasan Emosional Guru terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Se–Rayon Barat Kabupaten Sragen (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ulbrich, F. (2003). Introducing a Research Project on Shared Services in Governmental Agencies. <http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html>.
- Ulfi, Izzani, 2020, Tantangan dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Volume 25 No. 1, April 2020.  
<http://dx.doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Walley T., Haycox A., Boland A., editors. *Pharmacoeconomics*. 1 ed. Philadelphia: Churchill Livingstone 2004.

- Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan serta Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. *Otonomi*, 20(2), 267-274. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v20i2.1285>.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). Pengaruh Persepsi Bendahara Pengeluaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 164-170. <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/43>.
- Yulianti, D. (2021). Efektivitas Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada KPPN Dumai. *Jurnal Optimal*, 18(2), 1-25. <https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/204>.



Nomor : 2096/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 15 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Tesis  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan


Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Galih Cheria Puspita  
NPM : 2243021054  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Model Penggunaan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,  
  
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur  
Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
4. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
5. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan.

Nomor : 2096/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 15 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Tesis  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan  
Jl. Ir. H. Juanda No.19, Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Galih Cheria Puspita  
NPM : 2243021054  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Model Penggunaan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

*Mala Sondang Silitonga*  
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajar/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan.

Nomor : 2096/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 15 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Tesis  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Pimpinan CV. Astra Era Buana  
Jl. Utan Kayu Raya No.63 Jakarta Timur

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Galih Cheria Puspita  
NPM : 2243021054  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Model Penggunaan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik,



*Mala Sondang Silitonga*  
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajar/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan.

Nomor : 2096/STIA.1.1/PPS.02.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Tesis  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 15 September 2023

Yth. Pimpinan Dwidaya Tour  
Jl. Raya Alternatif Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna  
Jakarta Timur

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Galih Cheria Puspita  
NPM : 2243021054  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Model Penggunaan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik,



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan.

Nomor : 2096/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 15 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Tesis  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Pimpinan Kantor Kas BNI Kementerian Koperasi dan UKM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Galih Cheria Puspita  
NPM : 2243021054  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Model Penggunaan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan.





## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adji Permana, Ak. M.Ec.Dev  
NIP : 19711114 199202 1 001  
Pangkat/Gol. : Pembina utama muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Galih Cheria Puspita  
NPM : 2243021054

Telah melakukan pengumpulan dan pengambilan data untuk penelitian di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan judul penelitian:

“Model Sistem Pembayaran Non-Tunai (*Cashless Payment System*) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Oktober 2023



Adji Permana, Ak. M.Ec.Dev  
NIP. 19711114 199202 1 001

## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Arif Rahman Hakim  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Sekretariat Kementerian  
Tanggal Wawancara : 22 September 2023  
Kode Informan : KI-1

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Pak Arif, izin pak. Sesuai dengan surat izin penelitian yang saya sampaikan sebelumnya, saya Galih Cheria Puspita pak. Saya mahasiswa magister Politeknik STIA LAN jurusan Manajemen Keuangan Negara. Saat ini saya sedang membuat tesis dan sedang melakukan penelitian dengan mengangkat tema Penggunaan “Sistem Pembayaran Non Tunai pada Kementerian Koperasi dan UKM”. Jadi dari latar belakang yang saya kumpulkan bahwa ternyata di Kementerian Koperasi dan UKM itu penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga cash management system atau internet banking itu masih rendah pak, jadi pengelolaan uang persediaannya masih didominasi oleh uang tunai. Oleh sebab itu saya berniat menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penggunaan KKP dan juga CMS ini di Kementerian Koperasi dan UKM. Terimakasih juga ya pa katas kesediannya menjadi responden penelitian saya. Izin langsung bertanya ya pak. Apa sih yang bapak ketahui tentang sistem pembayaran non tunai atau cashless payment system kemudian kartu kredit pemerintah dan juga cash management system?
KI-1	:	Dari beberapa literatur yang pernah saya baca serta surat-surat yang masuk ke meja saya, beberapa tahun belakangan ini sepertinya pemerintah semakin concern pada sistem pembayaran non-tunai (cashless payment system). Sekian tahun lalu, berbagai pembayaran belanja negara masih dilakukan secara tunai, bahkan pembayaran gaji pegawai di Kemenkop dan UKM hingga tahun 2018 masih diberikan secara tunai, belum ditransfer ke rekening pegawai. Pada pertengahan tahun 2019, yang saya ketahui bahwa Satker kita sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan BNI dalam rangka penerbitan KKP. Sejak saat itu, Kementerian kita pun mulai beralih dari yang sebelumnya mengelola Uang Persediaan secara tunai, perlahan-lahan mulai menggunakan KKP. Yang saya pahami sistem KKP layaknya kartu kredit di dunia swasta ya, bisa digunakan untuk belanja lebih dulu, kemudian dibayarkan tagihannya belakangan kepada pihak Bank. Penggunaan KKP sendiri seharusnya mengacu pada peraturan terkait yg diterbitkan Menteri Keuangan. Sementara untuk CMS VA, yang saya ketahui adalah sejenis internet banking, digunakan untuk mentransfer dana, melakukan

		pembayaran ke penyedia atau pegawai. Melalui fasilitas dashboard, saya dapat memantau transaksi yang dilakukan Bendahara untuk membayar belanja Satker.
Peneliti	:	Baik pak, lalu apa yang bapak ketahui atau mungkin pernah merasakan secara langsung manfaat dari penggunaan KKP atau CMS ini pak?
KI-1	:	Manfaat penerapan cashless payment system yang saya ketahui antara lain bahwa dengan penggunaan KKP maupun CMS VA tentu akan meminimalisir kebutuhan terhadap uang tunai. Bendahara tidak perlu lagi menarik seluruh dana dari rekening dan menyimpannya di brankas. Hal ini tentu terkait juga dengan tingkat keamanan dalam bertransaksi. Kebutuhan akan dana tunai juga mengharuskan pemerintah harus memutar otak dalam menyediakannya, dimana bila harus dipenuhi dari pinjaman/pembiayaan, berarti ada bunga hutang yang harus dibayarkan juga oleh pemerintah selain tentu membayar biaya pokok pinjamannya.
Peneliti	:	Cukup banyak ya pak manfaatnya. Nah kemudian disisi lain, ada tidak sih pak kendala atau hambatan yang mungkin bapak ketahui atau rasakan juga nih pak dari penggunaan KKP atau CMS ini apa tuh pak?
KI-1	:	Informasi terakhir yang saya peroleh dari tim bahwa sudah ada concern dari Kemenkeu terkait penggunaan KKP di Kementerian Koperasi dan UKM yang belum cukup optimal. Saya akan coba diskusi lebih lanjut untuk membahas kemungkinan penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi sementara dari Bendahara, bahwa mindset pegawai yang masih merasa nyaman dengan penggunaan dana tunai menjadi alasan utama hal tersebut. Sementara selaku pengguna KKP, saya tidak menemui kendala berarti dalam pemakaiannya. Minggu lalu saat saya keluar kota, dompet saya tertinggal di pesawat, KKP saya termasuk yang hilang didalamnya, tetapi BNI bisa merespon dengan cepat permintaan blokir yang diajukan.
Peneliti	:	Ooo berarti sejauh ini Bapak sendiri tidak menemui kendala berarti ya pak saat menggunakan KKP.
KI-1	:	Ya bisa dibilang seperti itu mba. Malah pegawai ya sepertinya belum banyak yang menggunakannya.
Peneliti	:	Kalau mengenai tugas dan tanggungjawab Bapak selaku KPA dalam pengelolaan KKP atau CMS VA itu seperti apa pak?
KI-1	:	Dalam mendukung kebijakan pemerintah menerapkan gerakan pembayaran non-tunai, di tahun 2018 Kemenkeu mendorong seluruh K/L mengimplementasikan KKP, disusul tahun 2020 untuk CMS VA. Pada pertengahan tahun 2019, kami mengajukan perubahan proporsi Uang Persediaan, yang kemudian ditindaklanjuti adanya perjanjian kerjasama penerbitan KKP dengan BNI. Sebelum digunakan, terlebih dahulu ditetapkan daftar pemegang dan administrator KKP, dan memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Kami juga melakukan kewajiban penyampaian laporan monev penggunaan KKP setiap 3 bulan. Mengenai CMS VA, saya berperan selaku approval atas transaksi keuangan yang dilakukan melalui internet banking.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Satker dengan pihak Bank terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-1	:	Perjanjian kerjasama untuk penerbitan KKP ini dilakukan pada pertengahan tahun 2019. Kerjasama dilakukan dengan bank BNI karena rekening pengeluaran Satker dibuka pada bank tersebut. Sesuai ketentuan maka bank yang digunakan harus sama. Perjanjian ini menjadi dasar

		pengelolaan KKP sebagai alat pembayaran non-tunai yang digunakan Kemenkop hingga saat ini. Selain Sekretariat, 4 Satker lainnya pun membuat PKS serupa. Untuk CMS VA, yang saya ketahui merupakan fasilitas rekening pengeluaran Satker dari BNI, mekanismenya seperti internet banking. Bendahara yang mengoperasikan, dan user saya sebagai approval.
Peneliti	:	Oke baik...nah kemudian adakah bentuk dorongan Satker terhadap penggunaan KKP atau CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja?
KI-1	:	Kami berupaya mendorong para pegawai dan juga pengelola keuangan untuk mengoptimalkan penggunaan KKP maupun CMS VA. Dorongan yang diberikan memang masih bersifat lisan atau berupa surat kepada seluruh pimpinan Satker mengenai implementasi yang sudah berjalan dan himbauan untuk mengoptimalkan penggunaan KKP tersebut. Namun mengingat adanya tuntutan yang semakin tinggi untuk menerapkan cashless payment system ini, maka kami akan coba merumuskan suatu kebijakan terkait dengan optimalisasi penggunaan keduanya.
Peneliti	:	Bagaimana penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi atau Bimbingan Teknis terkait pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Bapak?
KI-1	:	Kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan KKP maupun CMS VA pernah beberapa kali dilakukan oleh Biro Keuangan, dengan menghadirkan narasumber dari pihak KPPN maupun Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Peneliti	:	Bagaimana aktivitas Pengawasan, Monitoring serta Evaluasi terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-1	:	Setiap triwulan, kami selalu menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas penggunaan KKP di Satker kami. Bagian Keuangan merupakan unit yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan KKP maupun CMS VA pada Satker Sekretariat.
Peneliti	:	Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Bapak?
KI-1	:	Para pemegang KKP dan administrator yang sudah saya tetapkan melalui surat keputusan. Kemudian yang mengelola administrasi pertanggungjawaban serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya dari Bagian Keuangan.
Peneliti	:	Bagaimana pemberian tugas bagi pegawai yang mengelola KKP atau CMS VA di dalam unit Bapak selama ini?
KI-1	:	Saya agak kurang mengetahui hal itu ya, apakah ada rangkap tugas atau tidak. Tetapi jika memang ada rangkap tugas, saya harap beban kerjanya masih wajar.
Peneliti	:	Aturan/regulasi apa yang Bapak pedomani dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-1	:	Bahwa untuk penerbitan KKP ini harus dilandasi perjanjian kerjasama dengan Bank. Penggunaan KKP hanya untuk keperluan belanja APBN. Baik pemegang maupun pengguna KKP harus paham ya, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu bentuk pelanggaran juga.
Peneliti	:	Bagaimana penggunaan KKP atau CMS VA yang Bapak/Ibu lakukan selama ini?

KI-1	:	Saya menggunakan KKP bisa melalui mesin EDC atau saya sendiri lebih sering bertransaksi secara online. Untuk CMS VA, yang mengoperasikannya Bendahara, saya sebagai approver, sering dibantu stafsus saya juga. Penggunaannya seperti internet banking saja. Saya pernah mendapatkan laporan dari Kepala Biro Umum dan Keuangan bahwa saat ini mekanisme pembayaran APBN sudah menggunakan sistem yang terintegrasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya menuntut para pengelola keuangan untuk selalu meleak teknologi.
Peneliti	:	Kendala/permasalahan administrasi apa saja yang pernah Bapak/Ibu temui dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-1	:	Sejauh ini saya tidak pernah mengalami masalah administrasi. Saya juga dibantu oleh tim yang cekatan. Permasalahan administrasi sebetulnya masih hal yang wajar ya mba, namanya juga kan manusia. Yang penting jangan ada unsur kesengajaan yang membuatnya menjadi penyalahgunaan KKP atau CMS VA.
Peneliti	:	Sebutkan berbagai SOP dalam bidang keuangan yang telah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM? Bagaimanakah penerapan SOP Pengelolaan KKP dan CMS VA?
KI-1	:	Cukup banyak setahu saya SOP yang diterbitkan terkait bidang keuangan. Yang saya ingat itu mengenai pengelolaan uang persediaan dan penyusunan laporan keuangan. Sementara untuk pengelolaan KKP atau CMS VA belum ada ya. Kalau tidak salah kan ada PMK baru terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baru terbit pertengahan tahun yang lalu. Sebaiknya setelah itu harus segera dibuat turunannya di internal kita, termasuk SOP nya.
Peneliti	:	Dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA yang telah berjalan selama ini, ketentuan apa saja yang dipedomani oleh Bapak/Ibu dalam melaksanakan pekerjaan?
KI-1	:	Selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan saja.
Peneliti	:	Bagaimanakah penerapan SOP dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-1	:	Menurut saya, SOP ya perlu dibuat agar selalu ada panduan dalam melaksanakan tugas. Terlebih ini dalam bidang keuangan. Setiap pihak yang terlibat baik dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA ini harus memiliki acuan saat menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian keberadaan SOP tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan K,KP/CMS VA namun hingga proses pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMS VA yang diatur oleh Kementerian Keuangan?
KI-1	:	Di PMK pasti diatur ya. Hanya saya kurang tahu seberapa jauh aturan-aturan didalamnya sudah dijalankan. Terlepas dari itu, sebaiknya kita semaksimal mungkin memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai yang telah disediakan pemerintah. Selain tentunya sangat bermanfaat, jika suatu waktu mekanisme tersebut ditegakkan, kita tidak terlalu kaget karena sudah menjadi bagian dari proses pelaksanaan anggaran di lingkungan kita sendiri.

Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment internal dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-1	:	Kami belum memiliki mekanisme reward and punishment internal yang baku. Sejauh ini dorongan yang kami lakukan baru sebatas himbauan untuk menggunakan KKP maupun CMS VA.
Peneliti	:	Bagaimana penerapan mekanisme reward and punishment dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-1	:	Saya pikir dapat berpengaruh ya. Melihat implementasi yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun ini, yang memang selama ini kami sifatnya hanya menghimbau saja, rasanya perlu didorong dengan lebih ekstra agar penggunaannya keduanya bisa lebih optimal. Bila kedepannya sudah semakin baik, sudah menjadi habit dalam mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Satker, mungkin tidak lagi diperlukan mekanisme seperti itu.
Peneliti	:	Upaya apa saja yang telah dilakukan Satker dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP atau CMS VA di Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-1	:	Bagian Keuangan sudah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan KKP maupun CMS VA pada Satker Sekretariat. Aktivitas ini dapat dilakukan lebih luas lagi melingkupi Satker lainnya yang juga sudah menerapkan KKP. Disini, peran serta APIP juga dapat dilibatkan.
Peneliti	:	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan transaksi belanja negara menggunakan KKP?
KI-1	:	Sudah pernah.
Peneliti	:	Transaksi belanja negara apakah yang Bapak/Ibu lakukan dengan menggunakan KKP?
KI-1	:	Sejauh ini belum pernah menemui kendala saat bertransaksi di lapangan. Nmun belum lama saya kehilangan dompet yang didalamnya terdapat KKP. Tim langsung menghubungi pihak Bank untuk pemblokiran sementara dan pihak Bank merespon dengan cepat.
Peneliti	:	Apakah transaksi belanja negara yang Bapak/Ibu lakukan dengan KKP memerlukan ketersediaan mesin EDC?
KI-1	:	Ketersediaan mesin EDC tentu dapat memengaruhi peningkatan transaksi non-tunai. Dengan semakin banyaknya ketersediaan mesin EDC, membuka peluang untuk semakin luasnya transaksi nn-tunai yang dapat dilakukan oleh para pegawai.
Peneliti	:	Jika pernah menggunakan mesin EDC, kendala/ hambatan apa saja yang pernah Bapak/Ibu temui saat melakukan transaksi belanja negara dengan KKP?
KI-1	:	Kurang paham karena tidak terlibat langsung dalam proses transaksi.
Peneliti	:	Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-1	:	Sepengetahuan saya bank merespon dengan cepat komunikasi via WA terkait permintaan kenaikan limit yang diajukan oleh tim.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah Bapak/Ibu temui saat menggunakan KKP? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?

KI-1	:	Pihak Bank juga relatif cepat merespon aduan permasalahan yang beberapa kali diajukan baik oleh pemegang KKO maupun oleh pengelola keuangan.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah Bapak/Ibu temui saat menggunakan CMS VA? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?
KI-1	:	Saya kurang mengetahui hal tersebut.
Peneliti	:	Baik pak Arif. Terimakasih atas kesediaan waktunya pak. InsyaAllah bermanfaat bagi penelitian yang saya lakukan. Selamat siang pak.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## TRANSKRIP WAWANCARA

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Nama : Budi Mustopo  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Unit Kerja : Sekretariat Kementerian  
Tanggal Wawancara : 27 September 2023  
Kode Informan : KI-2

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Pak Budi Pak izin pak, sesuai dengan surat izin penelitian yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon izin perkenalan diri dulu ya pak. Nama saya Galih Cheria Puspita pak. Saya mahasiswa magister Politeknik STIA LAN jurusan Manajemen Keuangan Negara. Nah ini adapun tujuan saya, saat ini saya sedang membuat tesis sedang melakukan penelitian pak dengan mengangkat tema Penggunaan “Sistem Pembayaran Non Tunai pada Kementerian Koperasi dan UKM”. Adapun kenapa saya tertarik mungkin sedikit latar belakangnya pak dari telaah dokumen dan juga informasi yang saya kumpulkan bahwa memang ternyata di Kementerian Koperasi dan UKM itu penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga cash management system atau internet banking itu masih rendah pak, jadi pengelolaan uang persediaannya masih didominasi oleh uang tunai kecuali PPK, oleh karena itu saya tertarik nih pak mau menggali faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi penerapan penggunaan KKP dan juga CMS ini di Kementerian Koperasi dan UKM, juga saya ucapkan terima kasih pak selaku pejabat pembuat komitmen ya pak di salah satu satker di Kementerian Koperasi dan UKM bersedia menjadi responden penelitian saya. Saya mungkin izin langsung bertanya ya pak. Pertama apa yang bapak ketahui tentang sistem pembayaran non tunai atau cashless payment system kemudian kartu kredit pemerintah dan juga cash management system?
KI-2	:	Terminology cashless payment sistem itu saya dengar pertama kali saat menghadiri sosialisasi KKP di KPPN pada awal tahun 2019 kalau tidak salah saat itu saya juga baru ditugaskan menjadi P2K atau PPK jadi dengan sistem ini berarti pembayaran pengeluaran kita sudah tidak lagi dilakukan secara tunai ya sejak ada KKP maka pegawai dapat menggunakannya untuk membeli tiket misalnya atau bayar hotel itu tidak perlu mengeluarkan uang pribadi atau tidak cash nah ini tentu memberikan kemudahan bagi pegawai yang tidak perlu pusing lagi mencari talangan atau pinjaman dari sana sini.
Peneliti	:	Kemudian pak mungkin apa yang bapak ketahui atau bahkan rasakan secara langsung nih pak manfaat dari penggunaan KKP atau CMS?



KI-2	:	Untuk setiap transaksi belanja yang menggunakan KKP ataupun CMS VA menjadi mudah di trace atau ditelusuri juga terdokumentasi. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya fraud penggunaan dana tunai oleh pegawai di sisi lain pegawai pun akan merasa lebih aman karena saat berpergian perjalanan dinas tidak perlu membawa banyak uang tunai.
Peneliti	:	Sudah ter cover gitu ya pak sama KKP, mungkin itu untuk manfaat nah kira-kira ini pak kalau kendala atau hambatan yang mungkin bapak ketahui atau rasakan juga nih pak dari penggunaan KKP atau CMS ini apa tuh pak?
KI-2	:	Ya sebagai pengguna KKP saya tidak atau belum menemui banyak hambatan saat memakainya hanya saja sebagai PPK dengan penggunaan KKP berkas bertanggung jawaban perjalanan dinas menjadi bertambah banyak untuk satu pegawai saja karena uang harian diproses di luar SPJ KKP maka pemberkasannya menjadi 2 set satu SPJ pembayaran satu lagi SPJ GUP KKP jadi agak kurang simple tidak sederhana ada 2 kali disini.
Peneliti	:	Jadi kalau secara bertanggung jawaban dengan GUP KKP ini malah agak lebih banyak ya pak.
KI-2	:	Ya paling kendalanya sering lupa password, suka ketuker-tuker sama kartu yang lain.
Peneliti	:	Tapi saat ganti password cepat pak respon pihak bank?
KI-2	:	Cepat
Peneliti	:	Nanti ada respon pihak bank nanti kebetulan ada pertanyaan saya pak di belakang saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya pak. Kemudian apa nih yang bapak ketahui mungkin tentang perjanjian kerjasama nih pak antara Satker dengan pihak bank terkait pengelolaan KKP atau CMS VA ini pak?
KI-2	:	Penerbitan KKP pada Satker Pusat dilandasi oleh perjanjian kerjasama dengan pihak bank disini Kementerian Koperasi adalah dengan BNI pada tahun 2019 yang lalu untuk Satker sekarang sendiri total KKP diterbitkan saat itu sebanyak 25 kartu yang tadi dari 21 KKP operasional serta 4 KKP operasional atau belanja modal.
Peneliti	:	Baik pak kemudian apakah terdapat himbauan pak atau aturan dari Satker yang mewajibkan penggunaan KKP atau CMS VA ini pak dalam mekanisme pembayaran belanja?
KI-2	:	Yang saya ketahui hingga saat ini belum ada arahan yang sifatnya mewajibkan penggunaan KKP dalam melakukan pembelian barang dari penyedia lebih mengimbau agar penggunaannya semakin ditingkatkan selaku PPK kami pun turut mendorong para pelaksanaan kegiatan untuk lebih memanfaatkan KKP nya pernah berdiskusi dengan bendahara bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan CMS VA sebaiknya diadakan lagi sosialisasi sehingga selain ada perbaikan dari sisi pemahaman secara teknis yang utama adalah membangun awareness tentang benefit sistem tersebut.
Peneliti	:	Oke baik nah kemudian tadi sedikit sebut sosialisasi berikutnya pak apakah Satker pernah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau Bimtek nih pak terkait pengolahan KKP atau CMS ini pak?
KI-2	:	Selain sebagai Satker kami juga berperan sebagai unit eselon 1 yang melakukan pembinaan terhadap seluruh Satker pada lingkup Kemenkop dan UKM kami berharap beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi

		terkait penggunaan KKP maupun CMS VA kepada para pengelola keuangan baik di lingkungan pusat maupun daerah.
Peneliti	:	Jadi tadi sekretariat selain sebagai Satker juga sebagai unit eselon 1 begitu ya pak. pembinaan Satker di Kementerian Koperasi dan UKM pernah berarti ya pak beberapa kali melakukan sosialisasi kemudian kalau tadi sosialisasi berikutnya pak apakah di Satker ada melakukan aktivitas pengawasan atau monev nih pak terkait ini?
KI-2	:	Ya selaku PPK tentunya pengawasan yang saya lakukan antara yang menguji kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran dan menguji pengajuan dokumen belanja yang menggunakan KKP.
Peneliti	:	Lalu siapa saja sih pak yang terlibat dalam pengelolaan KKP di satker bapak?
KI-2	:	Yang terlibat dalam pengelolaan KKP itu ya mulai dari KPA atasan ya ini eselon 1 ya pak sesmen kalau di sekretariat, kemudian saya selalu PPK kemudian PPSPM Bendahara, pemegang KKP administrator dan untuk koordinasi teknis sehari-hari tim saya berhubungan intensif dengan bagian Keuangan.
Peneliti	:	Oke baik nah mungkin nih bapak apakah punya informasi nih pak kiranya apakah terdapat rangkap tugas pak dalam pengelolaan KKP atau CMS ini terus apakah beban pekerjaan pegawai masih memadai nih pak dengan ada tambahan pengelolaan KKP atau CMSPA ini pak?
KI-2	:	Saya rasa rangkap tugas ya ada karena KKP dan juga CMSPA ini kan bagian dari mekanisme pembayaran pasti di handle juga oleh bagian keuangan tetapi sejauh ini tidak ada informasi beban kerja disana melebihi kapasitas yang ada semua masih bisa di handle dan berjalan lancar
Peneliti	:	Baik pak nah selanjutnya pak apakah bapak mengetahui atau memahami regulasi pengelolaan KKP atau CMSPA ini pak aturan apa saja yang mungkin sudah bapak ketahui?
KI-2	:	Belum terlalu dalam ya saya memahami peraturannya beberapa saja yang saya ketahui KKP kan ada dua jenis KKP perjalanan dinas tidak boleh digunakan untuk belanja ATK atau kebutuhan operasional lainnya begitu pun KKP operasional lalu untuk satu penerima pembayaran penggunaan KKP yang sebelumnya senilai 50 juta direvisi menjadi 200 juta selaku penguji bukti-bukti pengeluaran saya akan coba mempelajari lebih lagi atau lebih mendalam untuk memastikan akan tidak terjadinya kekeliruan baik dalam penggunaan maupun pertanggungjawaban KKP.
Peneliti	:	Baik pak, lalu kalau secara teknis nih bapak apakah memahami penggunaan KKP atau CMSPA ini pak?
KI-2	:	Yang saya rasakan cukup familiar ya menggunakan credit card atau KKP. Tidak sulit ya. Saat ini pembayaran transaksi belanja juga sudah banyak diakomodir online. Jadi saat menggunakan KKP, ya kan sama prinsipnya seperti menggunakan credit card milik pribadi.
Peneliti	:	Karena seperti kartu kredit yang biasa ya pak?
KI-2	:	Ya sebetulnya ya, penggunaannya ya makanya saya sering ketukar tuh pinnya, tidak sulit ya saat ini pembayaran transaksi belanja juga sudah banyak di akomodir di marketplace atau online, jadi saat menggunakan KKP ya kan sama prinsipnya seperti menggunakan credit card milik pribadi sementara untuk CMSPA saya tidak terlibat hanya pernah mengikuti sosialisasinya saja pada prinsipnya saat ini sangat penting ya

		mengikuti perkembangan teknologi agar kita tidak gaptek dan dapat menjalankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.
Peneliti	:	Jadi kalau CMSPA ini bapak tidak langsung terlibat ya kemudian berikutnya pak, apakah bapak mengetahui atau mungkin pernah mengalami kendala atau permasalahan administrasi nih pak dari sisi administrasi terkait pengelolaan KKP atau CMSPA ini pak?
KI-2	:	Secara pribadi saya sih belum pernah hanya sebagai penguji bukti-bukti pembayaran saya pernah beberapa kali menemui kasus kesalahan administrasi seperti misalnya transaksi KKP atas nama si A lalu administrasi petanggung jawabannya dibuat pada si B kasus lainnya nilai yang tercantum pada administrasi petanggung jawabannya dan tidak sesuai dengan nilai pada tagihan KKP yang administrator KKP terima dari pihak bank. kesalahan-kesalahan administrasi seperti ini mungkin terjadi karena berbagai faktor ya tapi yang pasti saya hal seperti ini tentu menghambat proses pencairan hingga pembayaran tagihan kepada pihak Bank.
Peneliti	:	Cukup ini juga ya pak kesalahan administrasinya ya tadi ya kesalahan pembebanan kemudian nilainya juga ya pak tapi sudah bisa ditanggulangi gitu ya pak?
KI-2	:	Selama ini bisa ditanggulangi.
Peneliti	:	Baik pak, lalu berikutnya tentang SOP nih pak apakah bapak mengetahui SOP di bidang keuangan yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM kemudian untuk pengelolaan KKPnya sendiri apakah sudah tersedia pak SOPnya?
KI-2	:	Ya, saya mengetahui beberapa SOP keuangan, SOP pembuatan SPM, SOP rekonsiliasi SPM pembayaran gaji dan tunjangan kinerja. Kalau pengelolaan KKP atau CMS VA sepertinya belum ada. Seingat saya dari tahun lalu sudah ada draftnya di Bagian Keuangan, tapi yang saya ingat mereka sampaikan tahun lalu itu ada launching KKP Domestik, terus memastikan juga penggunaan aplikasi Digipaynya sudah berjalan lancar, baru diterbitkan. Menunggu waktu saja sih sepertinya. Awal tahun depan sih seharusnya sudah ada.
Peneliti	:	Oh malah belum ada ya pak, belum dibuat ya, lalu kalau belum ada dalam pengelolaan KKP atau CMS VA yang telah berjalan selama ini ketentuan apa saja nih pak yang dipedomani oleh bapak dalam melaksanakan pekerjaan?
KI-2	:	Ya dalam mengelola UP KKP atau CMS VA kami berpegang pada berbagai PMK terkait untuk hal-hal detail terkait atur alur kerjanya sendiri saya rasa tetap harus dibuatkan SOP nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kan ada beberapa kesalahan administrasi pertanggungjawaban yang terjadi, terus ada keterlambatan penyampaian juga. Seharusnya kalau ada SOP, dipakai, bisa meminimalisir kejadian-kejadian tersebut.
Peneliti	:	Jadi walaupun saat ini masih berpegang ke PMK saja menurut bapak tetap perlu berarti ya pak yang dibuat SOP ya untuk alur kerja SPM lebih detail begitu ya pak ya baik, lalu apakah keberadaan SOP ini bisa mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA nih pak?
KI-2	:	Keberadaan SOP menurut saya penting ya agar tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas dapat terdokumentasikan bila setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sesuai

		acuan atau pedoman tersebut pengelolaan KKP dan juga CMS VA tentu akan berjalan dengan baik dan akan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi institusi pemerintah.
Peneliti	:	Tadi sangat berpengaruh ya pak bisa lebih baik ya kalau ada SOP nya siapa, lalu kemudian terkait reward and punishment apakah bapak mengetahui nih ya mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP oleh kementerian keuangan pak yang diatur oleh kementerian keuangan?
KI-2	:	Iya pelaksanaan reward and punishment pengelolaan KKP kan sudah tertuang pada PMK terkait namun demikian sejauh ini sepengetahuan saya mekanisme tersebut belum betul-betul ditegakkan saya rasa kesempatan ini justru jangan membuat satker lengah karena merasa aman tidak akan terkena sanksi bila tidak memenuhi target yang telah ditentukan. satker harus tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan KKP maupun CMS VA.
Peneliti	:	Jadi sudah ada sebetulnya di PMK tapi belum terlalu berjalan gitu ya pak dari kementerian keuangan sendiri. nah kalau tadi kan oleh kementerian keuangan pak kalau di internal sendiri di kementerian koperasi dan UKM bapak mungkin mengetahui apakah sudah ada juga pak mekanisme reward and punishmentnya belum.
KI-2	:	Belum ada...belum ada ya seingat saya saat ini pimpinan baru mendorong saja sifatnya kemarin-kemarin juga kami kan masih belajar menyesuaikan diri yang sebelumnya tunai semua lalu dengan adanya kebijakan ini perlahan-lahan mulai beralih ke non-tunai. memang sedang dipertimbangkan juga mengenai mekanisme tersebut dan juga efektivitasnya sekiranya itu diimplementasikan atau dijalankan.
Peneliti	:	Jadi belum ada tapi sedang dipertimbangkan gitu ya pak ya, kemudian pak, nah kira-kira apakah keberadaan tadi mekanisme reward and punishment ini bisa mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA itu pak?
KI-2	:	Kalau melihat situasi di internal kami menurut saya si mekanisme itu bisa membuat perubahannya meskipun pemakaian KKP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi sepertinya harus didorong terus dengan maksimal melalui mekanisme reward and punishment mungkin juga ada individu atau unit sebagai role model yang bisa dijadikan contoh.
Peneliti	:	Bisa juga berarti mempengaruhi kualitas ya pak harusnya kalau mekanisme reward and punishment mungkin jadi pada takut gitu kali ya pak kalau ada sanksi jadi lebih rajin menggunakan KKP ya pak lebih disiplin. lalu pak, berikutnya langkah-langkah apa yang telah dilakukan Satker dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP atau CMS di Kemenkop ini pak?
KI-2	:	secara umum sih pengujian bukti-bukti mekanisme pembayaran yang menggunakan KKP maupun CMS VA ini telah dijalankan seperti halnya mekanisme pembayaran dengan dana tunai namun memang untuk lebih menjaga akuntabilitas pengawasan serta khusus secara khusus perlu dilakukan lebih detail pada penggunaan KKP karena potensi fraudnya masih cukup besar salah satunya jika digunakan untuk kepentingan pribadi.
Peneliti	:	Lalu, ini, bapak pernah melakukan transaksi belanja negara pastinya pak dengan menggunakan KKP?

KI-2	:	Ya saya cukup sering menggunakan KKP untuk keperluan tugas saya
Peneliti	:	Transaksi apa saja yang bapak lakukan dengan menggunakan KKP ini pak?
KI-2	:	Jenis KKP yang saya pegang ini kan untuk keperluan perjalanan dinas ya tentunya untuk beli tiket, untuk bayar hotel
Peneliti	:	Dua itu saja pak?
KI-2	:	Ada juga buat beli bensin juga kadang-kadang kalau memang tidak pakai pesawat atau pakai kendaraan dinas kita bisa memanfaatkan juga untuk beli bensin dan itu sangat membantu banget.
Peneliti	:	Oh gitu pak, beli bensin pakai KKP bisa ya pak? iya oke pak, lalu berikutnya pak apakah transaksi belanja negara yang bapak lakukan tadi beli tiket, pesawat, hotel, juga tadi beli bensin ya pak? itu perlu adanya mesin EDC nggak pak?
KI-2	:	Sebetulnya sih perlu ya tapi saya sendiri sudah agak jarang bertransaksi menggunakan mesin edc kalau beli tiket atau hotel kan sudah dilakukan sebelum saya berangkat ke tempat tujuan beli online saja langsung di travel, transaksi juga langsung pada pakai KKP tanpa harus menggesek kartu di mesinnya.
Peneliti	:	Lalu saat menggunakan mesin EDC apakah menemui hambatan?
KI-2	:	Beberapa kali hanya salah pin saja, tapi setelah dicoba lagi ya langsung bisa, atau terkadang karna sinyal saja yang kurang bagus.
Peneliti	:	Apa yang bapak ketahui tentang tingkat responsivitas pihak bank dalam permintaan kenaikan limit?
KI-2	:	Info dari tim saya sih cukup cepat ya untuk permohonan kenaikan limit, kami menyampaikan permohonan limit ke bagian keuangan lalu diproses lalu sudah bisa naik limitnya
Peneliti	:	Apakah bapak pernah mengalami kendala teknis penggunaan KKP? Bagaimana tingkat responsivitas pihak bank?
KI-2	:	Untuk penggunaan KKP relatif aman saja, tidak ada masalah saat pemesanan tiket atau hotel melalui travel, sejauh ini tidak ada masalah
Peneliti	:	Apakah bapak pernah mengalami kendala teknis penggunaan CMS VA? Bagaimana tingkat responsivitas pihak bank?
KI-2	:	Tidak ada kesulitan yang berarti ya karena memang penggunaannya relatif mudah. PR nya ya memang mengubah mingsdet kita semua. Paling ya itu yg di daerah, ada Satker yg sangat aktif pakai CMS, malah transaksinya lebih banyak dari pusat. Tapi masih banyak juga yang belum pakai. Bank kan bisa cek berkala. Mereka harusnya bisa lebih aktif lagi dekati Satker-Satker di daerah. Adakan sosialisasi, edukasi pengelolanya.
Peneliti	:	Baik yang terakhir pak, apa yang bapak ketahui tentang peran aktif pihak bank dalam menjaga kelancaran pengolaan KKP atau CMS VA selama ini di Kementerian Koperasi dan UKM pak?
KI-2	:	Mitra kami kan BNI ya, BNI sebagai mitra kami cukup berperan aktif dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA. Dari awal kerjasama terkait penerbitan KKP maupun restrukturisasi rekening pengeluaran, saat ada sosialisasi di bank , BNI selalu ikut. Saya pernah terinformasi dari bendahara mengenai masalah keterlambatan pembayaran tagihan KKP atau saat melakukan pengembalian sisa UP CMS di akhir tahun lalu dimana terkendala traffic yang padat. BNI responsif terhadap permasalahan tersebut.

Peneliti	:	Berarti secara garis besar pihak BNI sudah responsif ya pak, baik mungkin saya cukupkan pertanyaannya terima kasih banyak pak Budi atas kesediaannya menjadi responden saya. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.
----------	---	---



POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA

## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Gleger Santoso  
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran  
 Unit Kerja : Deputi Bidang Kewirausahaan  
 Tanggal Wawancara : 18 September 2023  
 Kode Informan : KI-3

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Mas Gleger. Begini mas menyusul surat izin penelitian saya sebelumnya, saya izin perkenalkan diri dulu ya, nama saya Galih Cheria Puspita, saya mahasiswi magister di Politeknik STIA LAN jurusan manajemen keuangan negara. Saat ini saya sedang membuat tesis, sedang melakukan penelitian dengan pembahasan yang diangkat yaitu mengenai penggunaan sistem pembayaran nontunai pada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah dari beberapa telaah dokumen yang saya lakukan beberapa waktu lalu, bahwa penggunaan sistem pembayaran non-tunai di Kementerian Koperasi dan UKM itu ternyata masih relatif rendah ya Mas. Uang persediaannya masih didominasi uang tunai. Lalu pemakaian kartu kredit pemerintah dan CMSVA-nya juga belum optimal ya. Singkat cerita saya tertarik mengangkat tema itu, dan dari beberapa penelitian terdahulu, saya mencoba menggali beberapa faktor yang memang memengaruhi penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga CMSVA tadi pada Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih juga sebelumnya ya Mas Gleger karena sudah berkenan menjadi responden penelitian saya.
		mungkin saya lanjut ke pertanyaan aja ya Mas ya sebentar. Baik yang pertama apa yang Mas Gleger ketahui tentang cashless payment system, kartu kredit pemerintah dan cash management system Mas?
KI-3	:	Oyaa, baik Mba, silahkan...saya jawab semampu yang saya tahu ya Mba...
Peneliti	:	Baik...pertama-tama, apa yang Mas Gleger ketahui tentang cashless payment system, kartu kredit pemerintah dan juga cash management system Mas?
KI-3	:	Cashless payment system berarti non-tunai kan ya bu.. Yang saya ketahui KKP dan Direct Banking BNI sebagai contohnya. Jadi Bendahara sudah tidak lagi mengelola dana UP nya secara tunai, tetapi sejak 2018 lalu sudah mulai diatur ada yang dialihkan menjadi UP KKP. Namanya juga kartu kredit ya, berarti bisa digunakan dulu untuk membeli barang, baru setelah itu kita proses pertanggungjawabannya sehingga Bendahara dapat membayar tagihannya ke BNI. Kalau CMS VA, ya Direct Banking BNI

		itu, kita dapat token untuk bisa kirim dana atas pembelian barang ke rekanan.
Peneliti	:	2018 atau 2019 ya Mas? Yang saya sempat baca itu di 2019 ya Mas.
KI-3	:	Oh iya Mba...2019 maksudnya. Saya belum jadi Bendahara sih waktu itu. Hehe.Maaf saya lupa Mba...
Peneliti	:	Gapapa Mas. Itu juga karena ada dokumen PKS yang saya lihat. Jadi prinsipnya KKP itu ya kartu kredit, lalu CMS VA, yg direct banking itu ya seperti internet banking ya.
KI-3	:	Iya Mba betul seperti itu.
Peneliti	:	Ok mas. Lalu Mas Gleger merasakan manfaat apa saja nih dari KKP atau CMS VA ini?
KI-3	:	Kalau menurut saya nih ya Mba, dengn adanya KKP ini Bendahara dapat kemudahan ya untuk kelola uang persediannya. Kalau dulu kan bendahara harus tarik tunai dari bank, nah sekarang ada sebagian yang dialihkan melalui pembayaran non-tunai , jadi ya tarik tunainya juga lebih sedikit, tidak perlu booking untuk proses penarikan itu. Risiko kehilangan juga berkurang, kami kan khawatir juga kalau uang banyak ditaruh di brankas Bendahara, ya khawatir saa hilang. Apalagi yang tanggung jawab kan Bendahara pribadi.
Peneliti	:	Oo ok. Itu manfaat KKP yang Mas Gleger rasakan ya. Kalau CMS mas?
KI-3	:	Sementara sejak ada fitur CMS VA, saya bayar pajak pakai itu. Jadi walaupun saya masih tarik tunai dari Bank, untuk dana pajaknya tidak saya tarik juga, dibiarkan tetap di rekening saja. Pembayaran pajaknya saya lakukan pakai direct banking BNI itu. Yang pasti pengaruh ke nilai penarikan tunai yang biasa saya lakukan ya. Lebih aman kan. History pembayaran pajak per transaksi juga terekam ya. Jadi sewaktu-waktu ada vendor yang minta bukti setor pajak, saya lebih mudah mencarinya
Peneliti	:	Kendala/hambatan apa saja yang sering ditemui dalam implementasi KKP/CMS VA?
KI-3	:	Terkait adanya permintaan kenaikan limit KKP dari pengguna, pihak Bank relatif cepat merespon hal tersebut. Nah tapi nih saya baru dapat info baru, kalau ternyata sesuai PMK tuh harusnya permintaan kenaikan limit KKP itu diketahui/ditetujui oleh KPA. Sampai saat ini kami belum proses itu ya, karena permintaan kenaikan limit di lapangan juga lumayan, sementara tenaga SDM yang memproses ini memegang beberapa penugasan, dan saat itu kenaikan limit sudah selesai diproses Bank. Kalau CMS VA, terkadang hanya terkendala di koneksi jaringan internet saja. Kenaikan limit KKP ini juga seharusnya ada pengaturannya, ada SOP nya, supaya tetap berjalan sesuai ketentuan.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Satker dengan pihak Bank terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-3	:	Pimpinan mengawali penggunaan KKP di Satker kami melalui kerjasama dengan BNI, yang hingga saat ini berjalan dengan baik. Menyesuaikan kebutuhan di lapangan, saat ini di Deputy Kewirausahaan memiliki KKP perdin sebanyak 7 kartu (6 kartu digunakan oleh masing-masing Asisten Deputy dan 1 kartu untuk Kepala Sub Bagian Umum) serta untuk KKP operasional sebanyak 1 kartu yang digunakan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
Peneliti	:	Bagaimana bentuk dorongan Satker terhadap penggunaan KKP atau CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja?



KI-3	:	Hingga saat ini belum ada himbauan apalagi yang sifatnya kewajiban yaa.. Itu salah satu yang menyebabkan realisasi KKP Satker kami masih relatif kecil mba. Seharusnya kan ada concern dari pimpinan. Bahkan disini ada Asisten Deputi (Eselon II) yang sama sekali belum pernah menggunakan KKP nya. Sebagian besar unit pelaksana kegiatan masih lebih memilih dana tunai, melalui TUP untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk untuk belanja operasional kantor maupun perjalanan dinas.
Peneliti	:	Bagaimana penyelenggaraan kegiatan Sosialiasi atau Bimbingan Teknis terkait pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Bapak?
KI-3	:	Kami mengikuti sosialiasi KKP maupun CMS VA yang dilakukan baik oleh KPPN maupun Sekretariat (Unit Eselon I). Kadang-kadang kami juga mengakses laman youtube untuk mencari update informasi mengenai keduanya. Sementara di Satker kami sendiri, Deputi Kewirausahaan, belum pernah mendorong pelaksanaan sosialiasi internal untuk mengenalkan lebih lanjut mengenai pentingnya pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai ini kepada para pegawai. Mungkin karena tidak mendengarnya secara langsung, banyak pegawai masih abai dan cenderung menghindari penggunaan KKP.
Peneliti	:	Bagaimana aktivitas Pengawasan, Monitoring serta Evaluasi terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-3	:	Tidak ada pengawasan internal yang dilakukan secara khusus. Selaku Bendahara kami hanya menerima tagihan sesuai pengajuan dari masing-masing unit dan membayarkannya sesuai berkas tagihan tersebut. Terkait adanya KKP yang belum digunakan tadi, sepertinya jika ada pengawasan yang lebih ketat dari pimpinan, dapat mendorong pegawai untuk menggunakan KKP.
Peneliti	:	Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Bapak?
KI-3	:	Kalau untuk KKP, saya sebagai Bendahara juga berperan sebagai administrator KKP, yang nantinya juga bertugas melakukan pembayaran atas tagihan KKP>. Sedangkan untuk CMS VA yang terlibat yaitu admin (yang menerbitkan billing sementara), maker (yang membuat tagihan di BNI Direct), serta approver (yang menyetujui pembayaran tagihan GUP KKP).
Peneliti	:	Bagaimana pemberian tugas bagi pegawai yang mengelola KKP atau CMS VA di dalam unit Bapak selama ini?
KI-3	:	Ada, seperti saya tadi contohnya. Bendahara merangkap sebagai administrator KKP. Personil yang lain saya kurang paham. Sementara ini karena transaksi yang menggunakan KKP belum terlalu banyak, sehingga masih bisa saya pegang, masih lancar dan tidak menemui kendala berarti.
Peneliti	:	Aturan/regulasi apa yang Bapak pedomani dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-3	:	Saya mengetahui penggunaan KKP hanya bisa digunakan untuk perjalanan dinas ataupun operasional kantor. Besaran limit yang diberikan untuk UP KKP yaitu 40% dari total alokasi UP. Untuk aturan lainnya masih sambil saya pelajari.
Peneliti	:	Bagaimana penggunaan KKP atau CMS VA yang Bapak lakukan selama ini?
KI-3	:	Saya pribadi belum pernah menggunakan KKP. Tapi untuk penggunaannya kan sama seperti kartu kredit biasa ya. Yang saya tahu,

		penggunaan KKP dapat digunakan untuk pembelian tiket, pembayaran hotel, pembayaran grab, blue bird, pembelian ATK, juga pembayaran servis kendaraan dinas kepada vendor-vendor yang memiliki alat EDC.
Peneliti	:	Kendala/permasalahan administrasi apa saja yang pernah Bapak temui dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-3	:	Sampai saat ini saya masih menemui kesalahan administrasi. Pengguna KKP menggunakan KKP untuk belanja keperluan perkantoran, tapi tagihan yang masuk ke tim keuangan berupa pertanggungjawaban biasa (GUP Tunai, bukan tagihan GUP KKP). Tetapi ini sudah terlanjur diproses dengan GUP Tunai hingga pencairan. Perihal ini saya baru terinfokan belakangan dari pembuat administrasinya.
Peneliti	:	Sebutkan berbagai SOP dalam bidang keuangan yang telah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM? Bagaimanakah penerapan SOP Pengelolaan KKP dan CMS VA?
KI-3	:	Beberapa SOP yang kami pakai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seperti SOP SPM LS, SOP SPM UP TUP, SPM Verifikasi, dan SPM Penyusunan Laporan Keuangan. Sementara untuk pengelolaan KKP maupun CMS VA, hmm...seingat saya sih belum ada sosialisasi mengenai SOP itu dari Biro Umum dan Keuangan. Sepertinya belum ada
Peneliti	:	Dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA yang telah berjalan selama ini, ketentuan apa saja yang dipedomani oleh Bapak dalam melaksanakan pekerjaan?
KI-3	:	Kami pakai PMK 196 untuk mengelola KKP dan PMK 183 untuk CMS VA. Bahan ajar hasil mengikuti sosialisasi juga sering kami pakai sebagai pegangan.
Peneliti	:	Bagaimanakah penerapan SOP dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-3	:	Menurut saya bisa berpengaruh ya, karena di dalam SOP kan mengatur tahapan pekerjaan yang harus dilakukan, siapa yang bertanggungjawab, dan lama waktu pengerjaan. Jika SOP dijadikan panduan, maka pengelolaan KKP juga CMS VA nya akan menghasilkan kinerja yang baik. Contohnya saat bayar tagihan. Ternyata pembayaran tagihan KKP itu ada waktunya ya. Saya tahunya dua bulan belakangan ini. Saya kira seperti bayar pajak, yang penting dibayarkan selambatnya akhir bulan, ternyata maksimal dua hari kerja sejak SP2D terbit.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMS VA yang diatur oleh Kementerian Keuangan?
KI-3	:	Sampai saat ini belum ada sanksi yang kami terima, tapi sesuai arahan bu Isti KPPN beberapa hari lalu akan ada sanksi yang diberikan berupa SP1 (Surat Peringatan) dan bila sudah di SP1 tetapi masih tetap seperti itu akan ada sanksi berupa penghentian UP Tunainya.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment internal dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-3	:	Sepengetahuan saya belum ada ya mekanisme internalnya untuk mengatur reward and punishmentnya.
Peneliti	:	Bagaimana penerapan mekanisme reward and punishment dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?

KI-3	:	Dengan adanya mekanisme reward and punishment itu, orang-orang pasti akan lebih disiplin menggunakan KKP ataupun CMS VA nya. Mereka akan khawatir terkena sanksi, atau bila KKP nya tidak digunakan terus-menerus, KPA dapat memutuskan untuk menarik KKP tersebut. Dan mungkin para pemegang KKP akan takut bila KKP nya ditarik dan jadi tergerak untuk pakai.
Peneliti	:	Upaya apa saja yang telah dilakukan Satker dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP atau CMS VA di Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-3	:	Di Satker kami, untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP, kami mencoba selalu mengingatkan pegawai yang menggunakan KKP untuk tidak memakainya bagi kepenringan pribadi. Kami juga membuat catatan pemakaian KKP per pengguna, per bulan, untuk dilaporkan kepada atasan langsung.
Peneliti	:	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan transaksi belanja negara menggunakan KKP?
KI-3	:	Secara pribadi belum pernah menggunakan KKP
Peneliti	:	Transaksi belanja negara apakah yang Bapak lakukan dengan menggunakan KKP?
KI-3	:	Tidak ada, karena tidak pernah menggunakan KKP.
Peneliti	:	Apakah transaksi belanja negara yang Bapak lakukan dengan KKP memerlukan ketersediaan mesin EDC?
KI-3	:	Saya kurang paham karena tidak pernah terlibat langsung dalam proses transaksi nya.
Peneliti	:	Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-3	:	Berdasarkan info dari Administrator, pihak bank memproses kenaikan limit sementara dalam hitungan jam.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah Bapak temui saat menggunakan KKP? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?
KI-3	:	Cukup baik lah. Salah satu pengalaman kami, terdapat satu transaksi ditagihkan dua kali di bulan yang berbeda. Misalnya transaksi yang sudah ditagihkan di bulan Januari dan telah dibayarkan, tetapi kemudian di bulan Maret muncul kembali tagihan tersebut. Proses penyelesaiannya harus lewat proses investigasi oleh pihak bank dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Ya tapi mereka tetap berupaya bantu menyelesaikanya supaya semuanya kembali lancar.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah Bapak temui saat menggunakan CMS VA? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?
KI-3	:	Sejauh ini saya tidak pernah mengalami kendala saat penggunaan CMS.
Peneliti	:	Bagaimana peran dari pihak Bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMS VA selama ini?
KI-3	:	Yang saya ceritakan tadi terkait masalah KKP yang kami hadapi. Itu untung saja dari awal mereka merespon dengan baik, kemudian mengawal hingga kasusnya tuntas meskipun saat itu agak lama ya prosesnya
Peneliti	:	Baik, terimakasih ya atas waktunya mas Gleger. Selamat siang.

## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Neiky Amanati  
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran  
 Unit Kerja : Deputi Bidang Perkoperasian  
 Tanggal Wawancara : 18 September 2023  
 Kode Informan : KI-4

Peneliti	:	<p>Assalamualaikum Wr. Wb mba Neiky. Selamat pagi mba. Begini, menyusul surat izin penelitian saya sebelumnya, saya izin perkenalkan diri dulu ya, nama saya Galih Cheria Puspita, saya mahasiswi magister di Politeknik STIA LAN jurusan manajemen keuangan negara. Saat ini saya sedang membuat tesis, sedang melakukan penelitian dengan pembahasan yang diangkat yaitu mengenai penggunaan sistem pembayaran nontunai pada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah dari beberapa telaah dokumen yang saya lakukan beberapa waktu lalu, bahwa penggunaan sistem pembayaran non-tunai di Kementerian Koperasi dan UKM itu ternyata masih relatif rendah.. Uang persediaannya masih didominasi uang tunai. Lalu pemakaian kartu kredit pemerintah dan CMSVA-nya juga belum optimal ya. Dari situ saya tertarik mengangkat tema itu, dan dari beberapa penelitian terdahulu, saya mencoba menggali beberapa faktor yang memang memengaruhi penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga CMSVA tadi pada Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih juga sebelumnya mba Neiky karena sudah berkenan menjadi responden penelitian saya.</p> <p>Saya coba lanjut ke pertanyaan aja ya Mba. Bagaimanakah penerapan Cashless Payment System, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA) di tempat Mba Neiky?</p>
KI-4	:	<p>Iya mba, dulu 2019 saya sempat ikut acara rapat di KPPN Jakarta VI. Sosialisasi KKP. Saya diajak Bendahara saat itu. Bagus sih ya dengan sistem non-tunai begitu, menurut saya akan lebih efisien dan efektif pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara. Pegawai bisa menggunakan KKP saat melakukan perjalanan dinas, tidak perlu lagi repot mengajukan uang muka. Tinggal pesan di travel, atau gesek kartu saja saat tiba di hotel tujuan. Kalau untuk CMS VA, yang saya pahami juga memang salah satu bentuk penerapan non-tunai juga. Kami bisa melakukan pembayaran langsung kepada pihak yang berhak menerima.</p>
Peneliti	:	<p>Manfaat/keuntungan apa saja yang diperoleh dari implementasi KKP/CMS VA?</p>
KI-4	:	<p>Sejak ada UP KKP, otomatis hal tersebut membuat UP Tunai yang kami kel.ola menjadi berkurang. Jumlah penarikan uang dari bank pun</p>

		berkurang. Untung saja BNI ada di lingkungan kantor kami, sehingga meskipun kami masih harus menarik dana tunai, InsyaAllah masih relatif aman. Saya harap penggunaan KKP kedepannya bisa terus ditingkatkan. Sementara untuk CMS VA, saya bisa mengakses laporan transaksi secara real time, sewaktu-waktu jika diperlukan.
Peneliti	:	Kendala/hambatan apa saja yang sering ditemui dalam implementasi KKP/CMS VA?
KI-4	:	Beberapa kali kami menemukan adanya penggunaan KKP diluar belanja yang dapat dibebankan pada APBN. Digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk penyelesaian tagihannya pun agak cukup memakan waktu, meskipun sudah beberapa kali kami ingatkan. KKP kami juga pernah di-hack. Ada pembelanjaan dari luar negeri padahal itu bukan kami. Hmm. jadinya semakin berisiko ya. Kedepannya juga perlu sih aturan/tata tertib penggunaan KKP ini lebih ditegakkan. Jika ada pelanggaran, perlu ada punishment. Untuk CMS VA, apa ya, seingat saya sekitar 1 tahun yang lalu masih bisa download history transaksi untuk periode 1 tahun kebelakang. Tapi saat ini hanya tersedia untuk 3 bulan ke belakang saja.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Satker dengan pihak Bank terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-4	:	Iya mba...seperti Satker lainnya, pimpinan kami pun beberapa tahun lalu sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Bank untuk penerbitan KKP. Kalau perjanjian CMS VA, sepengetahuan saya ini berhubungan dengan pengelolaan rekening yang sejak 2-3 tahun lalu kalau tidak salah rekening giro berubah menjadi rekening virtual. Nah CMS VA itu salah satu fasilitasnya, yang digunakan untuk mentransfer dana. Tentu kerjasama ini sangat membantu dalam hal transaksi non-tunai. Pihak Bank selalu berupaya memberikan layanan yang baik, sesuai yang dibutuhkan oleh Satker.
Peneliti	:	Bagaimana bentuk dorongan Satker terhadap penggunaan KKP atau CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja?
KI-4	:	Kalau aturan mewajibkan seperti itu belum ada ya di internal Satker kami. Dari kami saja pengelola keuangan, misalnya saat beraktivitas sehari-hari dan sedang membahas tugas perjalanan dinas, kita sampaikan kalau sekarang sebaiknya sudah menggunakan KKP karena sudah terpantau oleh Kemenkeu dan kan sudah difasilitasi juga. Tapi rata-rata masih menganggap enteng ya. Merasa ribet bila ada hal-hal baru. Seingat saya ada surat dari Pak Sesmen saja yang menghimbau untuk mengoptimalkan penggunaan KKP, tapi itu juga sifatnya general saja terkait koordinasi pelaksanaan anggaran.
Peneliti	:	Bagaimana penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi atau Bimbingan Teknis terkait pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Mba Neiky?
KI-4	:	Deputi Perkoperasian belum pernah mengadakan sosialisasi khusus yang membahas KKP. Biasanya Sekretariat yang melaksanakan, Kami diundang hadir disana. Nah biasanya kan yang hadir pengelolanya, tidak seluruh pegawai ya, sementara pengguna KKP ini kan pegawai. Sehingga esensi dari pemanfaatan KKP tetap belum banyak diketahui pegawai.
Peneliti	:	Bagaimana aktivitas Pengawasan, Monitoring serta Evaluasi terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?

KI-4	:	Satker kami baru sebatas melakukan monitoring dalam hal transaksi yang dilakukan menggunakan KKP, namun belum sampai dilakukan evaluasi terkait dengan target dan realisasi transaksi. Mungkin jika ada hasil evaluasi dan juga realisasinya diawasi ketat pimpinan, bisa jadi pegawai akan menggunakan KKP, toh nantinya mereka sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Kalau CMS VA, saya baru tahu belakangan dari CSO KPPN, saat kami konsul kendala CMS, ternyata harus ada SPPR ya, saya kira SPPR itu hanya untuk penarikan dana di teller saja. Jadi selama ini untuk transaksi CMS belum ada SPPRnya.
Peneliti	:	Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Mba Neiky?
KI-4	:	Kalau di unit Kedeputan kami, yang terlibat ada Bendahara dan beberapa pegawai yang ditugaskan sebagai penghubung Bendahara di setiap unit eselon II untuk monitoring tagihan KKP dan juga pembayarannya. Saya sendiri merangkap sebagai administrator KKP. CMS VA kan memang saya juga yang proses bayarnya.
Peneliti	:	Bagaimana pemberian tugas bagi pegawai yang mengelola KKP atau CMS VA di dalam unit mba Neiky selama ini?
KI-4	:	Saat ini beban kerja terkait dengan transaksi non-tunai belum terlalu berat mengingat belum banyak transaksi non-tunai yang masuk ke kami. Sebenarnya dari sisi beban kerja tidak terlalu rumit ya, hanya saja jumlah SDM yang mengelola KKP atau CMS VA ini kan masih terbatas, yang memang masih terbatas di tim keuangan. Dengan keterbatasan ini tampaknya belum dapat dilakukan pengawasan terhadap penggunaan KKP yang telah beredar atau CMS VA secara optimal.
Peneliti	:	Aturan/regulasi apa yang Mba Neiky pedomani dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-4	:	Saya cukup memahami regulasi/peraturan terkait penggunaan KKP atau CMS VA, diantaranya mengenai tanggung jawab dan tugas pihak-pihak yang terlibat dalam keduanya. Bahwa limit UP KKP sebesar 40% dari total UP yang dikelola Satker. Lalu penggunaan KKP harus sesuai dengan peruntukannya.
Peneliti	:	Bagaimana penggunaan KKP atau CMS VA yang dilakukan selama ini?
KI-4	:	Saya cukup memahami secara teknis penggunaan KKP atau pun CMS VA. Panduan penggunaan KKP atau CMS VA juga dapat dipelajari dari Petunjuk Teknis Penggunaan KKP atau CMS VA yang tentunya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Tapi tetap ya, meskipun ada panduan, harus didukung oleh SDM yang mengerti teknologi demi kelancaran penerapan transaksi non-tunai.
Peneliti	:	Kendala/permasalahan administrasi apa saja yang pernah mba Neiky temui dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-4	:	Sejujurnya limit KKP yang beredar saat ini secara total melebihi dari nilai UP KKP nya. Memang kkp perkoperasian total limitnya diatas 200jt, ini akan dirapikan dengan menurunkan limit untuk kartu yg tidak pernah dipakai (an.pak Ruli & pak Ari Gunawan). Sebetulnya kami punya sih data limit per KKP, tetapi saat pengajuan yang terakhir, kami terlewat. Dan agak kaget juga sih, ternyata Bank juga proses ya meskipun kami melampirkan surat persetujuan UP dari KPPN.

Peneliti	:	Sebutkan berbagai SOP dalam bidang keuangan yang telah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM? Bagaimanakah penerapan SOP Pengelolaan KKP dan CMS VA?
KI-4	:	Sebagai Bendahara, saya mempedomani SOP untuk membuat SPM UP TUP, SPM LS, menyusun Laporan Keuangan. Lalu kalau untuk mengelola KKP, mengelola CMS VA, sepanjang yang saya tahu belum tersedia.
Peneliti	:	Dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA yang telah berjalan selama ini, ketentuan apa saja yang dipedomani oleh mba Neiky dalam melaksanakan pekerjaan?
KI-4	:	Pengelolaan/penggunaan KKP atau CMS VA kami lakukan berdasarkan peraturan yang berlaku saja. PMK-PMK. Selain itu juga petunjuk teknis dari Bank.
Peneliti	:	Bagaimanakah penerapan SOP dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-4	:	Dalam mengelola KKP, misalnya nih, kita kan harus bisa membayar sejumlah tagihan KKP sebesar nilai tertentu dalam periode tertentu. Dengan adanya SOP, alur pekerjaan diatur secara lebih detil, termasuk estimasi waktu mengerjakannya. Jadi ya penting untuk dipedomani agar pengelolaannya bisa lancar dan tidak terkendala.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMS VA yang diatur oleh Kementerian Keuangan?
KI-4	:	Saat ini reward dan punishment belum diterapkan sih ya sepertinya. Pemakaian KKP maupun CMS VA di Deputi kami kan masih belum optimal, masih rendah lah, tapi ya syukur sih belum ada surat teguran datang ke kami.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment internal dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-4	:	Belum ada sih di Deputi kami, belum ada pengaturan mekanisme reward and punishment internal penggunaan KKP atau CMS VA. Seingat saya di tingkat kementerian juga belum ada.
Peneliti	:	Bagaimana penerapan mekanisme reward and punishment dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-4	:	Hmmm menurut saya sih bisa signifikan mendorong penggunaan KKP dan CMS VA nya ya bila memang pimpinan mau menerapkan itu. Terkadang untuk bisa menerima suatu perubahan, ya perlu lah diadakan 'pemaksaan'. Perlu sih menurut saya ada mekanisme reward and punishment ini.
Peneliti	:	Upaya apa saja yang telah dilakukan Satker dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP atau CMS VA di Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-4	:	Sejauh ini pengelolaan KKP dan CMS VA di tempat kami berjalan seperti pengelolaan UP Tunai saja sih. Para pemegang KKP menggunakan KKP nya sesuai kebutuhan, lalu mengajukan pertanggungjawabannya ke kami, kemudian PPK, PPSPM dan Bendahara melakukan pengujian dan pengecekan berkas, mengajukan SPM ke KPPN, pencairan hingga pembayaran tagihan. Dari data billing statement yang kami terima dari Bank, paling kami buat excelnya saja ya,

		untuk memantau tagihan mana yang sudah masuk berkasnya, sudah bisa dilunasi berapa, nilai outstanding berapa ya itu harus clear hitungannya.
Peneliti	:	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan transaksi belanja negara menggunakan KKP?
KI-4	:	Kalau dengan KKP sih belum ya. Saya sebagai administrator, tidak memegang KKP. Tetapi pernah bantu mentransaksikan belanja dari KKP operasional.
Peneliti	:	Transaksi belanja negara apakah yang mba Neiky lakukan dengan menggunakan KKP?
KI-4	:	Saya bantu belikan snack rapat melalui aplikasi Digipay.
Peneliti	:	Apakah transaksi belanja negara yang mba Neiky lakukan dengan KKP memerlukan ketersediaan mesin EDC?
KI-4	:	Tidak sih, karena langsung bertransaksi di aplikasi Digipay tadi. Walaupun pembayarannya menggunakan KKP, tetapi tidak perlu lagi menggunakan mesin EDC.
Peneliti	:	Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-4	:	Selaku administrator KKP, menurut saya pihak Bank sangat responsif dalam memenuhi permohonan kenaikan limit KKP Satker.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah mba Neiky temui saat menggunakan KKP? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?
KI-4	:	Contoh masalah KKP, seperti yang pernah dialami pimpinan saya mba, saat tugas keluar kota, beli bensin di area tol. Saat kartu digesek, sempat masalah, kemungkinan karena jaringan ya sampai akhirnya 2 kali digesek. Belakangan diketahui ada 2 transaksi yang sama terjadi. Kami adukan ke bank, mereka merespon dan bantu menyelesaikannya dalam waktu sekitar hampir 1 bulan. Lalu KKP kami juga pernah di-hack, ada transaksi di luar negeri. Kami lapor ke BNI. Mereka respon sih, bilang kalau akan dicek dulu. Tapi setelah itu kami yang harus aktif tanya bagaimana progressnya. Setelah sebulan lah, baru clear masalahnya, Transaksi mencurigakan itu sudah dihapus dari tagihan kami.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah Mba Neiky temui saat menggunakan CMS VA? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?
KI-4	:	Kalau penggunaan CMS VA, Alhamdulillah saya belum pernah ya. Tapi mungkin bila terjadi masalah, pihak bank tentu akan merespon dengan baik dan cepat juga.
Peneliti	:	Bagaimana peran dari pihak Bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMS VA selama ini?
KI-4	:	Kelancaran pengelolaan KKP juga CMS VA tentu tidak lepas dari peran serta Bank didalamnya ya mba. Kalau saya sih, dengan mereka memberika respon yang cepat dan tentunya baik dengan berbagai jalan keluar terutama jika kita ada masalah, ya itu menunjukkan kalau mereka sudah berperan aktif.
Peneliti	:	Baik mba Neiky, terimakasih banyak atas informasinya ya.



## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Septia Helmi  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran  
Unit Kerja : Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah  
Tanggal Wawancara : 20 September 2023  
Kode Informan : KI-5

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Mbak Septi Baik Mbak ini menyusul surat izin penelitian saya sebelumnya saya mungkin izin perkenalkan diri dulu ya sebentar ya jadi nama saya Galih Cheria Puspita, saya mahasiswi magister di Politeknik STIA LAN Mbak jurusan manajemen keuangan negara nah saat ini memang saya sedang membuat tesis sedang melakukan penelitian dan pembahasannya adalah mengenai penggunaan sistem pembayaran nontunai atau cashless payment system pada kementerian koperasi dan UKM, nah memang dari beberapa apa telah dokumen yang saya lakukan juga informasi yang saya peroleh gitu ya ternyata memang ini jadi penggunaan sistem pembayaran nontunai di kementerian koperasi dan UKM itu ternyata masih relatif rendah Mbak dan mungkin beberapa indikatornya yang bisa saya sampaikan ternyata pengelolaan uang persediaan itu masih didominasi uang tunai kemudian pengelolaan kartu kredit pemerintahnya sendiri juga CMSVA-nya ya itu juga masih rendah juga belum optimal saya ceritanya tertarik mengangkat tema itu, jadi dari beberapa penelitian terdahulu sebelumnya saya mencoba menggali beberapa faktor yang memang mempengaruhi penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga CMSVA tadi di kementerian koperasi dan UKM nah ini terima kasih juga sebelumnya Mbak Septi sudah bersedia menjadi responden penelitian saya mungkin saya lanjut ke pertanyaan aja ya Mbak ya sebentar. Baik yang pertama apa yang Mbak Septi ketahui tentang cashless payment system, kartu kredit pemerintah dan cash management system Mbak?
KI-5	:	Baik Mbak. yang saya ketahui tentang cashless payment system ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengelola kas negara dengan baik. KKP dan CMS merupakan wujud dari sistem pembayaran non tunai di 2019 lalu kami mendapat KKP. oke juga sih Mbak jadi seperti di swasta kita bisa beli barang dengan KKP tersebut untuk mengurangi dana tunai yang harus ditarik dari bank tapi sampai sekarang pemakaiannya belum terlalu optimal ada beberapa KKP yang belum digunakan sama sekali oleh pemegangnya untuk CMS sendiri kami masih sedikit memanfaatkannya jadi masih banyak pelaksana kegiatan yang inginnya menarik dana secara tunai.

Peneliti	:	baik berarti agak sesuai ya Mbak sama yang tadi data-data yang saya peroleh juga menunjukkan memang penggunaannya memang masih relatif rendah ya Mbak Septi di satkernya juga berarti masih seperti itu ya?
KI-5	:	Iya Mbak
Peneliti	:	Oke baik mungkin selanjutnya ya kalau terkait penggunaan KKP dan CMS itu sendiri Mbak Septi merasakan langsung tidak manfaatnya atau mungkin mengetahui atau ya mungkin merasakan langsung itu ada manfaat apa saja dari KKP atau CMS ini?
KI-5	:	Baik Mbak, kalau untuk penggunaan KKP kami merasakan betul manfaatnya untuk permintaan uang muka dari pelaksanaan perjadi menjadi relatif berkurang sehingga kami juga tidak terlalu pusing menghadapi permintaan uang muka tersebut karena nilai up tunai yang dikelola juga relatif tidak banyak jadi semakin banyak permintaan uang muka dapat mengganggu revolving upay tunai satkar untuk memenuhi kebutuhan perjadi pegawai bisa langsung memasang tiket atau hotel melalui travel dengan mekanisme pembayaran menggunakan KKP jadi bermanfaat betul penggunaan KKP.
Peneliti	:	Berarti tadi yang perlu betul digaris bawah itu bisa mengakomodir apa yang tadinya banyak dana tunai dibutuhkan jadi tidak perlu sebanyak waktu dulu ya Mbak ya bisa terakomodir oleh KKP ini ya beli tiket terus pesan hotel begitu ya, manfaatnya banyak juga ya Mbak ya. kalau kendala atau hambatan yang mungkin Mbak Septi tahu atau bahkan rasakan secara langsung mungkin dalam implementasi KKP atau CMSVI ini ada Mbak?
KI-5	:	Karena menyesuaikan batasan limit KKP dengan nilai UP KKP, limit per KKP biasanya kecil, sehingga sering kali agar tercukupi saat digunakan, permintaan kenaikan limit sementara harus dilakukan. Semakin banyak KKP yang beredar, permintaan kenaikan limit akan semakin banyak, dan tidak jarang permintaannya diluar jam kerja. Nah ini yang biasanya lama, baru terproses besoknya. Beberapa kali terkendala, administrator KKP misalnya sedang di jalan pulang, atau sedang rapat. Atau di sisi lain, dari pihak Bank juga jika sudah diluar jam kerja juga cenderung slow respon. Baru akan dijawab keesokan paginya. Nah ini biasanya menjadi kendala yang sering ditemui dalam menggunakan KKP. Soal SPJ juga ya. Kalau perjalanan dinas pakai KKP, berarti kan beli tiket atau bayar hotelnya pakai KKP, sementara disini uang harian diproses pakai LS Bendahara. Administrasinya jadi double. Tenaga admin nih yang ngeluh karena mereka merasa beban pekerjaannya jadi bertambah.
Peneliti	:	Oh di tempat Mbak berarti masalah utamanya itu limit KKP itu ya? karena tidak besar terus kemudian penggunaanya butuh harus mengajukan kenaikan limit begitu ya Mbak. Cuma tadi ada masalah administrator yang sulit dihubungi jadi terkendala belum bisa digunakan baik selanjutnya Mbak apa yang Mbak Septi ketahui tentang perjanjian kerjasama antara Satker dengan pihak bank terkait pengelolaan KKP atau CMSVA ini Mbak?
KI-5	:	Selama ini kerjasama pengelolaan KKP yang sudah berjalan antara Satker kami, Deputi UKM, dengan BNI cukup baik mbak. Kalau ada kendala dalam mengakses VA atau dalam penggunaan KKP, komunikasi bisa dilakukan cukup via WA dengan masing-masing PIC nya.

	Permasalahan/ permohonan kami juga pasti dijawab, walau kadang mungkin responnya agak lama. Sejauh ini belum ada update/addendum kerjasama. Faktanya penggunaan KKP di Satker kami belum optimal. CMS VA juga baru digunakan untuk pembayaran tagihan kartu kredit saja, mbak. Untuk pembayaran pajak masih kami lakukan secara manual lewat teller. Kalau untuk bayar ke penyedia hanya pernah beberapa kali saja, jarang sekali. Itu juga yang rekeningnya pakai BNI. Karena kalau beda, ada biaya transfer. Agak repot karena perlu waktu untuk komunikasi dulu ke merkanya. BNI juga seharusnya lebih aktif ya mengedukasi kita selaku pengguna layanan mereka.
Peneliti	: Tadi itu kerjasamanya waktu Mbak Septi disebutkan di awal tadi dari 2019 juga ya Mbak ya? Deputi UKM ya? mana saya terinfo dari PPK sekretariat ya kalau nggak salah juga sama 2019 mungkin bersamaan kayaknya ya seluruh Satker ya Mbak ya? di 2019, baik kemudian Mbak di Satker tadi Deputi UKM ya Mbak Septi Deputi UKM atau mungkin di Kementerian Koperasi dan UKM itu ada himbauan atau aturan dari pimpinan nggak Mbak yang mewajibkan penggunaan KKP atau CMSVA ini dalam mekanisme pembayaran belanja
KI-5	: Untuk saat ini sih belum ada himbauan dari pimpinan terkait penggunaan KKP Mbak bahkan ada pimpinan yang memiliki KKP namun jarang atau bahkan belum pernah digunakan sama sekali dan ada juga pemegang KKP yang perjalanan dinAS menggunakan KKP nya untuk keperluan di luar itu jadi tidak sesuai walaupun nanti tagihannya tetap dibayar secara mandiri ke telerbank mengingat penggunaan KKP belum optimal seharusnya pimpinan tertinggi mewajibkan. jadi pimpinan tinggi harusnya memberikan contoh agar semua pegawai mau menggunakan KKP berikut juga untuk CMS nya memang perlu ada arahan atau edaran dari pemimpin juga supaya para pelaksana kegiatan tidak berkeberatan jika pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
Peneliti	: Jadi belum ada gitu ya Mbak ya kewajiban untuk menggunakan KKP maupun CMS di satker di deputi UKM juga tidak ada, di tingkat kementerian juga tidak ada ya, belum ada kewajiban ya.
KI-5	: Iya, belum Mbak.
Peneliti	: Baik, baik, lalu Mbak, di deputi UKM nih, satker apakah pernah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau Bimtek terkait pengolahan KKP atau CMS VA ini?
KI-5	: Belum pernah sih Mbak dilakukan sosialisasi atau Bimtek ini, kami juga dapat dari bagian keuangan di lantai 7 saja saat saya menghadap pimpinan untuk keperluan pembuatan KKP beliau, saya pernah menyampaikan situasinya tetapi belum terlalu serius respon dari beliau jadi selama ini masih mengikuti bagaimana di unit eselon 1 saja.
Peneliti	: Jadi belum pernah mengadakan sama sekali ya sosialisasi gitu ya?
KI-5	: Belum Mbak
Peneliti	: Mengikutinya yang dilaksanakan di unit eselon 1 bagian keuangan itu, satker apa tuh Mbak?
KI-5	: Satker sekretariat kementerian
Peneliti	: Kalau deputi UKM sendiri tadi belum ya, belum melakukan ya?
KI-5	: Iya Mbak

Peneliti	:	Lalu berikutnya Mbak kalau tadi sosialisasi kalau aktivitas pengawasan atau monev terkait pengolahan KKP atau CSPE ini deputi UKM sudah melakukan belum Mbak?
KI-5	:	Untuk pengawasan secara menyeluruh belum pernah kami lakukan. Selaku Bendahara, saya melakukan pemantauan saat ada saat billing KKP dari Bank. Dari tagihan tersebut, saya bisa memperoleh informasi mengenai tagihan yang belum dibayar dan berkas pertanggungjawabannya pun belum masuk ke tim kami. Ada transaksi yang menggunakan KKP namun SPJ yang diajukan bukan dengan mekanisme GUP KKP meskipun pembayarannya tetap bisa dilakukan secara tunai melalui teller namun itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan. jadi bila ini sering terjadi, bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi temuan dari pemeriksa internal maupun eksternal.
Peneliti	:	Tadi pengawasannya sendiri dari tempatnya Mbak Septi untuk memonitor penggunaan KKP tadi ya, baik baik selanjutnya ya Mbak saya tanya kebiasaan sumber daya manusia nah di deputi UKM Mbak Septi, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan KKP atau CMSVA ini Mbak.
KI-5	:	Yang terlibat di CMSVA ini jadi saat ini hanya KPA dan saya selaku bendahara dan KPA selaku approver Mbak kalau untuk pengelolaan KKP nya selain pengguna KKP perjalanan dinas tersebut maupun KKP operasional tentu kami di keuangan yang terlibat bertugas memproses administrasi pertanggungjawaban.
Peneliti	:	Baik kemudian itu ada rangkap tugas nggak Mbak dalam pengelolaan KKP atau CMSVA?
KI-5	:	Hingga saat ini beban kerjanya masih aman Mbak, belum terlalu membebankan, untuk ke depannya karena ada tuntutan untuk mengoptimalkan penggunaan KKP maupun CMS ini ya harus dilihat lagi beban kerjanya yang muncul kita harus memetakan sambil melihat ketersediaan SDM agar dalam pengelolaannya tetap lancar dan tidak terkena sanksi dari kementerian keuangan.
Peneliti	:	berarti kalau tadi rangkap tugas itu ada ya sebetulnya di tempat Mbak Septi, tapi beban kerjanya masih aman begitu ya. belum terlalu, ini mungkin karena penggunaannya belum optimal tadi itu ya Mbak ya, kalau misalnya satu saat udah semakin tinggi penggunaannya bisa jadi tambah beban gitu ya tambah beban lagi. baik, berikutnya Mbak Septi sejauh mana memahami aturan atau regulasi terkait pengelolaan KKP atau CMSVA ini dan mungkin bisa di-share informasi apa saja aturan apa saja yang Mbak Septi ketahui?
KI-5	:	Sejujurnya saya belum terlalu memahami ini Mbak, baik KKP terlebih lagi CMSVA mungkin karena belum banyak tadi ya transaksi penggunaannya sehingga berkas ke kami masih relatif sedikit jadi saya belum terlalu mendalaminya. hanya belum lama ini kami datang ke KPPN untuk konsultasi lumayan Mbak, kami dapat tambahan ilmu terkait KKP tersebut.
Peneliti	:	Baik Mbak kalau secara teknis Mbak Septi memahami tidak penggunaan KKP ataupun CMSVA ini?
KI-5	:	Untuk KKP saya sendiri cukup tahu cara penggunaannya namun untuk CMSVA pemahaman mungkin sudah ada sedikit tetapi secara teknis saya belum terlalu paham mengoperasikannya biasanya saya tanya

		caranya ke bendahara disatker lain kalau nantinya memang sudah harus sering menggunakan CMSVA mau tidak mau saya harus senantiasa update perkembangan teknologinya.
Peneliti	:	Baik tapi bisa mengoperasikan ya Mbak cuma karena jarang tadi masih agak kagok-kagok. baik berikutnya Mbak, Mbak Septi apakah pernah mengalami atau mengetahui permasalahan administrasi terkait pengelolaan KKP atau CMSVA?
KI-5	:	Iya mbak, masih ada kesalahan administrasi yang masih saya temukan sampai saat ini ada pengajuan dokumen pertanggung jawaban yang diajukan tapi dimana ini seharusnya pakai format pertanggung jawaban GUP KKP tapi ini malah dipertanggung jawabannya seperti biasa saja pakai GUP Tunai sehingga untuk bayar tagian belanja yang muncul saya bayarnya Tunai melalui teller di bank.
Peneliti	:	Jadi administrasi ini terkait pertanggung jawabannya ya padahal transaksinya pakai KKP itu harusnya formatnya beda dari yang biasa ada format tersendiri pengajuannya melalui GUP KKP jadi SPM GUP KKP berbeda dengan SPM GUP Tunai.
KI-5	:	Ini tapi yang bersangkutan memprosesnya dengan berkas yang GUP Tunai tadi ya itu, boleh ya Mbak ya seperti itu. Kalau untuk itu nggak boleh Mbak karena ada monitoring tersendiri dari Kementerian Keuangan
Peneliti	:	Bisa ketahuan ya? baik, selanjutnya saya terkait SOP nih ya Mbak Septi mengetahui tidak SOP di bidang keuangan yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM kemudian terkait ini pengelolaan KKP maupun CMSVA tersebut apakah sudah tersedia disaat Mbak Septi ataupun di tingkat Kementerian?
KI-5	:	Kalau untuk pekerjaan sehari-hari, kami disini mengacu pada beberapa SOP bu. Contoh, untuk membuat SPM, SPM UP, SPM TUP, SPM LS, itu ada SOP nya. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga ada. Juga untuk menyusun Laporan Keuangan, ada SOP nya. Tetapi khusus untuk pengelolaan KKP atau CMSVA rasanya belum ada SOP.
Peneliti	:	Belum ada ya berarti sampai sekarang ya SOP KKP itu ya, lalu kalau belum ada maka dalam pengelolaan KKP maupun CMSVA yang telah berjalan selama ini ketentuan apa saja yang dipedomani oleh Mbak Septi dalam melakukan pekerjaan?
KI-5	:	Kalau ketentuannya sendiri ya mempedomani PMK terkait yang ada. Biasanya saya sering tanya atau diskusi dengan pengelola keuangan di Satker lain. Beberapa kali konsultasi ke Biro Umum dan Keuangan. Buka ppt hasil sosialisasi, you tube. Misalnya terkait limit KKP ya. Karena menyesuaikan batasan limit KKP dengan nilai UP KKP, limit per KKP biasanya kecil, sehingga sering kali agar tercukupi saat digunakan, permintaan kenaikan limit sementara harus dilakukan. Semakin banyak KKP yang beredar, permintaan kenaikan limit akan semakin banyak, dan tidak jarang permintaannya diluar jam kerja. Nah ini harusnya ada pengaturannya ya, ada SOP, SOP khusus perubahan limit KKP. Supaya orang-orang tetap bisa lancar pakai KKPnya.
Peneliti	:	Dari situ ya, dari PMK kemudian informasi-informasi lainnya, tadi diskusi terus konsultasi, hasil sosialisasi. menurut Mbak Septi kalau begitu keberadaan SOP itu sendiri bisa mempengaruhi kualitas

		pengelolaan KKP atau CMSVA di Kementerian Kepresiden UKM ini tidak Mbak?
KI-5	:	Dari hasil konsultasi terakhir kami ke KPPN di awal September lalu Mbak, sepertinya SOP khusus untuk mengelola KKP sangat dibutuhkan sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya juga tahu prosesnya dan terpenting paham tujuan dari penggunaan KKP ini. SOP ini juga nantinya perlu disosialisasikan termasuk kepada para pimpinan tinggi selaku pemegang dan seharusnya juga ada sosialisasi penggunaan KKP ini kepada para pejabat yang memiliki KKP itu sendiri selaku pemegang KKP.
Peneliti	:	Berarti penting begitu ya Mbak kalau saya boleh tarik benang merahnya SOP ini penting untuk pengelolaan KKP itu sendiri tadi Mbak Septy bilang kalau sebetulnya SOP ini juga tidak hanya khusus untuk mengelola keuangan tapi para pemegang juga karena mereka justru yang langsung terlibat yang menggunakan. kalau SOP ada berarti nanti harusnya bisa lebih optimal hasilnya ya Mbak. kemudian berikutnya apakah Mbak Septy mengetahui mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMSVA yang diatur oleh Kementerian Keuangan
KI-5	:	Itu tadi dari Kementerian Keuangan ya Mbak, kalau dari internal Satker Deputy UKM misalnya atau di tingkat Kementerian ada belum Mbak mekanisme reward and punishment penggunaan KKP atau CMSVA ini.
Peneliti	:	Belum ada Mbak. yang baru bersifat himbauan saja sih Mbak, belum ada aturan detil yang mengatur kewajibannya termasuk reward and punishment ini jadi yang aturan Mbak punya pimpinan mewajibkan penggunaan itu belum ada ya maksudnya masih bersifat himbauan atau dorongan saja. tadi kan sebelumnya SOP ya kalau ini keberadaan mekanisme reward and punishment ini bisa mempengaruhi kualitas penggunaan KKP dan CMS di Kementerian Koperasi dan UKM tidak Mbak?
KI-5	:	Ya sih Mbak, kalau saya bilang sih sangat berpengaruh sekali kalau ada kebijakan tersebut banyak juga pegawai di sini yang menyepelkan penggunaan KKP padahal kan itu membantu sekali ya Mbak saya pun belum memaksimalkan penggunaan CMS karena harus memastikan dulu kepelaksanaan kegiatan untuk data rekening penyedia itu betul-betul valid karena itu perlu ada effort tersendiri saya pun kadang jadi masih abai, dengan adanya reward and punishment ini mau tidak mau akan bersifat memaksa walaupun tentu nantinya akan berpengaruh baik pada implementasi KKP juga CMS tersebut.
Peneliti	:	Jadi berarti kalau misalnya ada mekanisme reward and punishment lebih takut gitu ya Mbak ya? iya tapi akhirnya pada menggunakan gitu ya berarti perlu didisiplinkan ya. baik lalu yang Mbak Septy ketahui langkah-langkah apa saja nih yang telah dilakukan Satker dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP atau CMSVA di Kementerian Koperasi dan UKM
KI-5	:	Kalau yang kami lakukan di tim keuangan ini masih sederhana sifatnya Mbak, untuk membantu penggunaan KKP oleh pegawai juga penggunaan CMS di tempat saya sendiri paling secara berkala kami memastikan agar tidak terjadi transaksi pribadi dalam penggunaan KKP

		kalau CMS dengan adanya histori transaksi kami hukumkan sebagai alat evaluasi untuk kedepannya.
Peneliti	:	Masih seperti itu ya berarti ya. iya Mbak baik, saya lanjut ya Mbak iya Mbak Septi, berarti secara pribadi pernah lakukan transaksi belanja negara menggunakan KKP tidak?
KI-5	:	Iya mbak, saya menggunakan KKP untuk keperluan perjalanan dinas.
Peneliti	:	Baik, transaksi belanja negara apa saja yang mbak Septi lakukan dengan KKP tadi?
KI-5	:	Saya menggunakan KKP untuk pembelian tiket dan juga membayar penginapan.
Peneliti	:	Memang kegunaannya untuk itu ya? untuk perjalanan dinas?
KI-5	:	Iya
Peneliti	:	Lalu, untuk transaksi barusan baik beli tiket dan bayar penginapan yang mbak septi lakukan dengan KKP itu memerlukan ketersediaan mesin EDC ga ya?
KI-5	:	Selama saya menggunakan KKP, saya malah tidak pernah menggunakan mesin EDC mbak karena saya bertransaksi langsung dengan travel dan kalai hotel melalui aplikasi jadi tidak perlu gesek kartunya lagi.
Peneliti	:	Oh jadi justru transaksi-transaksi yang mbak septi pernah lakukan sebetulnya sudah tercover dengan aplikasi tadi ya? Tidak terpengaruh ya pun misalnya ada mesin EDC? Ada atau tidak berarti tidak menggunakan ya? Sudah dilakukan online gitu transaksinya. Lanjut mbak, berikutnya apa yang mbak septi ketahui tentang tingkat responsivitas pihak Bank dalam memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-5	:	Selama ini baik ya mbak dan termasuk cepat juga bank meresponnya, hanya sekali saja kadang agak lama menjawabnya ketika kita DM. Mungkin mereka juga ada kesibukan lain di kantor.
Peneliti	:	Oh gitu, tadi termasuk cepat ya mbak kalau ada permintaan kenaikan limit. Lalu, apakah mbak septi pernah mengalami kendala teknis dalam penggunaan kkp tadi dan bagaimana respon bank dalam mengalami kendala tersebut?
KI-5	:	Kalau saya sendiri belum pernah menemui kendala saat menggunakan KKP. Dari beberapa pegawai yang pernah bermasalah saat menggunakan KKP dan kami selaku jembatan penghubung pihak bank sejauh ini mereka responsif dalam menghadapi beberapa hambatan tersebut.
Peneliti	:	Oh jadi seperti halnya tadi, ada kenaikan limit, kalau ada kendala mereka juga responsif ya? Kalau tadi kan KKP mbak? Kalau CMS gimana mbak? pernah mengalami kendala tidak? terus respon bank seperti apa?
KI-5	:	Belum ada mbak, selama ini kebetulan saya juga baru menggunakan CMSVA untuk pembayaran tagihan KKP saja.
Peneliti	:	Oh jadi kalau CMS belum pernah menemui kendala?
KI-5	:	Iya, belum mbak.
Peneliti	:	Baik, lalu pertanyaan terakhir saya mbak. Secara garis besar atau secara umum yang mbak septi ketahui tentang peran aktif pihak bank dalam menjaga kelancaran mengenai KKP atau CMS.
KI-5	:	Melihat keterlibatan pihak bank dari awal PKS lalu penerbitan KKP dan terutama dalam proses penggunaannya baik KKP maupun CMS, menurut saya pihak bank sudah menunjukkan peran aktif yang relatif tinggi dalam

		pengelolaan KKP maupun CMS di KemenkopUKM. Semoga saja layanan yang mereka berikan kedepannya juga semakin lebih baik lagi.
Peneliti	:	Berarti dari awal, memang pihak bank sudah hadir betul ya mbak, sudah mengawal terkait dengan penerapan CMS. Baik, mungkin sementara saya cukupkan pertanyaan wawancara saya. Terima kasih mbak Septi atas waktunya bersedia menjadi responden saya. Mohon maaf bila ada hal hal yang tidak berkenan dari saya. Terima kasih ya mbak sekali lagi.
KI-5	:	Terima kasih juga mbak Galih.
Peneliti	:	Wassalamualaikum wr wb.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A



## TRANSKRIP WAWANCARA

### MODEL SISTEM PEMASYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Nama : Imam Zarkasih  
Jabatan : Pemegang KKP Operasional/Belanja Modal  
Unit Kerja : Deputi Bidang Usaha Mikro  
Tanggal Wawancara : 22 September 2023  
Kode Informasn : KI-6

Peneliti	:	<p>Assalamualaikum Wr. Wb mas Imam. Selamat pagi mas. Begini, menyusul surat izin penelitian saya sebelumnya, saya izin perkenalkan diri dulu ya, nama saya Galih Cheria Puspita, saya mahasiswi magister di Politeknik STIA LAN jurusan manajemen keuangan negara. Saat ini saya sedang membuat tesis, sedang melakukan penelitian dengan pemashasan yang diangkat yaitu mengenai penggunaan sistem pemayaran nontunai pada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah dari beberapa telaah dokumen yang saya lakukan beberapa waktu lalu, bahwa penggunaan sistem pemayaran non-tunai di Kementerian Koperasi dan UKM itu ternyata masih relatif rendah.. Uang persediaannya masih didominasi uang tunai. Lalu pemakaian kartu kredit pemerintah dan CMSVA-nya juga belum optimal ya. Dari situ saya tertarik mengangkat tema itu, dan dari beberapa penelitian terdahulu, saya mencoba menggali beberapa faktor yang memang memengaruhi penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga CMSVA tadi pada Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih juga sebelumnya mas Imam karena sudah berkenan menjadi responden penelitian saya.</p> <p>Saya coba lanjut ke pertanyaan aja ya Mas. Bagaimanakah penerapan Cashless Payment System, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA) di tempat Mas Imam?</p>
KI-6	:	<p>Pertama kali mendengar KKP dari sosialisasi yang diadakan Biro Keuangan pada pertengahan 2019 lalu. Bahwa pemerintah mendorong penggunaan alat bayar non-tunai dalam pembayaran belanja negara. Segera setelah pimpinan bekerja sama dengan pihak BNI, kami di Deputi Mikro pun mulai menggunakannya, terutama dalam proses pembelian tiket atau pemesanan hotel bagi pegawai yang akan tugas dinas. Saya selaku pemegang KKP operasional juga sudah memanfaatkannya untuk membayar belanja keperluan operasional kantor. Kalau untuk CMS VA, Bendahara kami sudah menggunakannya juga, kebanyakan untuk pembayaran pajak.</p>
Peneliti	:	<p>Manfaat/keuntungan apa saja yang diperoleh dari implementasi KKP/CMS VA?</p>

KI-6	:	Sekarang ini bila ada kebutuhan mendesak untuk pengadaan barang seperti alat tulis kantor, atau konsumsi rapat, kami sudah dapat memanfaatkan KKP karena belanjanya dilakukan melalui merchant pemerintah, Digipay. Segera setelah pemesanan barang dilakukan, vendor lalu mengirim barang, dan pembayarannya sendiri dapat dilakukan secepatnya melalui penggunaan KKP. Untuk CMS VA juga kami rasakan manfaatnya meskipun hingga saat ini penggunaannya masih didominasi untuk pembayaran setoran pajak atas belanja barang/jasa yang dilakukan.
Peneliti	:	Kendala/hambatan apa saja yang sering ditemui dalam implementasi KKP/CMS VA?
KI-6	:	So far kami tidak menemui masalah saat menggunakan KKP untuk keperluan belanja operasional. Sementara kalau terkait CMS VA, informasi dari Bendahara di tempat kami, jika pembayaran dilakukan ke rekanan yang memiliki rekening bank diluar BNI, maka muncul biaya transfer. Nah biaya transfer ini perlu dikonfirmasi dulu ke rekanan, karena tidak dapat dibebankan ke APBN, maka hal ini harus dibebankan ke mereka, dan tentunya akan mengurangi nilai bersih yang mereka terima walaupun nilainya relatif kecil ya, Rp6.500.
Peneliti	:	Bagaimana bentuk dorongan Satker terhadap penggunaan KKP atau CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja?
KI-6	:	Sejauh ini pimpinan Satker kami sangat mendorong penggunaan KKP, diantaranya dengan cara mencontohkan penggunaan KKP tersebut guna keperluan perjalanan dinas, untuk membayar biaya pembelian tiket pesawat ataupun penginapan. Namun sampai saat ini dari pimpinan Satker, Unit Eselon I, hingga Menteri belum mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan KKP maupun CMS VA padahal kebijakan tersebut merupakan bagian penting agar penggunaan KKP dan CMS VA berjalan optimal untuk menyukseskan cashless payment system dalam pelaksanaan anggaran
Peneliti	:	Bagaimana penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi atau Bimbingan Teknis terkait pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Bapak?
KI-6	:	Sosialisasi di Satker kami belum pernah ada mba.. Baik soal KKP maupun CMS VA. Selama ini kalau sosialisasi, kami pengelola keuangan hadir pada acara yang diselenggarakan Unit Eselon I saja. Sepertinya agar para pelaksana tugas dinas, dari tingkat pimpinan tinggi hingga pelaksana terinformasi secara utuh mengenai penggunaan dan juga manfaat KKP/CMS VA, selain sosialisasi yang diadakan KPPN/Unit Eselon I, sosialisasi di dalam unit teknis juga harus dilakukan, ke seluruh pegawai, terutama pemegang KKP.
Peneliti	:	Bagaimana aktivitas Pengawasan, Monitoring serta Evaluasi terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-6	:	Secara khusus sih setahu saya belum pernah dilakukan pengawasan ya dari pimpinan atau pengelola keuangan. Semisal ada pertanggungjawaban belanja operasional yang menggunakan KKP cukup lama penyelesaiannya, dimana saya sendiri pernah mengalami, tetapi tidak ada warning dari tim keuangan di Satker kami untuk segera menyelesaikan keterlambatan itu. Karena memang belum ada SOP nya juga. Saya kurang mengetahui dampak keterlambatannya itu nantinya seperti apa.

Peneliti	:	Aturan/regulasi apa yang Bapak pedomani dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-6	:	Beberapa pemahaman umum yang saya miliki tentang regulasi/peraturan terkait penggunaan KKP atau sistem pembayaran CMS VA yaitu pembayaran menggunakan KKP tidak dilakukan pemungutan perpajakan oleh bendahara pemerintah, peraturan terkait kerahasiaan data, peraturan terkait tata cara pembayaran menggunakan KKP.
Peneliti	:	Bagaimana penggunaan KKP atau CMS VA yang Bapak lakukan selama ini?
KI-6	:	Sebagai pemegang KKP, saya memahami secara teknis penggunaan KKP sebagai alat pembayaran belanja negara. Untuk jenis KKP Operasional yang saya pegang, saya biasa menggunakannya untuk transaksi belanja operasional melalui aplikasi Digipay, sejenis merchant toko hijau atau toko orange itu. Atas transaksi tersebut kemudian dilakukan pembayarannya dengan menggunakan KKP. Dengan mekanisme ini maka pajak tidak lagi dipungut oleh bendahara, hal ini berbeda jika dilakukan dengan UP tunai yang mengharuskan bendahara melakukan pemungutan dan penyetoran pajak tersebut. Prosesnya sendiri sebetulnya tidak sulit, hanya karena menggunakan aplikasi, ya harus paham teknologi juga ya. Termasuk dalam penggunaan CMS VA, Bendahara yang kebetulan ada di tim saya, biasanya menggunakan fitur ini untuk pembayaran pajak ya. Bendahara pun harus update soal teknologinya.
Peneliti	:	Kendala/permasalahan administrasi apa saja yang pernah Bapak temui dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-6	:	Selama menggunakan KKP, saya belum pernah mengalami kendala. Pernah juga disini bu terjadi kesalahan pembayaran tagihan KKP, hmmm, klo tidak salah Bendahara pernah cerita, ada pembayaran tagihan yang dilakukan ke nomor KKP yang bukan seharusnya. Hal ini terjadi karena Bendahara kurang teliti dalam memasukan nomor KKP. Saat itu permasalahan tersebut dapat diatasi setelah berkoordinasi dengan Bank penerbit KKP melalui mekanisme keterlanjuran pembayaran. Harapan kami kedepannya tidak terjadi lagi kasus seperti itu karena dapat mengganggu proses kelancaran pemabayaran tagihan KKP.
Peneliti	:	Sebutkan berbagai SOP dalam bidang keuangan yang telah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM? Bagaimanakah penerapan SOP Pengelolaan KKP dan CMS VA?
KI-6	:	Iya, saya mengetahui beberapa SOP yang digunakan oleh tim keuangan disini. Ada SOP untuk pembuatan tagihan LS, SOP untuk tagihan UP TUP, SOP untuk memverifikasi berkas, SOP untuk menyusun Laporan Keuangan, lalu untuk menindaklanjuti temuan BPKnya. Tetapi kalau spesifik untuk mengelola KKP, setahu saya belum tersedia.
Peneliti	:	Dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA yang telah berjalan selama ini, ketentuan apa saja yang dipedomani oleh Bapak dalam melaksanakan pekerjaan?
KI-6	:	Mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan. Saya juga baca buku 'Buku Pintar Kartu Kredit'. Kalau untuk acuan sekarang kan banyak ya, mudah kita dapatkan dari berbagai media. Tetapi kalau untuk ketentuan formilnya, ya dari PMK itu.
Peneliti	:	Bagaimanakah penerapan SOP dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?

KI-6	:	Keberadaan SOP dalam pengelolaan KKP atau CMS VA sangat penting karena membantu memastikan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan dalam penggunaan dana publik. Bila mempedomani SOP maka pengelolaan KKP menjadi lebih baik. SOP harus dikembangkan dengan cermat, dan personil yang terlibat harus dilatih dan memahami dengan baik prosedur-prosedur tersebut. Selain itu, SOP juga harus diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan dalam lingkungan operasional dan juga peraturan yang berlaku.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMS VA yang diatur oleh Kementerian Keuangan?
KI-6	:	Ooo.. Belum sih ya kalau menurut saya. Saya ingat di PMK tentang KKP itu ada disebutkan Kemenkeu akan memberikan sanksi berupa surat teguran kepada Satker yang penggunaan KKP nya tidak mencapai target tertentu. Tapi saya pernah diskusi juga dengan orang Kanwil DjPb, yang intinya mereka saat ini pun sifatnya masih mendorong saja, belum sampai tahap itu, masih bagus ada yang menggunakan, masa mau disanksi.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment internal dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-6	:	Yang internal juga belum ada aturannya. Ya tadi, yang sempat saya sampaikan sebelumnya, pimpinan juga kan masih menghimbau penggunaan KKP juga CMS VA ini saja, belum sampai mewajibkan. Satker hanya memiliki sanksi kepada pemegang KKP sesuai dengan perjanjian antara KPA dengan pemegang KKP dimana sanksi diberikan jika pengguna melakukan penyalahgunaan KKP bukan untuk keperluan kantor. Tetapi jika belum mencapai target penggunaan, belum ada punishment nya.
Peneliti	:	Bagaimana penerapan mekanisme reward and punishment dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-6	:	Perlu, perlu sekali sih kalau saya bilang. Yang sudah ada di PMK, dibuatkan lagi turunannya di internal, diatur lebih rinci, agar lebih mantap lagi pengelolaannya disini. Karena kalau pengelola keuangan saja yang terus-terusan menghimbau, tetapi misalnya tidak ada reward and punishment, saya rasa akan kurang efektif juga untuk mendorong penggunaan KKP juga CMS nya.
Peneliti	:	Upaya apa saja yang telah dilakukan Satker dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP atau CMS VA di Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-6	:	Sementara ini pemakaian KKP masih sangat dibatasi hingga tingkat Eselon II saja. Dengan tambahan 1 KKP Operasional yang saya pegang. Hal ini juga salah satunya bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, dengan jumlah yang sedikit masih lebih mudah dipantau. Penggunaannya termonitor oleh tim keuangan. Apabila kedepannya penggunaan KKP ini semakin meluas, sepertinya diperlukan tim khusus yang mengawasi pengelolaan baik KKP maupun CMS VA nya.
Peneliti	:	Apakah Bapa pernah melakukan transaksi belanja negara menggunakan KKP?
KI-6	:	Cukup sering ya saya menggunakan KKP.
Peneliti	:	Transaksi belanja negara apakah yang Bapak lakukan dengan menggunakan KKP?

KI-6	:	Karena KKP yang saya pegang itu jenisnya KKP operasional/belanja modal, maka hanya bisa saya gunakan untuk belanja keperluan operasional perkantoran ya. Paling sering saya gunakan untuk beli ATK dan toner. Pernah juga saya pakai untuk membeli laptop.
Peneliti	:	Apakah transaksi belanja negara yang Bapak lakukan dengan KKP memerlukan ketersediaan mesin EDC?
KI-6	:	Sudah tidak perlu sih ya, karena untuk belanja yang tadi itu, saya pakai KKP dan juga CMS VA. Beli ATK dan toner di Digipay, bayar pakai KKP tapi ya tidak perlu gesek lagi di mesin. Kalau beli laptop, di E-Katalog, Bendahara bayar pakai CMA langsung ke rekening penyedia nya.
Peneliti	:	Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-6	:	Berdasarkan pengalaman selama ini, pihak bank sangat responsif terkait permohonan untuk kenaikan limit satker dan tidak dipersulit. Permintaan kenaikan limit KKP diajukan ke Administrator KKP, dan mereka menghubungi pegawai yang ditunjuk oleh bank. Permintaan naik limit biasanya diproses 1x24jam pada hari kerja.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah Bapak temui saat menggunakan KKP? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?
KI-6	:	Respon pihak Bank mengatasi kendala penggunaan KKP di lapangan sudah baik dan responsif. Saya pernah memiliki pengalaman adanya biaya charge saat membeli barang di suatu aplikasi. Kemudian saya melaporkan hal ini ke bank dan direspon cepat.
Peneliti	:	Bagaimana peran dari pihak Bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMS VA selama ini?
KI-6	:	Dari sejak awal ditandatangani nya PKS, pihak bank mengawal pengelolaan KKP maupun CMS ini. Dengan menerbitkan KKP yang kami gunakan ini, menyetujui permintaan kenaikan limit Satker, melakukan sosialisasi, dan beberapa kali di Deputi kami menghadapi kendala, Bank selalu merespon dengan baik.
Peneliti	:	Baik, terimakasih ya mas Imam atas kesediaan waktunya untuk menjadi responden penelitian saya. Mohon maaf bila ada hal hal yang tidak berkenan dari saya. Terima kasih ya.

## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMASYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Andrianus Agung  
 Jabatan : Pemegang KKP Operasional/Belanja Modal  
 Unit Kerja : Sekretariat Kementerian  
 Tanggal Wawancara : 20 September 2023  
 Kode Informasn : KI-7

Peneliti	:	<p>Assalamualaikum Wr. Wb mas Agung. Selamat pagi mas. Begini, menyusul surat izin penelitian saya sebelumnya, saya izin perkenalkan diri dulu ya, nama saya Galih Cheria Puspita, saya mahasiswi magister di Politeknik STIA LAN jurusan manajemen keuangan negara. Saat ini saya sedang membuat tesis, sedang melakukan penelitian dengan pemashasan yang diangkat yaitu mengenai penggunaan sistem pemayaran nontunai pada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah dari beberapa telaah dokumen yang saya lakukan beberapa waktu lalu, bahwa penggunaan sistem pemayaran non-tunai di Kementerian Koperasi dan UKM itu ternyata masih relatif rendah.. Uang persediaannya masih didominasi uang tunai. Lalu pemakaian kartu kredit pemerintah dan CMSVA-nya juga belum optimal ya. Dari situ saya tertarik mengangkat tema itu, dan dari beberapa penelitian terdahulu, saya mencoba menggali beberapa faktor yang memang memengaruhi penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga CMSVA tadi pada Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih juga sebelumnya mas Agung karena sudah berkenan menjadi responden penelitian saya.</p> <p>Saya coba lanjut ke pertanyaan aja ya Mas. Bagaimanakah penerapan Cashless Payment System, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA) di tempat Mas Agung?</p>
KI-7	:	<p>Setelah saya menandatangani Berita Acara, saya terima KKP, tidak lama setelahnya saya langsung gunakan dalam proses pembayaran belanja barang. Saya ditunjuk karena saya bertindak sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa. Mengenai KKP ini saya terinfo dari Bendahara. Sudah cukup lama pembelian barang, misalnya beli ATK, saya lakukan di aplikasi Bela Pengadaan. Namun selama ini saya proses seperti biasa saja, tidak menggunakan KKP. Setelah saya tahu bahwa saat ini tersedia KKP sebagai alat bayar non-tunai yang disediakan pemerintah, maka pada transaksi pembelian berikutnya, sudah menggunakan KKP. Sementara untuk CMS VA, saya tidak mengetahuinya.</p>
Peneliti	:	<p>Manfaat/keuntungan apa saja yang diperoleh dari implementasi KKP/CMS VA?</p>

KI-7	:	Besaran belanja barang dan modal saat ini dapat diakomodir oleh KKP dengan nilai transaksi hingga 200juta. Keleluasaan ini tentu membuat transaksi pembelian belanja tersebut menjadi lebih efektif. Saya pernah menggunakan KKP untuk belanja modal, membeli komputer, printer dan laptop. Untuk mengcover kebutuhan operasional di Biro kami, misalnya beli ATK, sekarang juga bisa lebih simple belanjanya. Sejak ada KKP, kita bisa beli barang seperti toner, kertas, di sistem marketplace pemerintah. Sistem ini kan mengharuskan pembayaran menggunakan KKP, jadi ya sudah, belanjanya mudah, didukung pembayaran dengan KKP, jadi lebih cepat pengadaannya. Teman-teman juga happy karena kebutuhannya lebih cepat terpenuhi, lebih sedikit komplain. Fleksibilitas penggunaan KKP telah memberikan keuntungan bagi para penggunanya.
Peneliti	:	Kendala/hambatan apa saja yang sering ditemui dalam implementasi KKP/CMS VA?
KI-7	:	Kendala menggunakan KKP sempat saya temui terkait pengenaan pajak atas pembelian barang di Bela Pengadaan. Saat itu Bendahara masih bingung harus memotong pajaknya dulu atau tidak karena kalau tidak salah saat itu belum ada aturan yang clear. Dan belum ada sosialisasi khusus tentang pengenaan pajak itu. Tapi saat ini sih sudah ada dasar aturannya.
Peneliti	:	Bagaimana bentuk dorongan Satker terhadap penggunaan KKP atau CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja?
KI-7	:	Seingat saya sih ya bu, belum ada kewajiban dari pimpinan untuk penggunaan KKP atau CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja. Himbuan dari pimpinan lebih pada penggunaan KKP untuk belanja perjalanan dinas dan bukan belanja pengadaan. Beberapa kali Bagian Keuangan saja yang mengingatkan saya kalau melakukan belanja operasional, agar di laman market place pemerintah agar pembayarannya bisa menggunakan KKP.
Peneliti	:	Bagaimana penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi atau Bimbingan Teknis terkait pengelolaan KKP atau CMS VA di Satker Bapak?
KI-7	:	Informasi yang saya terima terkait penggunaan KKP atau CMS VA saya dapat dari Bagian Keuangan secara langsung, bukan dari kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh Satker. Sepertinya beberapa kali ada sosialisasi tetapi yang diundang adalah para pengelola keuangannya, bukan pemegang KKP. Untuk meningkatkan pemahaman dan awareness pegawai, seharusnya diadakan sosialisasi yang lebih luas, mencakup hingga pengguna KKP bahkan pegawainya.
Peneliti	:	Bagaimana aktivitas Pengawasan, Monitoring serta Evaluasi terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-7	:	hmm..saya sih kurang memahami aktivitas monitoring dan evaluasi terkait penggunaan KKP dan CMS VA ini ya bu. Tetapi untuk pengawasan, Bagian Keuangan rasanya cukup aktif mengingatkan optimalisasi penggunaan dan juga himbuan untuk tidak melakukan penyalahgunaan KKP tersebut.
Peneliti	:	Aturan/regulasi apa yang Bapak pedomani dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-7	:	Saat ini saya baru mengetahui sedikit aturan terkait penggunaan KKP. Karena KKP yang saya pegang ini kan jenisnya operasional, jadi memang hanya bisa digunakan untuk keperluan operasional, tidak bisa untuk

		kebutuhan perjadi. Selama ini memang saya gunakan untuk beli ATK, dan konsumsi rapat saja paling bu.. Oh pernah sekali dipakai membeli laptop/pc, ptinter. Kalau tidak salah juga ada perubahan peraturan, yang tadinya 1 penerima pembayaran hanya bisa dibayar maksimal 50 juta, berubah menjadi maksimal 200 juta. Memang sih seharusnya saya lebih up to date lagi tentang peraturan KKP ini agar saya tidak salah menggunakannya karena kan ini pakai uang negara.
Peneliti	:	Bagaimana penggunaan KKP atau CMS VA yang Bapak lakukan selama ini?
KI-7	:	Kalau secara teknis, ya saya paham sih bu penggunaannya. Ini untuk melakukan pembelian ATK misalnya, kan juga sudah menggunakan aplikasi, baik aplikasi Bela Pengadaan maupun aplikasi Digipay yang menuntut pemabayaran dengan KKP. Jadi ya sudah terbiasa dengan teknologi yang digunakan. Mengingat sistem pembayaran non-tunai akan semakin berkembang kedepannya, tentu seluruh pegawai harus punya pengetahuan teknologi sebagai modal dasar untuk dapat mengoperasikan berbagai aplikasi terkait.
Peneliti	:	Kendala/permasalahan administrasi apa saja yang pernah Bapak temui dalam pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-7	:	Awal penggunaan KKP, saya pernah salah membuat administrasi pertanggungjawabannya. Harusnya kan ini menggunakan dana UP KKP, tetapi saat itu format administrasinya dibuat dengan UP tunai biasa. Untung saja saat diverifikasi tim keuangan, tidak lolos verifikasi sehingga dikembalikan lagi ke saya untuk diperbaiki dulu dan sesegera mungkin mengajukan berkasnya.
Peneliti	:	Sebutkan berbagai SOP dalam bidang keuangan yang telah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM? Bagaimanakah penerapan SOP Pengelolaan KKP dan CMS VA?
KI-7	:	Saya kurang tahu SOP apa saja yang digunakan oleh teman-teman di keuangan. Harusnya sih kalau sudah ada SOP pengelolaan KKP, pastinya kami diundang ya. Karena ini kami menggunakan KKP untuk keperluan perkantoran sehari-hari. Sampai sekarang sih belum ada sosialisasinya.
Peneliti	:	Dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA yang telah berjalan selama ini, ketentuan apa saja yang dipedomani oleh Bapak dalam melaksanakan pekerjaan?
KI-7	:	Ya karena sampai saat ini SOP nya belum ada, saya bekerja mengacu ke peraturan yang sudah ada saja. Peraturan Menteri nya.
Peneliti	:	Bagaimanakah penerapan SOP dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-7	:	Walau saat ini belum ada SOP, dan penggunaan KKP juga masih terus berjalan, tetapi menurut saya tetap harus ada SOP ya. Supaya semua pihak yang terlibat tahu betul apa yang harus dilakukan, lama waktu pengerjaan, dan tanggungjawabnya. Kedepannya jika ada perubahan peraturan dan tentu perkembangan teknologi, maka SOP nya harus selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dengan kondisi terkini.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMS VA yang diatur oleh Kementerian Keuangan?
KI-7	:	Saya tidak terlalu memahami mengenai mekanisme reward dan punishment dari Kemenkeu. Hanya beberapa kali diingatkan oleh Bagian



		Keuangan untuk aktif bertransaksi di aplikasi Digipay saat membeli kebutuhan operasional kantor karena dipantau oleh Kemenkeu.
Peneliti	:	Bagaimana pelaksanaan mekanisme reward and punishment internal dalam pengelolaan KKP atau CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-7	:	Sepemahaman saya sih belum ada ya. Tapi saya rasa ya perlu, dan ini perlu diketahui oleh seluruh pelaksana kegiatan juga. Saya sebagai pemegang KKP Operasional kan mengeksekusi belanjanya, terkadang ada pelaksana kegiatan yang tidak ingin berbelanja melalui aplikasi yang sudah disediakan, inginnya berbelanja sendiri saja.
Peneliti	:	Bagaimana penerapan mekanisme reward and punishment dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-7	:	Ya itu, seperti yang barusan saya katakan, harusnya ada sih mekanisme reward and punishment itu supaya semua orang lebih disiplin lagi mengikuti aturan. Sama-sama begitu ya punya kesadaran lebih untuk meningkatkan pemabayaran non-tunai ini.
Peneliti	:	Upaya apa saja yang telah dilakukan Satker dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP atau CMS VA di Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-7	:	Kalau dari sisi saya selaku pemegang KKP operasional, dengan rutin berbelanja di aplikasi Digipay, E-Catalogue, dimana history transaksi jelas ada, harga barang juga bersaing, ya berarti sudah ikut menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP maupun CMS nya ya. Dari aplikasi belanja itu kan selain KKP memang bisa juga menggunakan CMS, bisa ditelusuri juga transaksinya.
Peneliti	:	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan transaksi belanja negara menggunakan KKP?
KI-7	:	Ya, lumayan sering saya pakai KKP untuk belanja barang.
Peneliti	:	Transaksi belanja negara apakah yang Bapak lakukan dengan menggunakan KKP?
KI-7	:	Macam-macam ya, beli kertas, tinta printer, odner, snack rapat. KKP saya kan KKP operasional.
Peneliti	:	Apakah transaksi belanja negara yang Bapak lakukan dengan KKP memerlukan ketersediaan mesin EDC?
KI-7	:	Hampir seluruhnya saya belinya di marketplace pemerintah itu ya. Pesan barang, barang dikirim, langsung transaksi. Belum pernah beli atau datang ke toko sejak pakai KKP ini.
Peneliti	:	Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-7	:	Kalau saya mengajukan permintaan kenaikan limit kan melalui Bagian Keuangan, tidak langsung ke Bank. Tapi kalau lihat durasi sejak saya ajukan permintaan ke Bagian Keuangan, hingga limit saya disetujui, ya cukup respon juga berarti pihak bank nya. Termasuk cepat lah.
Peneliti	:	Kendala/hambatan teknis apa saja yang pernah Bapak temui saat menggunakan KKP? Bagaimana tingkat responsivitas pihak Bank mengatasi kendala tersebut?
KI-7	:	Terkait KKP, kendala yang saya alami itu mengenai pengenaan pajak saja. Tidak berhubungan langsung dengan bank sih ya. Oh, pernah juga deh beberapa kali, soal limit KKP. Saat mau transaksi di aplikasi belanja, transaksi ditolak karena ternyata limit KKP nya sudah tidak mencukupi.

	Setelah lapor Bagian Keuangan, dibantu followup, tidak lama kemudian Bank merespon cepat dan menyetujui kenaikan limit tersebut sehingga transaksi bisa segera diselesaikan. Tetapi memang jika sudah diluar jam kerja, slow respon.
Peneliti	: Bagaimana peran dari pihak Bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMS VA selama ini?
KI-7	: Bank selaku pemilik produk KKP maupun CMS VA pasti akan berperan aktif ya, terutama bila Satker menemui berbagai kendala penggunaan. Terakhir saya dengan dari Bagian Keuangan, dalam waktu dekat akan ada 2 bank yang akan melakukan sosialisasi ulang baik tentang KKP maupun CMS VA.
Peneliti	: Baik, mungkin sementara saya cukupkan pertanyaan wawancara saya. Terima kasih mas Agung atas waktunya bersedia menjadi responden saya. Mohon maaf bila ada hal hal yang tidak berkenan dari saya. Terima kasih ya mas sekali lagi.

## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Niken Puji Lestari  
Jabatan : Pemegang KKP Perjalanan Dinas  
Unit Kerja : Sekretariat Kementerian  
Tanggal Wawancara : 25 September 2023  
Kode Informan : KI-9

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr. Wb, Selamat siang Mbak Niken, Mbak Niken ini sesuai surat izin penelitian saya, sebelumnya Saya izin perkenalan diri mungkin ya, sebelumnya nama saya Galih Cheria Puspita, saya mahasiswi Magister Politeknik STIA LAN jurusan manajemen keuangan negara. Nah ini Mbak Niken saya saat ini sedang membuat tesis dengan judul model penggunaan sistem pembayaran non tunai atau cashless payment system pada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah saat ini saya sedang penelitian dan mungkin terima kasih juga nih Mbak Niken sebelumnya sudah bersedia menjadi responden penelitian saya, jadi mungkin saya cerita dulu ya sedikit ya latar belakang kenapa saya mengambil tema ini nih. Jadi memang dari beberapa telah dokumen yang saya lakukan kemudian beberapa informasi yang saya peroleh, jadi ternyata ya sistem pembayaran non tunai di Kementerian Koperasi dan UKM itu masih relatif rendah ya Mbak Niken, jadi penggunaan uang persediaannya ternyata masih didominasi oleh uang tunai. Kemudian penggunaan kartu kredit pemerintah juga cashless payment systemnya itu masih rendah. Saya tertarik nih untuk mencoba menggali beberapa faktor yang kiranya mempengaruhi implementasi keduanya itu di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah itu tadi terima kasih Mbak Niken disini saya masukkan sebagai key informant selaku pemegang kartu kredit ya kartu kredit perjalanan dinas. Mungkin saya langsung saja ya Mbak Niken ya bertanya, pertama apa yang Mbak Niken ketahui tentang cashless payment system kartu kredit pemerintah dan juga cash management system?
KI-9	:	Kalau kartu kredit pemerintah itu menurut saya sih sama ya mba ya kayak kartu kredit pribadi sebagai alat pembayaran cashless, tapi kalau kartu kredit pemerintah ini pastinya dimanfaatkan oleh pegawai yang bekerja di satuan kerja pemerintahan untuk keperluan belanja pemerintahan pastinya, tadi contohnya seperti belanja operasional ya mba ya, sama perjalanan dinas. Kalau saya sendiri sih kebetulan merupakan pengguna KKP Perjadin, jadi saya merasakan betul nih Mbak benefitnya, misalnya saya mau beli tiket pesawat itu sudah terakomodir oleh travel yang terafiliasi dengan pihak bank, mudah dan cepat seperti memakai credit card pada umumnya saja dimana pembayarannya di cover oleh pihak

		banknya dulu kan ya Mbak dan ditagihkan kemudian. Kalau yang terkait CMSVA sih setahu saya, Bendahara sudah beberapa kali memanfaatkan fitur CMSVA Mbak dari BNI, misalnya untuk bayar tagihan kartu kredit dan juga melakukan beberapa pembayaran honor ke pegawai.
Peneliti	:	Berarti kalau secara mekanisme, kartu kredit pemerintah sama kartu kredit yang dari sektor swasta itu sama ya Mbak ya cuma kalau ini untuk belanja pemerintah begitu ya. Kemudian apa nih yang manfaat yang mungkin Mbak Niken ketahui atau bahkan rasakan secara langsung ya dari penggunaan KKP atau CMSVA ini Mbak?
KI-9	:	Kalau manfaat yang saya rasakan secara langsung dari implementasi KKP sama CMSVA ini sih ya, kita jadi bisa meminimalisir penggunaan dana tunai ya Mbak ya, Bendahara tuh jadi gak perlu banyak-banyak simpen kas diberangkas Mbak, jadi resiko hilang atau salah hitung karena human error pasti juga bisa diminimalisir kan Mbak. Terus selain itu dengan CMSVA, Bendahara bisa langsung aja transfer ke rekening pegawai, jadi ya meminimalisir resiko-resiko tadi dan juga jadi lebih cepat sih Mbak.
Peneliti	:	Banyak juga ya manfaatnya ya, aman terus meminimalisir resiko hilang gitu ya, karena itu kalau hilang jadi tanggung jawab siapa mbak?
KI-9	:	Bendahara
Peneliti	:	Bendahara ya, berarti Bendahara terbantu betul ya dengan non-tunai ini ya Mbak ya, baik kalau itu tadi manfaat ya, kemudian kalau kendala nih mungkin Mbak ini kan pernah gak merasakan kendala atau hambatan atau mungkin mendengar gitu terkait penggunaan KKP atau CMSVA ini Mbak?
KI-9	:	Penggunaan KKP di lapangan sejauh ini sih lancar-lancar aja ya mbak ya, cuman yang saya ingat tahun lalu itu ada pembebanan belanja pada tagihan KKP saya yang ketukar mbak dengan pemegang KKP yang lain dan saat itu bank juga gak bisa menukarkan langsung si pembebanannya itu dengan alasan tagihannya sudah dibayarkan, padahal kan kesalahannya ada di pihak bank yang bayar. Terus akhirnya waktu itu Bendahara secara manual mengsinkronkan mbak antara pertanggung jawabannya dengan pembayaran-pembayaran selanjutnya. Untuk kenaikan limit juga ya, kebutuhan kami kan cukup tinggi di lapangan, sehingga pasti harus minta kenaikan limit. Ini kadang terkendala di lapangan, kalau kami minta naik limitnya lebih dari jam 5 sore, biasanya jadi lama prosesnya, belum lagi surat persetujuannya. Harusnya kan ada. Tapi kami belum pernah ajukan karena kejar-kejaran waktu. Belum ada orang di tim kami yang memprosesnya.
Peneliti	:	oh berarti ternyata ini juga ya, ada juga ya kendala dari si KKP ini ya tetap manusia gitu ya mbak ya yang ada human errornya ya. Kemudian saya lanjut ya mbak, dari Satker mbak sendiri, mbak kan di Satker apa mbak? di Sekretariat ya, itu ada tidak himbuan atau aturan yang mewajibkan penggunaan KKP atau CMSVA ini Mbak untuk mekanisme pembayaran belanjanya?
KI-9	:	Kalau pimpinan sih cukup mendorong ya Mbak penggunaan KKP dan CMSVA ini sebagai mekanisme pembayaran belanja, khususnya dalam hal belanja perjalanan dinas dan pembelian suplai perkantoran, kali ini kelihatan Mbak, ada SK penetapan pemegang KKP di lingkungan Sekretariat dan SK ini selalu di update secara berkala terus. Terus ada

		juga sarana agar kita mudah melakukan top up limit KKP. Prosesnya cuma dalam waktu beberapa jam mbak, terus ada juga WA group 24 jam untuk mengakomodir pemesanan tiket pesawat menggunakan KKP melalui teletravel, terus ada juga himbauan-himbauan pembelian ATK untuk menggunakan Digipay.
Peneliti	:	Berarti dari satker atau dari pimpinan sebetulnya sudah sangat mendorong penggunaan KKP atau CMSVA ini, tapi tadi kalau bicara aturan yang mewajibkan belum ada ya mbak?
KI-9	:	Himbauan aja
Peneliti	:	Himbauan aja ya, baik. Kemudian yang berikutnya, apakah di satker Mbak Niken atau mungkin Mbak Niken ketahui ada di satker-satker lain Mbak yang sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau BIMTEK terkait pengelolaan KKP atau CMSVA ini Mbak?
KI-9	:	Kalau di tempat kami, satker Sekretariat Kementerian itu setahu saya sudah beberapa kali mbak menyelenggarakan sosialisasi, seringnya sih beriringan sama sosialisasi yang dilakukan oleh KPPN misalnya saat ada sosialisasi PMK Mbak terkait cara pembayaran dan penggunaan KKP, terus saat launching penggunaan KKP domestik, CMSVA, terus ketika ada peralihan dari DigiPay 009 jadi DigiPay 1, tata cara perpajakan dalam menggunakan KKP dan lain-lain, banyak sih Mbak seingat saya itu pun selalu menghadirkan KI-9 dari KPPN atau Direktorat PKN dan sosialisasi ini pastinya melibatkan para pengelola keuangan, baik di satker pusat maupun di daerah.
Peneliti	:	Baik, sudah cukup sering berarti ya, satker Sekretariat mengadakan sosialisasi ya, berarti pimpinan aware juga ya Mbak ya, mendorong tadi ya penggunaan KKP dengan cukup sering juga ya mengadakan sosialisasi begitu ya, baik. Lalu berikutnya Mbak, apakah kalau tadi sosialisasi, nah kemudian kalau sekarang satker ada aktivitas ini ya Mbak, pengawasan atau monev terkait pengelolaan KKP atau CMSVA ini, staker melakukan tidak Mbak?
KI-9	:	iya Mbak, kita ada grup WA-nya Mbak itu untuk pemesanan tiket melalui travel yang terafiliasi dengan BNI maupun terkait permintaan kenaikan limit KKP. Menurut saya sih ini bentuk pengawasan juga ya dari staker, terus setahu saya juga ada laporan monev penggunaan KKP untuk memantau frekuensi transaksi satker dalam menggunakan KKP yang itu tuh disampaikan ke KPPN secara berkala mbak. Tapi kalau untuk CMSVA setahu saya belum ada laporan yang harus disampaikan mbak.
Peneliti	:	oh laporannya ya
KI-9	:	Iya, terus kalau CMSVA setahu saya sih belum ada Mbak, laporan yang harus disampaikan
Peneliti	:	oke, berarti tadi bentuk pengawasannya itu ya Mbak ya, maksudnya terpantau gitu oleh satker tadi melalui grup WA ya Mbak ya, untuk apa tadi baik pemesanan tiket gitu ya, permintaan kenaikan limit begitu ya, jadi satker tahu gitu ya, apa, tadi pengelolaannya begitu, baik. Kemudian yang berikutnya mbak, apakah, mbak ini kan mengetahui mengenai aturan atau regulasi terkait pengelolaan KKP atau CMSVA, aturan apa saja mungkin yang mbak ini kan ketahui nih?
KI-9	:	Terkait penggunaan KKP ini ada mbak, beberapa peraturan yang saya tahu, misalnya seperti saya nih mbak yang kebetulan pemegang KKP

	perjadi, setahu saya itu penggunaannya terbatas hanya untuk kebutuhan perjadi saja, misalnya untuk beli tiket, terus sewa mobil, atau bayar penginapan, gak boleh untuk keperluan di luar itu mbak. Terus kemudian untuk limit KKP, karena besaran yang saya terima itu nilainya juga terbatas ya mbak, jadi kalau saya punya kebutuhan yang lebih besar dari limit reguler, saya tuh saya harus mengajukan permohonan kenaikan limit
Peneliti	: oh itu masuk ke regulasinya berarti ya Mbak ya, oke baik. Lalu kalau secara teknis nih Mbak, Mbak Niken sejauh mana mengetahui secara teknis terkait penggunaan KKP ataupun CMSVA?
KI-9	: Ya, saya tahu cara menggunakan KKP. KKP ini biasanya saya gunakan untuk membeli tiket pesawat melalui travel yang sudah terafiliasi dengan BNI. Prosesnya online saja, mereka tinggal mendebet transaksi yang saya lakukan pada billing. Lalu untuk penginapan biasanya saya gunakan KKP langsung di tempat, terdebit melalui mesin EDC pihak hotel.
Peneliti	: ya berarti tadi kan di awal dimention, sebetulnya secara mekanisme sama dengan kartu kredit di sektor swasta ya mbak, berarti ya bisa langsung digunakan secara online, tadi penyedia jasa melakukan debit gitu ya auto debit. Kemudian yang kedua tadi Mbak Niken sempat mention soal penggunaan di penginapan gitu ya, di hotel ya langsung digesek juga sama ya, seperti kartu kredit biasa digesek di mesin EDC nya begitu, baik. Lalu berikutnya, apakah Mbak Niken pernah mengalami atau mungkin pernah terinformasi mengenai kendala atau permasalahan administrasi terkait pengelolaan KKP atau CMSVA?
KI-9	: yang itu tadi Mbak, tadi kan saya sempat cerita ya pihak bank itu pernah keliru membebankan tagihan
Peneliti	: oh yang tadi salah ya
KI-9	: jadi ada transaksi atas nama saya, tapi masuk ke biling statement atas nama pegawai yang lain sehingga saat administrasi pertanggung jawaban saya sudah selesai nih di proses bendahara hingga pencairan, bendahara bingung lagi kok tagihannya malah muncul atas nama yang lain
Peneliti	: oh ya itu administrasi ya?
KI-9	: Iya, setelah ditelusuri ya itu ternyata ada kekeliruan pihak bank
Peneliti	: ini berarti kekeliruan administrasinya sudah lebih ke pihak banknya ya, bukan di internal sector ya. Kemudian lanjut ya Mbak ya, yang berikutnya apakah Mbak Niken mengetahui SOP atau Standard Operational Procedure dalam bidang keuangan yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian terkait pengelolaan KKP dan CMS ini sendiri sudah tersedia belum SOP-nya Mbak?
KI-9	: Sepertinya kalau di bidang keuangan pasti ada SOP ya Mbak ya, mereka kan mengelola pembayaran tagihan, bendahara mengelola uang persediaan satker. Nah kalau spesifik terkait KKP dan CMSVA ini saya nggak tahu apakah ada tapi belum disosialisasikan atau memang betul-betul belum ada SOP yang khusus mengelola KKP atau CMS VA ini.
Peneliti	: oh jadi kemungkinan memang belum ada SOP khusus si KKP ini ya, baik. Lalu berikutnya apakah Mbak Niken mengetahui nih mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMS VA yang diatur oleh Kementerian Keuangan nih Mbak?
KI-9	: Kalau untuk detil aturan terkaitnya, saya belum terlalu memahami ya Mbak ya, bisa jadi mekanisme reward and punishment untuk penggunaan

		KKP dan CMSVA ini sudah diatur oleh Kementerian Keuangan tapi saya belum tahu apakah itu berjalan atau tidak
Peneliti	:	oh baik-baik, berarti kalau pun iya tadi, maksudnya mereka diaturan mereka mungkin sudah ada begitu ya, cuma secara pribadi atau secara langsung Mbak Niken belum merasakan itu ya, apakah reward and punishment yang ada di peraturan Kementerian Keuangan itu sudah betul-betul berjalan. Nah kalau itu kan yang oleh Kementerian Keuangan Mbak, kalau yang dari internal Kementerian Koperasi dan UKM sendiri atau lebih spesifik lagi tadi dari sekretariat ya Mbak ya, itu sudah ada belum Mbak, mekanisme reward and punishment untuk penggunaan KKP atau CMS ini?
KI-9	:	Kalau di internal Kementerian Koperasi dan UKM, setahu saya sih belum ada diatur mekanisme khusus ya Mbak hanya saja kalau KKP-nya tidak selesai dipertanggungjawabkan dalam waktu 2 bulan sejak pemakaian, itu kartunya akan terblokir dan nggak bisa dipakai, saya pernah sih Mbak soalnya pernah pengalaman itu.
Peneliti	:	Itu berarti terblokirnya dari pihak bank?
KI-9	:	Iya, dari pihak bank.
Peneliti	:	Berarti mungkin memang, maksudnya memang secara sistem akan terblokir oleh bank, jadi Satker-nya sendiri nggak ikut campur gitu ya atau itu ada permintaan dari Satker untuk diblokir?
KI-9	:	Setahu saya sih nggak ya Mbak ya, langsung banknya.
Peneliti	:	Langsung banknya ya? Okee, berarti tadi dari Satker atau dari Kementerian Koperasi sendiri belum ada ya mekanisme khususnya ya?
KI-9	:	Betul.
Peneliti	:	Nah menurut Mbak Niken ini, apakah keberadaan mekanisme reward and punishment ini dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS di Kemenkop ini Mbak?
KI-9	:	Harusnya sih pengaruh ya Mbak ya kalau udah jelas aturannya kan orang-orang pasti akan lebih aware, meskipun mungkin awalnya terpaksa nih harus menggunakan KKP ini. Tapi karena dengan adanya mekanisme reward and punishment bisa jadi mereka akan takut kena sanksi. Jadi pada akhirnya akan bisa meningkatkan penggunaan KKP dan CMS ini juga Mbak, implementasinya jadi lebih optimal.
Peneliti	:	Berarti kalau mau meningkatkan supaya jauh lebih optimal, perlu gitu ya?
KI-9	:	Seharusnya sih berjalan ya reward and punishmentnya.
Peneliti	:	Oke baik, baik Mbak. Selanjutnya langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Satker yang mungkin Mbak Niken ketahui dalam upaya si Satker ini menjaga akuntabilitas pengelolaan KKP maupun CMSVA ini Mbak?
KI-9	:	Kalau yang sudah-sudah saya alami ya Mbak ya bagian keuangan itu secara berkala memantau Mbak permohonan kenaikan limit KKP dan juga pemakaian KKP-nya pegawai. Jadi akan diingatin tuh Mbak kalau ada KKP yang agak lama penyelesaian pertanggung jawabannya, juga terkait penggunaannya kalau ada yang digunakan untuk keperluan pribadi, pasti akan langsung diinfo Mbak untuk segera diselesaikan pembayarannya. Pernah ada yang gitu soalnya.

Peneliti	:	Jadi tadi melalui bagian keuangan memantau itu tadi ya supaya tadi meminimalisir resiko-resiko tadi yang Mbak Niken sebutkan ya, ada kalau lama pertanggung jawabannya begitu ya, sama kalau ada penggunaan pribadi gitu ya, oke baik. Kemudian berikutnya, oh berarti ini harusnya sudah nih ya nggak perlu saya tanya lagi nih. Apakah Mbak Niken pernah melakukan transaksi belanja negara menggunakan KKP?
KI-9	:	Tadi sering ya saya pakai untuk perjalanan dinas
Peneliti	:	Oke baik. Tadi kemudian transaksi belanja negara apa saja Mbak yang tadi menggunakan KKP?
KI-9	:	Kalau KKP biasanya sih untuk beli tiket pesawat sama bayar hotel di daerah. Pernah juga itu Mbak saya pakai untuk bayar sewa mobil di daerah.
Peneliti	:	Oh bisa juga ya buat sewa mobil ya selain apa tadi beli tiket bayar hotel terus bisa sewa mobil juga ya bayar pakai KKP?
KI-9	:	Bisa mbak
Peneliti	:	Kalau itu Mbak kalau misalnya perjadinnya nggak pakai pesawat nih pakai mobil, beli bensin bisa juga nggak pakai KKP?
KI-9	:	Bisa mbak
Peneliti	:	Bisa ya, oke baik. Lanjut ya Mbak saya tanya, apakah transaksi belanja negara yang tadi Mbak Niken lakukan dengan KKP itu memerlukan ketersediaan mesin EDCnya Mbak yang elektronik data capture yang buat geseknya itu?
KI-9	:	Kalau untuk beli tiket sama bayar hotel sekarang ini saya rasa sebagian besar udah nggak perlu mesin EDC lagi Mbak ya. Sekarang kalau saya mau pesen tiket kan bisa langsung di travel yang terhubung dengan BNI lebih cepat juga terus kalau penginapan malahan saya lebih sering pesen dulu lewat aplikasi-aplikasi seperti traveloka gitu Mbak atau tiket.com sebelum keberangkatan, nanti saya tinggal input aja informasi kredit kartu saya, terus input nomor CVV nggak perlu gesek-gesek kartu lagi pakai mesin EDC Mbak, dan saat dinas saya juga jadi lebih tenang karena udah jelas penginaannya.
Peneliti	:	Udah pesen duluan gitu ya. Berarti tadi terkait mesin EDCnya ini sebetulnya kalau saya boleh ini katakan transaksi-transaksi yang tadi Mbak Niken lakukan itu udah nggak perlu lagi mesin EDC karena justru sudah dilakukan secara online. Tadi beli di travel atau penginapan tadi di traveloka gitu ya mba ya nggak harus gesek-gesek kartu lagi gitu ya. Udah nggak tergantung lagi. Tapi pernah nggak Mbak menggunakan kartu itu?
KI-9	:	Mesin EDC? Pernah
Peneliti	:	Pernah ya. Pas menggunakan mesin EDC itu pernah menemui kendala atau hambatan nggak Mbak saat bertransaksi?
KI-9	:	Kalau kendalanya sih mungkin terkait limit KKP-nya aja ya Mbak ya. Karena kan limitnya terbatas, terus periode kenaikannya kan juga sifatnya sementara sehingga kalau darurat diperlukan terus ternyata kita perlu tambahan limit itu, jadi perlu waktu Mbak untuk dapet approval kenaikan limitnya. Kalau lainnya sih nggak ada masalah Mbak. Saya sih cukup terbantu dengan adanya KKP ini.
Peneliti	:	Berarti tadi maksudnya pas menggunakan mesin EDC masalahnya ternyata limitnya nggak cukup gitu ya. Tapi sebenarnya mesin EDC



		sendiri nggak terlalu masalah ya. Cuma tadi terkait limitnya itu ya ternyata ada ketidakcukupan limit gitu ya Mbak Niken ya. Oke lalu berikutnya, oh ini sekarang terkait keterlibatan pihak bank Mbak. Apa yang Mbak Niken ketahui tentang tingkat responsivitas pihak bank? Tadi kalau Kementerian Koperasi dengan BNI ya Mbak ya, bermitranya?
KI-9	:	Iyaa betul
Peneliti	:	Dalam memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini Mbak?
KI-9	:	Setahu saya sih Bank cukup responsif ya Mbak ya. Jadi ada WA group Mbak antara bank dengan administrator KKP untuk memfasilitasi permohonan kenaikan limit tadi. Jadi para pemegang kartu tuh kalau perlu tambahan limit tuh bisa tinggal informasiin aja ke administrator KKP tadi, nanti si administrator akan langsung meneruskannya ke pihak BNI gitu untuk diproses. Biasanya kalau hari kerja dan jam kerja permohonan kenaikan limit tadi tuh cuma beberapa jam aja Mbak diprosesnya.
Peneliti	:	Tapi pernah mungkin Mbak Niken pernah dengar atau punya informasi nggak kalau misalnya permohonan kenaikan limitnya di luar jam kerja masih direspon nggak?
KI-9	:	Masih sih direspon. Cuman ya itu agak lama.
Peneliti	:	Oh kalau di luar jam kerja ya, tapi kalau di dalam jam kerja ya cukup responsif gitu ya mereka langsung bisa memproses gitu ya kenaikan limitnya, baik. Kalau tingkat responsivitas pihak bank dalam mengatasi kendala penggunaan KKP ini, mungkin mbak Niken juga pernah merasakan atau terinfo mbak terkait ini, respon mereka terhadap kendala penggunaan KKP?
KI-9	:	Pernah ya mbak, ketika ada kendala gitu kita minta ini dari pihak bank tapi jarang banget sih ada kendala-kendala itu, biasanya kalau saya lagi tugas ke daerah-daerah terpelosok aja yang jauh dari pusat kota gitu, kadang-kadang kan suka ada kendala jaringan tu mba. Kalau dipelosok tu saya biasanya kan melakukan pembayarannya langsung di penginapan ya pakai mesin EDC gitu. Nah kalau jaringannya bermasalah itu bisa 2 sampai 3 kali gesek tu KKPnya, saya cuma takut aja kedebet lebih dari sekali.
Peneliti	:	Tapi dari pihak bank kalau ada kendala kayak gitu, itu tadi yang mbak Niken penginapan misalnya ada kendala gitu ya saat gesek jaringan bermasalah gitu, terus si pihak hotelnya itu langsung menghubungi bank gitu mbak?
KI-9	:	iyaa
Peneliti	:	Tapi gimana, mungkin pernah ada info ngga respon mereka itu gimana bisa langsung menanggapi atau bagaimana?
KI-9	:	Agak menunggu juga si mbak, menunggu konfirmasi dari banknya itu
Peneliti	:	Oke baik. Nah ini mungkin yang terakhir ni Mbak Niken, secara umum atau secara garis besar apa yang Mbak Niken ketahui mungkin juga tentunya selaku pemegang KPP, kemudian pengguna gitu ya tentang peran aktif pihak bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMS selama ini di Kementerian Koperasi dan UKM?
KI-9	:	Menurut saya sih, bank sudah cukup aktif ya mbak ya dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP dan CMSVA ini. Kelihatan si dari cara mereka merespon dengan cepat mbak permohonan kenaikan limit, terus kendala-kendala yang kita hadapi mbak di lapangan gitu. Pernah juga kan

		kita ada permintaan ini blokir sementara tu mbak KKP karena kehilangan dompet waktu itu, terus kita minta penggantian kartu hilang juga pernah. Ya menurut saya si sudah berperan aktif ya mbak ya bank itu dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP ini.
Peneliti	:	Berarti sesuai komitmen mereka gitu ya mbak, saya baca di jurnal-jurnal sebelumnya kan memang bank ini kan ceritanya sangat berkomitmen gitu mendukung program-program pemerintah dalam mensukseskan pembayaran non-tunai ini berarti sejalan ya dengan apa yg tadi mbak Niken sampaikan, bahwa mereka hadir gitu ya maksudnya respon terhadap segala bentuk yang diperlukan di pengelolaan KKP maupun CMSVA ini di Kementerian Koperasi dan UKM berarti juga seperti itu ya pihak BNI nya ya mbak ya, cukup responsif. Baik, Mbak Niken sementara dicukupkan pertanyaannya, terimakasih banyak nih, mohon maaf telah mengganggu waktunya, Insya Allah hasil wawancaranya yang akan saya gunakan dalam penelitian saya ini. Terimakasih sekali lagi atas waktunya mbak Niken saya izin ya, Assalamu'alaikum Wr Wb.
KI-9	:	Wa'alaikumussalam Wr Wb.

  
**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**JAKARTA**

## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Taufik  
 Jabatan : Penyedia Barang/Jasa  
 Unit Kerja : CV. Astra Era Buana  
 Tanggal Wawancara : 27 September 2023  
 Kode Informan : KI-10

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang Pak Taufik.
KI-10	:	Siang bu.
Peneliti	:	Ya, Pak Taufik ini menyambung kemarin surat izin penelitian yang saya sampaikan sebelumnya. Nah ini mohon izin saya melakukan wawancara langsung. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Galih Cheria Puspita, Mahasiswa Magister Politeknik STIA LAN jurusan Manajemen Keuangan Negara. Nah saya memang saat ini sedang membuat tesis, melakukan penelitian, adapun judul yang saya angkat itu memang terkait dengan sistem pembayaran non-tunai pada Kementerian Koperasi dan UKM nih Pak Taufik. Nah dari informasi yang saya peroleh di awal nih dari Kementerian Koperasi dan UKM, ini betul ya Pak Taufik itu salah satu penyedia barang di Kementerian Koperasi dan UKM ya?
KI-10	:	Betul.
Peneliti	:	Di satker apa pak?
KI-10	:	Sekretariat.
Peneliti	:	Oh di Sekretariat. Oke ada, disana ada beberapa ya? Ada beberapa Satker ya? Tapi Bapak di Sekretariat aja?
KI-10	:	Iya, di situ aja.
Peneliti	:	Oke baik. Nah, jadi itu tadi dari informasi yang saya peroleh, dari data-data yang saya ambil, ternyata memang penggunaan sistem pembayaran non-pemerintah, mungkin Pak Taufik malah lebih familiar ya kan, ada Kartu Kredit Pemerintah sama ada internet bankingnya itu Pak Taufik yang cash management system. Nah itu ternyata dari data-data yang saya ambil, itu pemakaiannya itu masih rendah disana. Nah itu tesis saya sedang membahas itu, mencoba mengangkat itu, menggali faktor-faktor apa kiranya yang mempengaruhi tadi, penerapan penggunaan pembayaran non-tunai itu. Nah Pak Taufik selaku salah satu nih, berarti terlibat di pengelolaan pembayaran non-tunai itu ya. Nah, saya coba nih menggali informasi terkait hal itu. Saya izin bertanya ya.
KI-10	:	Boleh bu.
Peneliti	:	Apa yang bapak ketahui dari cashless payment system, kartu kredit pemerintah atau KKP, dan juga cash management system?

KI-10	:	Oh iya. Oh KKP lho bu, atau Kartu Kredit Pemerintah. Kartu Kredit juga kan ya itu bu, Kementerian yang biasa digunakan untuk membeli toner, kayak gitu bu. Kertas, pulpen, snack rapat, dengan menggunakan itu bu. Apalagi jika kita sudah terdaftar sebagai vendor di aplikasi DigiPay. Pembayaran sudah pasti menggunakan KKP bu. Awalnya sih kami tidak biasa ya, tetapi kalau bermitra dengan pemerintah, harus cepat beradaptasi, kayak gitu bu. Toh memang ternyata lebih efisien kok, pembayaran barang yang kami jual pun lebih cepat dan prosesnya lebih cepat.
Peneliti	:	Jadi yang tadi Bapak sebutkan aplikasi DigiPay itu memang bayarnya sudah harus pakai KKP ya Pak?
KI-10	:	Iya bu, benar.
Peneliti	:	Gak bisa tunai lagi?
KI-10	:	Gak bisa tunai lagi sebenarnya.
Peneliti:	:	Oke, baik. Kira-kira ini kan karena Bapak sudah pernah menerima pembayaran dengan KKP ya, menurut Bapak manfaat apa sih yang Bapak rasakan secara langsung?
KI-10	:	Ya, cepat juga pembayarannya kayak gitu.
Peneliti	:	Berarti maksudnya pembayarannya Bapak terima lebih cepat?
KI-10	:	Lebih cepat bu.
Peneliti	:	Dibanding dengan tunai?
KI-10	:	Dengan tunai.
Peneliti	:	Oh malah lebih cepat ya pak. Tapi itu Bapak terima pembayarannya itu tapi setelah barangnya Bapak kirim kan?
KI-10	:	Setelah barangnya dikirim.
Peneliti	:	Oh setelah barang Bapak kirim ya baru terima pembayaran. Cuma memang lebih cepat gitu ya dibanding yang proses waktu itu. Itu kalau manfaat, tapi kalau ini ya Pak, kalau kendala atau hambatan gitu, Bapak pernah gak merasakan?
KI-10	:	Sejauh ini belum sih bu ya.
Peneliti	:	Belum terlalu?
KI-10	:	Iya, belum terlalu bu. Malah yang di kementerian dengan menggunakan KKP membuat pembayaran kami terima juga lebih cepat. Proses transaksi yang diakomodir dalam aplikasi DigiPay harus adanya penggunaan KKP. Sehingga hal ini berpengaruh ke percepatan pembayaran yang kami terima.
Peneliti	:	Oh ini berarti memang manfaatnya yang lebih banyak ya? Kalau tadi kendalanya itu gak terlalu ya? Sama sekali?
KI-10	:	Gak terlalu sama sekali. Saat menggunakan KKP pernah terkendala jaringan aja bu.
Peneliti	:	Oh jaringan. Kalau jaringan, kendalanya di jaringan aja? Kalau jaringan itu jaringan internet kan ya?
KI-10	:	Iya, internet.
Peneliti	:	Oh berarti tergantung jaringan internetnya tempatnya Pak Taufik. Kalau kondisi jaringannya baik ya harusnya dia gak masalah. Oh tapi kalau KKP-nya sendiri gak pernah ada masalah?
KI-10	:	Tidak pernah ada masalah.
Peneliti	:	Terima pembayarannya sesuai?
KI-10	:	Sesuai.

Peneliti	:	Kemudian lanjut ya Pak, saya tanya ya. Tadi kan Bapak bilang yang Bapak yang bermitranya kalau di kementerian koperasi sama satker kementerian nih. Yang suka pakai jasa Bapak ya, yang suka beli barang. Nah itu satker yang tadi itu, sekretariat itu pernah ngadain sosialisasi gak Pak? Atau bimtek?
KI-10	:	Pernah Bu, kami pernah diundang ikut acara sosialisasi Digipay yang di Manhattan itu, aplikasinya kira-kira seperti Tokopedia laaahh... Nah disitu kami diinfokan kalau transaksi pembayarannya menggunakan KKP. Beberapa kali kami sudah terima bertransaksi dan pembayaran melalui KKP, lancar saja tidak ada masalah. Ternyata cukup mudah yaaa....
Peneliti	:	Oh gitu. Iya, iya, iya. Baik. Lalu, nah berikutnya. Bapak memahami tidak aturan atau regulasi terkait pengelolaan KKP atau CMS itu? Atau apa gitu aturan yang Bapak pahami?
KI-10	:	Sedikit tahu saja sih Bu, Kalau pembelian barang menggunakan KKP kan tidak boleh dikenakan biaya tambahan ya. Saya pernah dikomplain gara-gara itu Bu kemarin.
Peneliti	:	Oh jadi Bapak sempat pernah mengenakan biaya tambahan?
KI-10	:	Pernah bu.
Peneliti	:	Memang itu banknya tidak memberitahu gitu Pak?
KI-10	:	Tidak memberitahu kemarin dulu.
Peneliti	:	Oh tapi akhirnya gimana? Sudah tidak dikenakan lagi?
KI-10	:	Akhirnya tidak dikenakan lagi Bu sekarang.
Peneliti	:	Oh iya. Nah ini kalau saya baca, memang saya baca aturannya Pak yang kartu kredit itu, kalau tidak salah sih memang tidak boleh ya Pak ya dikenakan ya?
KI-10	:	Iya.
Peneliti	:	Oh si pelanggan Bapaknya komplain dikenakan biaya tambahan itu?
KI-10	:	Komplain kemarin.
Peneliti	:	Oh iya baik, baik. Berarti dibaca-baca lagi ya Pak yang di komplain ya?
KI-10	:	Iya.
Peneliti	:	Oke, kalau secara teknis nih Pak, maksudnya menggunakan, berarti kan karena pakai aplikasi DigiPay, Bapak pakai juga ya aplikasi DigiPay itu, Bapak secara teknis mengerti nggak itu cara menggunakan itu? KKP atau CMS itu?
KI-10	:	Saya mengerti bu. Saya menerima pembayaran KKP dari transaksi belanja yang diproses melalui aplikasi DigiPay itu. Itu paham sih ya Bu. Harus mengerti karena zamannya sekarang semua sudah menggunakan teknologi itu. Kalau tidak mengerti ya akan semakin susah bertahan.
Peneliti	:	Oh gitu. Sekarang saingannya berat ya Pak ya? Saingannya juga harus jadi gitu. Harus jeli, harus kreatif gitu ya. Oh ternyata kalau sama pemerintah sekarang bisa pakai aplikasi ini, jadi harus masuk. Tapi kan Bapak sudah terdaftar ya?
KI-10	:	Sudah bu.
Peneliti	:	Terus berikutnya Pak, Bapak pernah mengalami atau mungkin mengetahui kendala permasalahan administrasi tidak terkait pengolahan KKP atau CMS ini?
KI-10	:	Sejauh ini saya tidak pernah ada masalah berarti Bu untuk transaksi yang saya terima dari KKP. Paling soal jaringan saja Bu.
Peneliti	:	Oh yang jaringan tadi ya?

KI-10	:	Benar bu. Tapi pernah ada transaksi tidak terdebit Bu. Tapi itu berarti dari pihak bank kayaknya Bu.
Peneliti	:	Oh tapi kalau administrasi antara Bapak sama yang beli, pembelinya tidak pernah ada masalah?
KI-10	:	Tidak pernah.
Peneliti	:	Karena Bapak penjual berarti harus ada yang Bapak kasih kwitansi gitu. Terus itu tidak masalah berarti administrasinya ya?
KI-10	:	Tidak tidak.
Peneliti	:	Kalau kendala itu yang Bapak bilang jaringan. Berikutnya Pak, saya tanya apakah transaksi belanja negara yang Bapak lakukan tadi dengan KKP itu perlu mesin EDC? Yang mesin gesek itu?
KI-10	:	Oh perlu. Bisa pakai mesin EDC Bu. Bisa juga tidak Bu.
Peneliti	:	Oh bisa pakai, bisa tidak.
KI-10	:	Tetapi sekarang banyaknya sih tidak perlu ya.
Peneliti	:	Oh sudah tidak perlu lagi, kenapa itu Pak?
KI-10	:	Karena saya sudah mendaftarkan di aplikasi Digipay.
Peneliti	:	Oh yang aplikasi Digipay tadi.
KI-10	:	Penjualan barang ke instansi pemerintah bisa lewat situ ya Bu. Potensinya juga besar di sana Bu. Dan kalau di sana pembayaran dengan pakai KKP atau CMS jadi sudah tidak perlu mesin EDC lagi Bu.
Peneliti	:	Oh jadi tadi karena pakai KKP atau mesin EDC itu jadi ya tidak perlu lagi ya digesek. Oh jadi itu mesin EDC nya pun tidak bawa ke kantor itu? Tidak gesek-gesek lagi ya? Langsung online saja gitu ya?
KI-10	:	Tidak.
Peneliti	:	Oh ya baik. Tidak perlu mesin EDC lagi sekarang. Berarti kalau di luar transaksi, maksudnya penjualan Bapak nih dengan instansi pemerintah gitu. Sama yang lain misalnya itu masih banyak tidak yang pakai mesin EDC?
KI-10	:	Tidak ada Bu sih. Tidak. Sudah jarang sekarang.
Peneliti	:	Oh atau Bapak itu jual online juga?
KI-10	:	Iya bu. Jual online.
Peneliti	:	Kalau jual online berarti kayak saya beli di Tokopedia gitu ya. Jadi langsung transfer gitu ya? Sudah jarang yang pakai itu?
KI-10	:	Sudah jarang.
Peneliti	:	Tapi masih berfungsi Pak?
KI-10	:	Masih bu.
Peneliti	:	Oh masih berfungsi ya. Iya. Nah tapi kan berarti Bapak pernah ya menggunakan mesin itu ya walaupun sudah jarang ya tadi Bapak bilang ya?
KI-10	:	Pernah.
Peneliti	:	Nah kendalanya apa tuh Pak saat menggunakan mesin EDC itu pernah tidak ketemu permasalahan apa?
KI-10	:	Ini Bu, untuk transaksi menggunakan mesin EDC nya sih seingat saya biasa-biasa saja Bu. Mungkin sekali ada terkendala jaringan internet saja Bu.
Peneliti	:	Oh internet lagi permasalahannya. Tapi di luar itu enggak ada yang ini ya?
KI-10	:	Tidak ada bu.

Peneliti	:	Baik terus Bapak sebagai penyedia barang apakah Bapak menyediakan fasilitas mesin EDC? Baik terus Bapak sebagai penyedia barang apakah Bapak menyediakan fasilitas mesin EDC?
KI-10	:	Ada Bu. Di toko kami menyediakan mesin EDC. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, dan pemerintah juga sudah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk pembelian barang dan jasa yang pembayarannya sudah tidak memerlukan lagi untuk gesek kartu. Ya jadinya mulai beralih ke aplikasi itu. Saya juga sudah mendaftarkan diri di Aplikasi Digipay. Penjualan barang ke instansi pemerintah bisa lewat situ ya. Potensinya juga besar disana. Dan kalau disana, pembayaran kan pakai KKP atau CMS, jadi sudah tidak perlu mesin EDC lagi. Pakai kartu kredit tetapi tidak perlu lagi digesek, langsung online pembayarannya.
Peneliti	:	Berarti tadi ya Bapak tetap ada mesin EDC. Cuma Bapak sekarang mencoba jualannya gitu online langsung. Terima pembayarannya juga online. Sekarang Bapak lebih banyak bertransaksi sama yang pemerintahan atau non pemerintahan?
KI-10	:	Banyak pemerintahan bu.
Peneliti	:	Oh makanya Bapak tadi masuk ke aplikasi itu ya. Ada Digipay gitu ya. Udah banyak kesana. Jadi udah jarang ya pakai KKP. Eh pakai apa tadi? Pakai EDC, pakai mesin EDC. Nah ini yang terakhir nih Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang peran aktif pihak bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMS selama ini?
KI-10	:	Gini Bu. Ya kami pernah ikut sosialisasi yang diadakan pihak bank ya Bu. Bekerjasama dengan KPPN di Juanda.
Peneliti	:	Oh KPPN berapa tuh?
KI-10	:	Enam bu.
Peneliti	:	Oh KPPN Jakarta VI di Juanda.
KI-10	:	Di situ diinformasikan soal pembayaran pakai KKP atau CMS itu Bu. Karena sedikit terkendala jaringan aja Bu. Atau saat ada yang gesek, tetapi tidak terdebit. Kami kontak banknya ya Bu. Langsung dibantu.
Peneliti	:	Oh responsif gitu ya?
KI-10	:	Responsif. Jadi termasuk baik saja sih pelayanannya Bu.
Peneliti	:	Oh baik baik. Jadi banknya, kan tadi Bapak mesin EDC terus pakai KKP juga. Terima pembayaran lewat CMS juga. Ini kan produknya si bank ya Pak ya? Berarti Bapak kalau ada kendala-kendala tadi langsung telepon pihak bank mereka respon cepat ya?
KI-10	:	Iya produk bank nya. Cepat responnya.
Peneliti	:	Tadi apa sama sosialisasi, itu banknya juga ada di sana ya?
KI-10	:	Iya ada di sana.
Peneliti	:	Oh ikut sosialisasi juga bareng KPPN?
KI-10	:	Iya bu.
Peneliti	:	Oh gitu baik baik. Berarti memang banknya harus aktif ya, soalnya tadi yang Bapak gunakan itu kan produk-produknya bank ya?
KI-10	:	Produk bank.
Peneliti	:	Benar. Baik. Mungkin sementara itu Pak yang saya tanya. Terima kasih banyak nih Pak Taufik sudah berkenan jadi responden saya.
KI-10	:	Siap, sama sama bu.

Peneliti	:	Mohon doanya ya Pak, semoga lancar nih tesis saya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum Wr. Wb.
KI-10	:	Amin. Waalaikumsalam Wr.Wb.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA



## TRANSKRIP WAWANCARA

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Nama : Erna  
Jabatan : Pimpinan Kantor Kas  
Unit Kerja : BNI Kemenkop dan UKM  
Tanggal Wawancara : 26 September 2023  
Kode Informan : KI-12

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr Wb, Selamat Siang Bu Erna, sesuai dengan surat izin penelitian, izin memperkenalkan diri, Nama Saya Galih Cheria Puspita, Saya mahasiswi Magister dari Politeknik STIA LAN jurusan Manajemen Keuangan Negara, saya sedang melakukan penelitian untuk tesis yang sedang saya buat, Pembahasannya tentang sistem pembayatron non tunai (cashless payment system) pada Kementerian Koperasi dan UKM, Nah ini memang dari beberapa telaah dokumen dan informasi yang sudah saya kumpulkan, pada intinya penerapan sistem pembayaran non tunai di KemenkopUKM masih relatif rendah, jadi pengelolaan uang persediaannya masih didominasi uang tunai, kemudian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Cash management system nya itu juga masih rendah, Nah rencananya dari penelitian ini saya coba menggali beberapa faktor yang kiranya mempengaruhi rendahnya implementasi cashless payment system di Kementerian Koperasi ini. Sebelumnya terima kasih Bu Erna telah berkenan menjadi KI-12 penelitian saya, Bu Erna dari BNI selaku mitra Kementerian Koperasi dan UKM yang memang KKP maupun CMS adalah produk dari BNI. Mungkin saya izin langsung bertanya ya Bu Erna ya. Apakah yang ibu ketahui tentang cashless payment system, kemudian kartu kredit pemerintah, dan juga cash management system?
KI-12	:	Tentang <i>cashless payment system</i> ya, CMS, Kartu Kredit Pemerintah atau KKP, <i>cash management system virtual account</i> (CMS VA). Jadi, BNI sebagai bank dari himpunan bank pemerintah atau Himbara. BNI berkomitmen untuk mendorong implementasi cashless payment, sistem pembayaran dalam mekanisme dalam belanja pemerintah. Hal tersebut diwujudkan melalui adanya perjanjian kerjasama antara kami, Induk dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menyediakan instrumen KKP sebagai alat bayar non-tunai. Selain KKP, BNI juga menyediakan fasilitas CMS VA berupa BNI Direct Banking yang juga sebagai sarana pembayaran non tunai. Layanan yang kami sediakan untuk memberikan kemudahan mendukung berbagai pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Untuk ukuran mudahnya, misalnya pembayaran tiket untuk transportasi perjalanan ataupun penginapan untuk perjalanan dinas pegawai.

Peneliti	:	Sekilas tadi Ibu menyebutkan manfaat ya, bisa buat beli tiket, penginapan. Mungkin bisa lebih detail Ibu, izin kiranya apa manfaat yang mungkin Ibu ketahui atau bahkan pernah merasakan langsung dari implementasi KKP atau CMS VA ini?
KI-12	:	Manfaatnya sangat bagus banget ya, bermanfaat banget nih ya, supaya mempermudah. Sebagai penerbit KKP atau penyedia layanan CMS VA, kami memberikan informasi mengenai histori transaksi, jadi nanti ada transaksi lengkap ya.
Peneliti:	:	Bisa ditelusuri gitu ya?
KI-12	:	Betul, sebagai penerbit KKP dan penyedia layanan CMS VA, kami menyediakan informasi mengenai history transaksi yang dilakukan suatu Satker. Informasi tersebut akan memudahkan penanggungjawab di instansi dapat memantau aktivitas penggunaan KKP. Nah meskipun jika dilihat dari sisi pendapatan terkait kerjasama ini terdapat pembebasan sejumlah biaya penggunaan KKP, tetapi kami melihat potensi belanja pemerintah yang dapat dilakukan melalui KKP cukup besar dan berdampak baik pada cashflow organisasi kami.
Peneliti	:	Oh berarti tadi kalau KKP ini banyak biaya yang dibebaskan gitu ya, kalau dibandingkan Kartu Kredit swasta ya. Baik itu mungkin manfaatnya Bu, kira-kira ada nggak nih Bu kendala atau hambatan yang mungkin Ibu pernah dengar sering ditemui oleh pengguna KKP atau CMS VA ini Bu?
KI-12	:	Kalau yang setau saya ya, mengenai kendala hambatan itu dapat diperoleh informasi dari kementerian pengelola kas negara. Masih sedikit sih mbak, untuk satker-satker yang menggunakan CMS VA-nya. Salah satu sebabnya karena masih cukup pegawai yang belum terlalu paham mengoperasikan. Dari pengalaman saya dari kementerian yang lain juga sebagian bendahara atau satkernya ada yang sudah lanjut usia atau senior ya. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali mbak.
Peneliti	:	Jadi pengaruh juga ya Bu ya
KI-12	:	Betul, sumber daya manusia, sumber daya langsung.
Peneliti	:	Jadi banyak kendalanya itu ya Bu karena teknologi, terus kalau ada yang memang usia mungkin pengaruh ya, sudah kesulitan.
KI-12	:	Iya usia itu salah satu pengaruh.
Peneliti	:	Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang perjanjian kerjasama antara Satker di Kementerian Koperasi dan UKM dengan pihak bank terkait pengelolaan KKP maupun CMS?
KI-12	:	Ya...ada mba. BNI ada kerjasama KKP dengan KUKM. Kalau tidak salah sekitar tahun 2019. Sampai sekarang pun masih berjalan. Terkait CMS VA juga, kalau itu kaitannya dengan pembukaan rekening virtual ya. Satker kan mengajukan permohonan pembukaan rekening dulu ke KPPN dan jika sudah turun persetujuan, baru kami eksekusi pembukaannya. Nah kalau rekening nya sudah ada, otomatis akan dapat fasilitas direct banking BNI nya.
Peneliti	:	Jadi CMS ini bagian dari restrukturisasi rekening ini ya bu?
KI-12	:	Iya
Peneliti	:	Baik Bu, selanjutnya Apakah Satker di Kementerian Koperasi dan UKM yang Ibu tahu pernah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau bimtek berkait pengelolaan KKP?

KI-12	:	Selama saya di sini nih mbak, mungkin belum ada undangan sosialisasi. Tapi yang pernah saya dengar waktu awal memang awalnya itu pasti disosialisasi dengan gencar oleh KKP dan oleh Kemenkeu, tetapi dari pihak BNI juga mbak, karena memang awalnya itu memang harus digunakan, dan untuk memberi penjelasan-penjelasan. Dari BNI sebenarnya sudah ada sosialisasi memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan teknis penggunaan KKP. Sepertinya ke depannya perlu diadakan lagi nih mbak, nanti kita adakan lagi ya mbak. Saya juga menunjukkan lagi ke pusat. Karena setiap berapa tahun pasti ada pergantian pengelola, bendahara.
Peneliti	:	Kalau Satker Pemerintah biasanya gitu ya Bu, setiap tahun akan cenderung ada pergantian.
KI-12	:	Pergantiannya cepat juga ya, ada yang 2 tahun, 3 tahun.
Peneliti	:	Jadi perlu sosialisasi berulang
KI-12	:	Betul harus disosialisasi lagi.
Peneliti	:	Yang Ibu ketahui, apakah Satker melakukan aktivitas pengawasan dan monev terkait pengelolaan ini?
KI-12	:	Satker melakukan aktivitas pengawasan ya. Kami berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait penggunaan KKP tersebut sama-sama dengan bendahara masing-masing. Untuk sistem yang berisi informasi pemegang KKP setiap bulannya akan kami sampaikan. Itu salah satu bentuk pengawasan dari mereka ya itu tadi segera mencari informasi dari dokumen yang dikirimkan oleh bank.
Peneliti	:	Bagian keuangannya berarti koordinasi langsung gitu ya
KI-12	:	Ya bisa telpon ke kami, menanyakan gitu.
Peneliti	:	Baik, Apakah Ibu mengetahui atau memahami regulasi terkait pengelolaan KKP atau CMS VA ini?
KI-12	:	Penerbit KKP ini akan didasari atas PKS yang kerjasama dengan Kemenkop. Lalu kami kirim KKP sesuai permohonan Satker di Kemenkop dengan batasan yang bisa diberikan sesuai limit masing-masing. Untuk masing-masing Satkernya ya. Selanjutnya, Satker sudah memberikan informasi KKP tersebut, kami akan membahas terlebih dahulu kepada penyedia. Selanjutnya, menagihkan ke pihak Kemenkop.
Peneliti	:	Jadi kalau pakai KKP ini, dari BNI bayar dulu ke penyedia barang dan jasa. Baru nanti ditagihkan ke Satker. Kalau secara teknis, Ibu memahami mengenai penggunaan KKP maupun CMS ini?
KI-12	:	Tentu kami paham. Harapan kami justru Satker, mitra kami di Kemenkop memahaminya. Terutama CMS untuk VAny. Untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak, pembayaran transfer ke rekanan. Saya juga mau tahu cara bendahara mengoperasikan langsung
Peneliti	:	Apakah Ibu pernah mengalami atau mengetahui kendala atau permasalahan administrasi terkait penggunaan KKP atau CMS?
KI-12	:	Sejauh ini belum pernah ada permasalahan
Peneliti	:	Apa yang Ibu ketahui tentang tingkat responsivitas pihak bank memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-12	:	Kenaikan limit? Sejauh ini kami secepat mungkin memberikan persetujuan atas permohonan limit yang dimintakan sepanjang masih mencukupi limit pengelola untuk UP KKP Satkernya.

Peneliti	:	Apakah Ibu mengetahui kendala teknis penggunaan KKP yang dialami oleh Satker dan bagaimana tingkat responsifitas Bank menghadapi kendala tersebut?
KI-12	:	Terkait masalah yang muncul biasanya bendahara atau Satker langsung telepon walaupun 24 jam di hari libur pun pasti menghubungi kami. Kami mencoba, kalau kita tidak bisa melihat data di waktu libur kami mengarahkan para Satker atau PIC-nya menghubungi BNI call. Menghubungi BNI call di 24 jam. Melalui PIC-PIC BNI Call atau ke BNI Call officer kami, 24 jam.
Peneliti	:	Kalau tadi terkait KKP, berikutnya mengenai CMS bagaimana Bu? Ibu mengetahui kendala teknis yang dialami Satker terkait CMS dan bagaimana tingkat responsifitas Bank?
KI-12	:	Sama ya dengan KKP ya. Selama ini kami berusaha memberikan layanan cepat, tepat kepada nasabah, kapan pun, dan jam berapapun.
Peneliti	:	Selalu responsif ya Bu?
KI-12	:	Selalu responsif sekali. Bila ada kendala teknik CMS, biasanya Satker akan koordinasi langsung ke saya. Langsung respon ya.
Peneliti	:	Siap. Ibu Mungkin izin terakhir Bu Saya tanya dari Ibu Erna. Apa yang Ibu ketahui tentang peran aktif BNI selaku pihak Bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMS VA selama ini Bu?
KI-12	:	Kelancarannya adalah mendukung program BNI dan pemerintah ya khususnya BNI. Untuk meningkatkan manajemen kas di seluruh Kementerian seperti Kementerian Kemenkop. Sering dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat dimana transaksi keuangan masyarakat umum juga semakin mengarah pada non-tunai. Pemerintah maupun BNI turut serta mengimplementasikan hal tersebut. BNI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyediakan berbagai produk dan layanan dalam mendukung program-program non-tunai untuk menjaga kelancaran prosesnya. Kami selalu hadir, mengawal, dan bila nasabah dalam hal ini satker menunggu berbagai kendala atau masalah saat penggunaan. Mereka, saya himbau ya dari pihak BNI nya untuk segera memberikan solusinya. Mereka bermasalah mengadu lah, Nah saya sebagai BNI akan segera mencari jalan keluarnya untuk memberikan solusinya.
Peneliti	:	Berarti memang mau tidak mau dan memang harus mau ya Bu BNI berperan aktif dalam mengelola KKP, CMS dan penerapan sistem cashless payment ini ya Bu. Mungkin Bu, satu lagi nih saya mau tanya terkait mesin EDC Bu. Saat ini masih banyak gak sih Bu, permintaan mesin EDC ini
KI-12	:	EDC itu ada dua, untuk EDC bisa portable bisa dibawa digunakan atau di steady satu tempat.
Peneliti	:	Merchantnya begitu ya?
KI-12	:	Betul, maksud Mbak EDC buat apa kira-kira?
Peneliti	:	Yang ini kan berarti satker kementerian ini kan berhubungan dengan rekanan. Mereka membeli barang dan jasa nih, belanja APBN ke rekanan. Kalau tadi kan, KKP untuk beli tiket, beli ini kan setau saya mereka sudah banyak pakai travel. Jadi online ya Bu, gak perlu gesek mesin EDC-nya gitu. Nah kira-kira tuh masih banyak penyedia. Kalau penyedia barang mau menyediakan mesin EDC, itu permintaannya, kira-

		kira ada informasi tidak Bu trendnya? Maksudnya, apakah dengan sekarang bisa online, gak perlu datang ke toko, misalnya gesek EDC.
KI-12	:	Kita sediakan memang, dimanapun misalnya KPDK, kemarin kita sediakan, ternyata mempermudah, kita sediakan EDC. Nah itu untuk rekanan bagus sekali. EDC itu kan satu nomor rekening itu pakai giro. Kalau rekanan itu misalnya PT apa, nanti kita ajukan ke BNI, kita buka rekeningnya. Kita kasih EDC-nya, seperti itu, nanti kalau pembayaran tinggal gesek.
Peneliti	:	Berarti dengan mesin EDC itu juga meningkatkan penggunaan kartu kredit harusnya ya?
KI-12	:	Iya, betul, kartu kredit, bisa pakai tap cash, sekarang ada Qris
Peneliti:	:	Qris pakai EDC juga ya di create nya?
KI-12	:	Bisa pakai EDC, dia keluar di barcode, muncul, udah.
Peneliti	:	Baik, banyak informasi ya Bu. Terima kasih Bu Erna atas waktunya, atas informasinya Bu. Mudah-mudahan bisa saya gunakan, insya Allah bisa saya gunakan. Assalamu'alaikum Wr Wb.
KI-12	:	Wassalamualaikum Wr Wb.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## TRANSKRIP WAWANCARA

---

### MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI (*CASHLESS PAYMENT SYSTEM*) PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

---

Nama : Istianah  
Jabatan : Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia  
Unit Kerja : KPPN Jakarta VI, Kementerian Keuangan  
Tanggal Wawancara : 25 September 2023  
Kode Informan : KI-13

Peneliti	:	Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang Ibu Isti. Ibu Isti izin sesuai dengan surat izin penelitian, Bu, yang saya sampaikan sebelumnya. Mungkin saya juga izin perkenalan Bu, saya mahasiswa magister dari Politeknik STIA LAN. Saya Galih Cheria Puspita, mahasiswa magister jurusan manajemen keuangan negara. Mohon izin, Ibu, terkait dengan tesis yang sedang saya buat saat ini. Saya mengangkat tema model penggunaan sistem pembayaran non-tunai atau cashless payment system pada Kementerian Kooperasi dan UKM. Sebelumnya, terima kasih juga. Ibu Isti sudah berkenan menjadi responden penelitian saya, Bu. Jadi mungkin saya sedikit menceritakan latar belakang kenapa saya mengangkat tema ini. Jadi dari beberapa informasi dan telah dokumen yang saya lakukan sebelumnya, diketahui bahwa implementasi cashless payment system di Kementerian Kooperasi dan UKM ini masih relatif rendah. Jadi untuk pengelolaan uang persediaannya itu masih didominasi oleh dana tunai, sementara memang penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga ini ada cash management systemnya, Bu, yang internet bankingnya itu juga masih rendah digunakan. Atas dasar permasalahan itu, rencananya saya mencoba menggali beberapa faktor yang kiranya dari beberapa penelitian terdahulu yang saya pelajari dapat mempengaruhi pengelolaan cashless payment system itu sendiri. Mungkin saya izin langsung masuk ya Bu, ada beberapa pertanyaan, mohon berkenan Ibu menjawab. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang cashless payment system dalam hal ini penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga cash management system?
KI-13	:	Kalau cash management system itu layanan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank. Kalau dalam hal ini karena CMS-nya pemerintah berarti diberikan kepada Satker untuk rekening penampungan bendara pengeluaran. Kalau untuk KKP, kartu kredit pemerintah, suatu implementasi dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi sama akuntabilitas dalam pengelolaan uang persediaan.

Peneliti	:	Kalau KKP ini sama tidak dengan kartu kredit yang kita ketahui, misalnya di sektor swasta terdapat juga kartu kredit itu sama atau tidak? Ada perbedaan di mana kalau KKP dengan kartu kredit yang di swasta?
KI-13	:	Tentunya beda jauh ya, Kartu Kredit Pemerintah ini jelas peruntukannya, dia dibatasi ada dua jenisnya, yang satu untuk operasional, yang mana pemegangnya itu KPA, dan pejabat yang ditunjuk di sini berlaku sebagai Satker. Terus yang satunya dia untuk perjalanan dinas, yang dia bisa digunakan oleh seluruh pelaksana perjalanan dinas. Kalau yang punya swasta kan peruntukannya bebas ya, kalau ini tidak, dan dia hanya bisa dilakukan dengan menggunakan uang persediaan.
Peneliti	:	Kalau tadi cash management system juga itu, kalau saya baca bu, kurang lebih sama dengan di swasta itu internet banking ya bu? Kalau mekanismenya sama ya bu?
KI-13	:	Tentunya beda, karena kalau yang internet banking punya kita perorangan kan emang itu punya kita ya, kita yang punya rekening kita yang bisa memantau, kalau CMS-nya pemerintah kan itu hasil restrukturisasi rekening ya, jadi kita ambil K/L, terus nanti rekeningnya itu yang membuka mereka digunakan oleh seluruh Satkernya. Nah si K/L-nya itu bisa memantau, demikian pula BUN, kita Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara juga bisa memantau, kalau CMS-nya perorangan kan hanya orang itu bisa memantau. Kalau ini tidak, ini negara bisa memantau, jadi negara tau berapa sih uang kita yang dipegang saker A dan Satker B.
Peneliti	:	Transaksi itu bisa dipantau?
KI-13	:	Bisa, semua bisa kelihatan real time, yang memegang usernya Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Peneliti	:	Ini dari dokumen yang saya baca bu, informasi saya peroleh, ini kan diimplementasikan 2019 ya bu?
KI-13	:	Sebenarnya udah di coba dulu itu, jadi dari 2012 itu baru kita coba non formal. Kita coba di SITP, terus kita coba para pimpinan Kemenkeu. Terus 2017 itu kita bentuk dasar hukum yang jelas dan kita implementasikan di Kemenkeu, bukan lagi dipilih orangnya, tapi Kemeneku gitu. Terus 2019, karena sudah berhasil di Kemenkeu 2019, maka kita terapkan. Karena Kemenkeu yang sudah pakai itu seluruh Indonesia, kalau dulu kan awal sekali kan cuma di Jakarta. Ketika seluruh Indonesia sudah, baru kita implementasikan lagi ke Satker K/L.
Peneliti	:	Manfaat yang Ibu ketahui atau bahkan Ibu rasakan langsung dari implementasi KKP atau CMS ini apa saja bu?
KI-13	:	Manfaatnya yang jelas dia fleksibel karena jangkauan pemakainya kan luas, terus transaksinya dapat diterapkan di seluruh

		merchant,transaksinya juga aman, terus dia juga mengusung transparansi dan akuntabilitasnya dengan cashlessnya. karena kan kita bisa melihat gitu, siapapun bisa melihat transaksi itu untuk apa, berapa jumlahnya, jadi akuntabilitasnya jalan.
Peneliti	:	Karena kalau pakai kartu kredit yang misalnya saya pahami di kartu kredit swasta, kita kan punya billing statement bisa ketahuan transaksinya, ini juga ya, apa ada billing statement juga?
KI-13	:	Iya, billing statement kan kita jadi bisa melihat, oh belinya ini cocok tidak, benar tidak, untuk peruntukannya, untuk semuanya, bener tidak.
Peneliti	:	Kalau tadi Ibu sebut aman ya? Karena tadi kan Ibu non-tunai. Karena memang KKP ini non-tunai. Berarti kalau belanja kita tidak perlu lagi bawa uang tunai seperti itu Bu?
KI-13	:	Iya, gesek atau kita tinggal pakai CVV-nya kan.
Peneliti	:	itu CVV itu tuh kalau online ya Bu ya?
KI-13	:	Iya, kalau online. Sekarang tidak online pun di toko-toko tuh udah bisa pakai CVV kok, tidak pake gesek lagi.
Peneliti	:	Oh, maksudnya tidak usah gesek lagi? Bahkan di merchant pun kayak gitu sih, langsung datang ke merchant, oh gitu ya Bu?
KI-13	:	Jadi kemarin kita belanja di GI, oh iya dia langsung gitu, udah tidak perlu gesek.
Peneliti	:	Nah itu tadi kan terkait manfaat Bu, kalau kira-kira kendala atau hambatan yang mungkin Ibu pernah rasakan atau Ibu ketahui gitu Bu, karena Ibu di KPPN gitu ya mungkin dari informasi dari satker-satker, itu biasanya apa saja sih Bu kendala atau hambatan penggunaan KKP atau CMS VA ini?
KI-13	:	Harusnya tidak ada ya, karena dulu kendalanya EDC. Tapi sekarang kan kita punya Digipay, tidak perlu EDC. Terus tadi siapa bilang toko-tokonya kan sekarang tidak perlu EDC, udah banyak. Harusnya tidak ada kalau untuk Jakarta. Mungkin kalau untuk luar Jakarta, tapi juga udah tidak ya, tidak perlu pakai EDC. Mungkin kendala utamanya pengetahuan kita. KKP itu apa saja sih. Karena mungkin mereka mikirnya KKP hanya untuk perjalanan dinas, padahal untuk segala macam bisa.
Peneliti	:	Saya baca juga Bu di jurnal penelitian sebelumnya. Ada sempat mengemukakan terkait limit itu maksudnya seperti apa? limit KKP atau bagaimana?
KI-13	:	Sebenarnya itu teknis juga iya. Tapi sebenarnya kan kita kesepakatan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Perbendaharaan dengan Bank, karena kan biar tidak mengganggu likuiditas Bank. Terus juga



		<p>mungkin teman-teman masih takut, itu memang kita pertama dibikin limit awal. Limit awal itu memang untuk operasional hanya 50 juta. Untuk KKP hanya 20 juta. Itu kan limit awal. Setelah itu bisa disesuaikan. Seperti Satker yang sudah menyesuaikan KPK dan PPATK, PPATK aja punya 20 miliar.</p>
Peneliti	:	<p>Berarti tadi mungkin Ibu sempat sampaikan, karena pemahaman yang masih kurang, jadi terasa sulit seperti itu ya?</p>
KI-13	:	<p>Kurang, terus yang pokok mungkin dukungan dari pimpinan kan ya.</p>
Peneliti	:	<p>Saya izin masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik ya Bu. Ini memang dari tinjauan yang sudah saya lakukan, itu tadi kembali dari beberapa penelitian terdahulu, saya mencoba mengelompokkan, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi implementasi cashless payment system ini. Saya memang mengambil beberapa faktor, ada 6 Bu nantinya, dari 6 faktor ini, saya akan breakdown. Kalau yang pertama, tadi Ibu menyebut dukungan pimpinan, kebetulan memang saya angkat Bu, faktor komitmen pimpinan dalam implementasi cashless payment system ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu ketahui mengenai perjanjian kerjasama antara Saker dengan pihak bank terkait pengelolaan KPP atau CMS VA ini? Harus ada atau bagaimana Bu?</p>
KI-13	:	<p>Iya, segala sesuatu itu dilakukan harus ada dasar hukumnya. Nah, kami di PMK 196 sudah melengkapi perjanjiannya. Iya, maksudnya, kan satker kan masih bingung, kami juga dulu awalnya bingung gitu, terus gimana? Itu kita lengkapi draft-nya, itu draft dasar ya, itu kan kita hanya contoh gitu, kan ya boleh mengikuti, boleh tidak, boleh kreasi gitu, tapi itu dasar di situ sudah kita lihat. sudah kita kasih tahu, Cuma sepertinya, seperti tadi saya bilang, kayaknya mungkin pimpinan sibuk gitu, atau mungkin sudah percaya aja gitu, tidak usah ditandatangani gitu, padahal di situ sudah disebut ada kenaikan limit. Dasar hukum tertinggi kan memang PKS-nya itu.</p>
Peneliti	:	<p>PKS kan yang tanda tangan berarti KPA-nya ya? Berarti sebetulnya satu hal itu bisa dibilang menjadi bentuk dukungan, atau bentuk komitmen pimpinan seperti itu ya?</p>
KI-13	:	<p>Iya KPA nya, harusnya tapi kadang pimpinan tidak baca. Pimpinan harus aware terhadap pengaturan yang ada didalamnya, jangan hanya sekedar menandatangani agar yakin dalam setiap mengambil keputusan, tidak takut. Bila pimpinan saja tidak berani bergerak, tim dibawahnya pun akan mengikuti sehingga pengelolaan KKP maupun CMS ini menjadi tidak maksimal. Pimpinan harus betul-betul memahami peraturan, ini nomor satu ya, komitmen pimpinan. Pimpinannya oke, ya sudah pakai semua. Bahkan kemarin ada Satker minta tolong ke saya, Bu, pimpinan saya itu tidak mau pakai KKP. Jadi waktu dia dikasih KKP, sama Bank itu dikasih itu, tapi kebiasaan, beliau takut tidak mau</p>

		pakai, gitu. Padahal kan tidak ada kaitannya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau nomor satu menurut saya komitmen pimpinan.
Peneliti	:	Lalu apa yang Ibu ketahui, Bu, apakah Satker menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau bimtek terkait pengelolaan KKP atau CMS ini?
KI-13	:	Ada beberapa Satker yang menyelenggarakan. Itu pun setelah kita ajak ngobrol atau mungkin kita tegur, ya ini kok masalah KKP-nya. Oh iya kami mengadakan begitu PMK itu turun, PMK turun itu langsung kita adakan bimtek.
Peneliti	:	Yang mendapat undangan terkait sosialisasi itu siapa saja Bu?
KI-13	:	Kami pasti ngundangnya PPK Karena yang paling berkepentingan atas KKP ini PPK. Tapi sering yang datang hanya timnya saja
Peneliti	:	Apakah Satker melakukan aktivitas pengawasan, monitoring serta evaluasi terkait pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-13	:	Sepertinya Satker tidakk mantau itu, Mungkin hanya Satker tertentu yang aware ya, mereka mantau. Tapi kalau kayak KPK dan PPATK karena mereka memang posisinya bergerak di aktivitas transparansi. Kalau pemantauan dilakukan dengan baik polanya bisa bagus, GUPnya pun bisa cepat. Semua bisa dikerjakan dengan handphone.
Peneliti	:	Terkait monevnya Ibu, saya baca di PMK 196 itu memang punya kewajiban juga menyampaikan laporan monev ya bu ,apa ada informasi terkait hal tersebut?
KI-13	:	Belum pernah ada yang melaporkan, tapi Alhamdulillah kita sekarang, sama Pak Dirjen dimasukkan dalam omspan, kita bisa mantau. Karena itu kita dapat laporan dari PKN, hanya dapat laporan dari Banknya. Jadi kita melakukan monev memang dari banknya. Dari Satkernya belum.
Peneliti	:	Selanjutnya terkait Sumber Daya Manusia, Apakah Ibu memahami aturan atau regulasi terkait pengelolaan KKP dan CMS VA?
KI-13	:	Susah, Tidak semua dipahami masih sambil belajar juga kita. Misalnya PMK 196 untuk KKP, terkait CMS itu adai di PMK 230 tahun 2016 disitu menyebut tentang kedudukan tanggung jawab bendahara pada saat pengelolaan pendapatan ABPN.
Peneliti	:	Menurut Ibu kalau di Kementerian/Lembaga mengimplementasikan ini, apakah memang menjadi satu keharusan dalam memahami seluruh regulasi terkait pengelolaan KKP maupun CMS ini?
KI-13	:	Harusnya iya, kalau kita implementasi nanti ditanya terkait implementasi itu dasarnya apa saja? Mana saja yang tidak boleh pun kita tanya, jadi learning by doing.
Peneliti	:	Itu tadi terkait pemahaman regulasi lalu berikutnya, apakah Ibu memahami secara teknis penggunaan teknologi terkait penggunaan

		KKP maupun CMS VA? Apakah Ibu mampu menggunakan atau informasi yang mungkin Ibu tahu seperti apa?
KI-13	:	Kalau secara detail aplikasi tidak, saya lebih paham kebijakan. Misalnya seperti limit itu bisa naik dengan otomatis, Saya langsung praktek, tapi saya mengandalkan teman-teman PBJ, teman-teman bendahara, Saya hanya telepon banknya. Jadi mereka yang menjalankan, saya hanya mengarahkan saja.
Peneliti	:	Sementara kalau di Satker sendiri kita sekarang dituntut untuk semakin menggunakan yang non-tunai. Apakah memang personil yang terlibat di dalam situ harus menguasai teknologi?
KI-13	:	Harusnya iya, yang dituntut disitu adalah bendahara yang sudah memiliki sertifikasi. Jadi harus paham betul.
Peneliti	:	Apakah Ibu pernah mengalami atau mengetahui, kendala atau permasalahan administrasi, terkait pengelolaan KAP atau CMS VA?
KI-13	:	Sering, sering ada yang konsultasi juga. Seperti perubahan PKS itu juga termasuk administrasi. Atau misal terkait cara pembayaran pajak hotel, dan dijelaskan juga bahwa KKP itu tidak kena pajak kecuali yang terkait jasa yang nanti dipungut atau dipotong oleh bendahara. Seperti pengadaan kegiatan di hotel, jadi bayarnya bersihnya saja dan yang membayar nanti bendahara menggunakan CMS.
Peneliti	:	Izin Bu terkait faktor SOP, apakah ada tidaknya SOP dalam suatu satker Kementerian/Lembaga itu bisa mempengaruhi kualitas pengelolaan KKP atau CMS VA?
KI-13	:	Sangat...sangat...harus ada SOP. agar jelas ini prosedur pelaksanaannya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, pemegangnya siapa, bagaimana transaksi pembayarannya, kan harus diatur. Sebenarnya di PMK Nomor 196 juga sudah diatur, tinggal diperdalam lagi saja oleh Satker. Jadi ya walaupun selama ini tetap berjalan, tetapi mungkin Satker kurang tahu siapa yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Peneliti	:	Kira-kira ini kan tadi misalnya kondisi ada yang kurang optimal gitu, apa SOP pada saat seperti itu bisa pengaruh?
KI-13	:	Sangat, karena pada saat berjalan, mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Padahal pada PMK sudah diatur jelas begitu pun dengan alurnya.
Peneliti	:	Ada mekanisme terkait dengan mekanisme reward and punishment. Apakah Ibu mengetahui mekanisme reward and punishment terkait pengelolaan KKP atau CMS VA ini?
KI-13	:	Ya...sebenarnya kan sudah ada di PMK Nomor 196 itu. Misalnya, jika pemakaian KKP kurang dari 75% setiap bulannya, maka Satker akan

		dikenakan sanksi berupa surat teguran. Lalu jika masih berulang di bulan berikutnya, besaran UP nya akan dipotong. Tapi kan kami sayang sama Satker. Jadi supaya semua belajar dulu lah, sebisa mungkin semakin hari semakin optimal. Sambil dievaluasi kira-kira apa yang menyebabkan pengelolaannya kurang optimal.
Peneliti	:	Kalau Kementerian/Lembaga juga memiliki mekanisme reward and punishment internal, itu bagaimana ya?
KI-13	:	Itu sebenarnya lebih bagus ya. Seperti di salah satu Satker yang posisinya ada di daerah belum pakai, langsung dikasih teguran dari pusat. Kalau saat ini Satker dengan pengguna KKP terbagus ada di Satker Pengadilan Sorong, mereka juga punya punishment baik dari pimpinan atau dari KPPN Sorong dan mereka DL hanya berani pakai KKP, terus belanja ATK juga hanya berani pakai KKP. Jadi sangat berpengaruh dengan adanya reward dan punishment itu.
Peneliti	:	Baik, ini terkait mesin EDC Bu. Pertama saya tanya, apakah Ibu pernah melakukan transaksi belanja negara dengan menggunakan KKP?
KI-13	:	Pernah, lewat Digipay kita beli snack, beli konsumsi pakai KKP.
Peneliti	:	Apakah belanja konsumsi tadi dengan KKP memerlukan ketersediaan mesin EDC?
KI-13	:	Tidak, karena pakai Digipay berupa marketplace pemerintah. Mekanismenya kurang lebih sama dengan marketplace lainnya. Kemarin sudah 300 ribuan penjualan.
Peneliti	:	Itu maksudnya pembayaran yang dilakukan lewat situ harus pakai KKP?
KI-13	:	Ada pilihannya. Jadi, dia pakai KKP atau pakai VA. Dua-duanya yang pakai digital, tidak ada pakai tunai. Disitu ada pilihan langsung, tapi Kalau kita sih lebih menyarankan pakai KKP karena bisa pakai Digipay sekaligus KKP. Karena KKP kan uang pinjaman dulu dari bank termasuk rencana penarikan dana, jadi lebih bagus kita mengatur disitu.
Peneliti	:	Berarti kita tidak perlu ketersediaan mesin EDC?
KI-13	:	Tidak, sudah tidak perlu lagi, karena belanja menggunakan Digipay, tidak lagi memerlukan mesin EDC. Digipay, marketplace pemerintah menyediakan 2 cara pembayaran, dengan menggunakan KKP dan juga CMS VA. Justru bagi penyedia barang yang tidak memiliki mesin EDC, terutama UMKM, bisa bergabung pada aplikasi Digipay. Mesin EDC sudah agak kuno ya, mulai ditinggalkan.
Peneliti	:	Kalau kendala atau hambatan ada tidak bu yang pernah Ibu temui saat melakukan transaksi belanja negara dengan KKP?

KI-13	: Sebenarnya kalau kendala ini tidak ada. Tapi Sekarang boleh dibilang kendalanya itu karena kita belum tahu aja.. Karena kalau tidak tahu kan susah, ya. Di antaranya mereka tidak perlu EDC, terus mereka juga boleh belanja lebih dari 50 juta ke satu penyedia. Untuk transaksinya pun aman karena peraturan sudah menjelaskan posisi kegunaannya untuk hal yang bisa saja, jadi pasti aman. Kalau mau digunakan macam-macam sama pegawai itu tidak bisa karena sudah dikunci istilahnya oleh pihak bank. Makanya tadi dilihat di PKS harusnya sudah sesuai peraturan, jadi sangat aman.  Misal kemarin ada Satker yang akses itu menggunakan internet gratis di bandara. Lalu KKP nya itu dibobol sama orang dari Amerika dan satu lagi dari Swiss karena langsung dibobol IP Addressnya. Kalau KKP nya sendiri langsung kita lapor ke bank dan langsung diblokir oleh pihak bank. Itu lebihnya KKP dibanding kartu kredit biasa.
Peneliti	: Kalau kendala saat menggunakan mesin EDC?
KI-13	: Pernah, waktu saya masih di Jambi. Katanya kalau mesin EDC itu kena charge dan saya coba ternyata tidak ada. Karena kalau kena charge bisa kita laporkan banknya, karena KKP tidak boleh kena charge dan kalau kena charge banknya yang salah karena ada PKS nya. Misal belanja ATK di mall lalu kena charge nanti yang salah itu Banknya karena tidak ada kerjasamanya nantinya kita lapor ke bank bahwa KKP dalam PMK tidak boleh kena charge seperti itu.
Peneliti	: lalu, terkait keterlibatan dengan pihak bank. Bagaimana tentang tingkat responsivitas pihak bank dalam memenuhi permohonan kenaikan limit KKP selama ini?
KI-13	: Saya sudah ketemu dengan bank BRI dan Mandiri, untuk naik limit itu responsif sekali mereka karena itu salah satu prestasi bagi mereka. Kalau kartu kredit Pemerintah itu sangat prestasi karena berhubungan dengan pemerintah dan dijamin oleh DIPA. Mereka PKS pasti ada dasarnya yaitu DIPA. DIPA juga bisa dilihat sama mereka jumlahnya berapa.
Peneliti	: Apakah Ibu pernah mengalami kendala teknis penggunaan KKP? Dan bagaimana tingkat responsifitas pihak bank mengatasi kendala tersebut? Ibu ada pengalaman terkait kendala teknis? Atau mungkin mengetahui informasi yang terkait itu?
KI-13	: Pernah, waktu pimpinan saya Direktur SITP pergi ke Amerika dan ternyata limitnya kurang lalu langsung ditangani oleh pihak BNI. Kalau PPAATK kemarin mereka juga cerita bos mereka pergi ke Amerika, punya pagu hanya 200 juta lalu langsung minta sama bank 1,8 milyar dan dibantu juga mata uangnya karena sudah super priority karena ada DIPAny jelas.

Peneliti	:	Kalau tadi terkait KKP, kalau terkait CMSVA itu pernah mendengar atau pernah mengalami ada informasi kendala teknis penggunaan terkait CMSVA?
KI-13	:	Waktu akhir tahun sering ketemu karena banyak yang akses dan suka mendampingi juga. Karena bersamaan kan, tapi solusinya juga cepat. Jadi itu pada periode tertentu seperti di akhir tahun karena banyak yang akses seperti hari terakhir VA dan GUP. Untuk solusinya mungkin mereka menutup yang non-government, tapi sebetulnya sampai malam bisa bukanya 24 jam dan saat sedang ramai-ramainya mereka mungkin menutup non-government lalu yang government bisa masuk semua.
Peneliti	:	Apa yang Ibu ketahui terkait peran aktif pihak bank dalam menjaga kelancaran pengelolaan KKP atau CMSVA selama ini?
KI-13	:	Mereka koperatif, tapi kalau dilevel yang bukan penanggungjawab KKP, terkesan kurang. Tapi kalau kita langsung ke PIC KKP, apalagi KKP itu punya pusat bukan punya area atau lokalnya. Untuk PKS juga sangat antusias sekali.  Untuk kerja sama terkait KKP dan CMSVA ini dengan bank Himbara, seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Jadi peran aktif pihak bank sangat berpengaruh terhadap pengelolaan KKP dan CMSVA.
Peneliti	:	Baik, sementara itu. Terima kasih banyak Ibu Isti atas informasinya. Semoga bisa menghasilkan output yang bermanfaat. Baik Terimakasih Bu Assalmualaikum
KI-13	:	Iya Waalaikumsalam Bu

STIA LAN  
J A K A R T A